

**POLITIK IBU RUMAH TANGGA JEPANG :
KASUS *TOKYO SEIKATSUSHA NETWORK*
SEBAGAI PARTAI POLITIK LOKAL**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada
Program Studi Kajian Wilayah Jepang Program Pascasarjana
Universitas Indonesia**

**KADEK EVA KRISHNA ADNYANI
0806484010**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN WILAYAH JEPANG
KEKHUSUSAN DIPLOMASI DAN BUDAYA POLITIK JEPANG
DEPOK, 2010**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

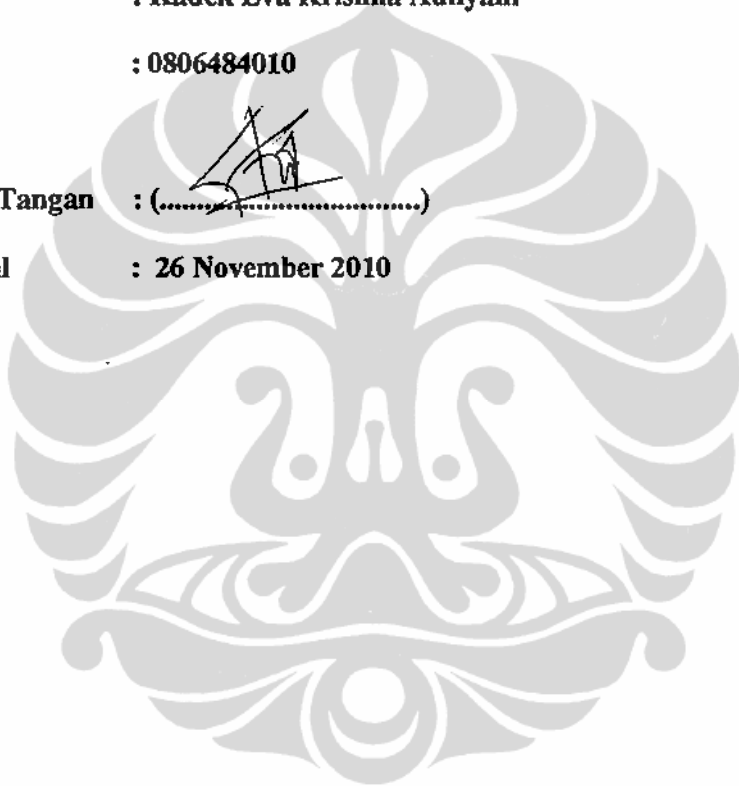
**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Kadek Eva Krishna Adnyani

NPM : 0806484010

Tanda Tangan : (.....)

Tanggal : 26 November 2010





LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Kadek Eva Krishna Adnyani

NPM : 0806484010

Program Studi : Kajian Wilayah Jepang

Judul Tesis : Politik Ibu Rumah Tangga Jepang : Kasus

Tokyo Seikatsusha Network Sebagai Partai Politik Lokal

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Jepang Program Pascasarjana Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A



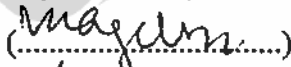
(.....)

Pembimbing II : Syamsul Hadi, Ph.D



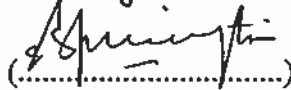
(.....)

Penguji I : Prof. Dr. Noerhadi Magetsari



(.....)

Penguji II : Dr. Sudung M. Manurung



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal: 26 November 2010



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Program Studi KWJ UI, Bapak Dr. Sudung Manurung dan Sekretaris Program, Ibu Dra. Kurniawati Iskandar, M.A, beserta segenap jajaran staf dan pengajar PPS KWJ UI yang telah banyak membantu penulis selama 2 tahun ini.
2. Bapak Prof Dr. I Ketut Surajaya, M.A dan Bapak Syamsul Hadi, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini. Tidak lupa pula, kepada Prof. Dr. Noerhadi Magetsari selaku dosen penguji, yang telah memberikan banyak masukan.
3. Bapak, Dr. Wayan Adnyana, M.M M.Erg, Ibu, Dra. Ni Nyoman Murniasih, M.Erg serta (Widya, Cintya, Sonya) D'adnyanis yang telah memberikan bantuan dukungan material maupun moril.
4. Nyanya, yang baik hati.
5. Kakak kelas, teman seangkatan dan adik angkatan KWJ semua, *Leprosy Care Community* Indonesia, teman2 di *kansai sentaa* yang sudah banyak memberi dukungan.
6. Pihak *Tokyo Seikatsusha Network* yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan penulis.
7. Prof Paul O'Shea yang sudah banyak memberi masukan.

Akhir kata, penulis berharap Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 26 November 2010

Penulis



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kadek Eva Krishna Adnyani
NPM/NIP : 0806484010
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**POLITIK IBU RUMAH TANGGA JEPANG :
KASUS TOKYO SEIKATSUSHA NETWORK
SEBAGAI PARTAI POLITIK LOKAL**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 November 2010
Yang menyatakan



(Kadek Eva Krishna Adnyani)



ABSTRAK

Nama : Kadek Eva Krishna Adnyani
Program studi : Kajian Wilayah Jepang
Judul : Politik Ibu Rumah Tangga Jepang: Kasus *Tokyo Seikatsusha Network* Sebagai Partai Politik Lokal.

Tesis ini menggambarkan dan menganalisa politik ibu rumah tangga Jepang yang bergabung dalam *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai partai politik lokal. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teori Feminis Liberal serta Lokalisme untuk menganalisa peranan *Tokyo Seikatsusha Network* dalam rencana pemindahan Pasar Tsukiji, disimpulkan hal-hal berikut ini.

Tokyo Seikatsusha Network telah menjadi sarana penting untuk merekrut dan memobilisasi ibu rumah tangga Jepang untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal. Dengan menggunakan politik sebagai alat, ibu-ibu rumah tangga Jepang ini mempolitisasi masalah-masalah yang penting untuk warga kota dan mencari solusi untuk mereka. Politik ibu rumah tangga Jepang ini bukannya luput dari masalah. Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi adalah kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan aktivitas politik. Bagaimanapun juga, komitmen mereka untuk menciptakan kehidupan dan lingkungan yang lebih baik kepada keluarga dan masyarakat mereka, telah memberikan efek yang positif terhadap demokrasi dalam dunia perpolitikan Jepang.

Kata kunci : Ibu Rumah Tangga, *Tokyo Seikatsusha Network*, Partai Politik Lokal



ABSTRACT

Name : Kadek Eva Krishna Adnyani
Study Program : Japanese Area Studies
Title : The Politics of Japanese Housewives: A Case Study of Tokyo
Seikatsusha Network as a Local Party

This thesis describes and analyzes the politics of Japanese housewives who joined Tokyo Seikatsusha Network as a local party. The research uses a qualitative case study and localism and feminist liberal theory to examine the role of the Tokyo Seikatsusha Network in the plan to relocate Tsukij. The following conclusions are demonstrated.

Tokyo Seikatsusha Network has been an important vehicle for recruiting and mobilizing Tokyo Japanese Housewives to participate in local level politics. By using politics as a tool, these Japanese housewives were able to politicize issues important to citizens and then find solutions for them. There are still some problems occurred for the housewives. For example, the difficulty to manage time between housework and political activities. However, their commitment to create a better life and environment for their family and their society has had a positive effect on democracy and Japanese politics in general

Keywords : Housewives, Tokyo Seikatsusha Network, Local Party



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR DIAGRAM	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan.....	5
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. <i>Signifikansi Penelitian</i>	6
5. Ruang Lingkup.....	6
6. Kerangka Teori.....	6
6.1 Teori Feminisme Liberal.....	6
6.2 Teori Lokalisme.....	8
7. Metode Penelitian.....	9
8. Kajian Literatur.....	10
9. Sistematika Penulisan.....	11
2. POLITIK IBU RUMAH TANGGA JEPANG	12
2.1 Wanita dalam Politik di Dunia Internasional.....	12
2.2 Wanita dalam Parlemen Jepang.....	15
2.3 Wanita dalam Partai-Partai Politik Jepang.....	20
2.4 Terjunnya Ibu Rumah Tangga Jepang ke dalam Ranah Politik.....	27
2.5 Ibu Rumah Tangga Jepang dalam Politik Lokal.....	34



3. ANALISIS POLITIK IBU RUMAH TANGGA JEPANG : KASUS TOKYO SEIKATSUSHA NETWORK SEBAGAI PARTAI POLITIK LOKAL.....	41
3.1 Induk Seikatsusha Network : Seikatsu Kurabu.....	41
3.2 <i>Seikatsusha Network</i>	46
3.2.1 Gambaran Umum <i>Seikatsusha Network</i>	46
3.2.2 Pembagian <i>Seikatsusha Network</i> di Jepang.....	48
3.2.3 Tiga Prinsip dasar <i>Seikatsusha Network</i>	49
3.2.4 Kegiatan-Kegiatan <i>Seikatsusha Network</i>	49
3.3 <i>Tokyo Seikatsusha Network</i>	51
3.3.1 <i>Tokyo Seikatsusha Network</i> Sebagai Salah Satu Induk <i>Seikatsusha Network</i> yang Terbesar.....	51
3.3.2 Pembagian <i>Tokyo Seikatsusha Network</i>	53
3.3.3 Sejarah Singkat <i>Tokyo Seikatsusha Network</i>	53
3.3.4 Karakteristik Responden (Ibu Rumah Tangga Jepang yang Bergabung dalam <i>Tokyo Seikatsusha Network</i>).....	54
3.4 Studi Kasus : Rencana Pemindahan Pasar Tsukiji.....	61
4. KESIMPULAN	75
DAFTAR REFERENSI	78
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Wanita dalam Parlemen di Negara-Negara Anggota G8.....	15
Tabel 2.2 Keterwakilan Wanita Jepang dalam Politik dan Pemerintahan.....	16
Tabel 2.3 Keterwakilan Wanita di Majelis Tinggi Jepang Tahun 2010.....	19
Tabel 2.4 Keterwakilan Wanita di Majelis Rendah Jepang Tahun 2010.....	20
Tabel 2.5 Kandidat Wanita Berdasarkan Partai Politik (Pemilihan Umum tahun 2000).....	21
Tabel 2.6 Empat Tipe Wanita Jepang yang Sudah Menikah.....	31
Tabel 3.1 Jumlah Wanita dalam Dewan Perwakilan Daerah (10 Besar).....	52
Tabel 3.2 Komposisi Perwakilan Partai-Partai di Dewan Perwakilan Tokyo Metropolitan (12 Juli 2009).....	62
Tabel 3.3 Jadwal Pertemuan Komite Khusus Pasar Tsukiji.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gb 2.1 Ide Mengenai Pembagian Kerja Berdasarkan Gender.....	12
Gb 2.2 Doi Takako.....	24
Gb 2.3 Keiko Chiba.....	26
Gb. 2.4 Mizuho Fukushima	26
Gb. 2.5 Prefektur di Jepang.....	35
Gb. 3.1 Mengurangi Sampah Sebanyak 8,5 kilogram Per-orang. Seukuran dengan Bola Berdiameter 2 M.....	45
Gb. 3.2 Sepuluh <i>Seikatsusha</i> Network di Jepang.....	48
Gb. 3.3 Mini Forum <i>Seikatsusha Network</i>	50
Gb 3.4 Mengecek Rumah Ramah Lingkungan di Setagaya.....	50
Gb. 3.5 Peta Tokyo <i>Seikatsusha</i> Network Berdasarkan Pembagian <i>Wards</i> (Warna Biru) dan <i>Shi/Kota</i> (Warna Pink).....	53
Gb. 3.6 Ikan Tuna Beku yang Dijual di Pasar Tsukiji.....	64
Gb 3.7 Bekas Pabrik Gas di Toyosu.....	65
Gb. 3.8 Karikatur yang Mengkritik Rencana Pemindahan Pasar Tsukiji.....	66
Gb.3.9 Yamaguchi Fumie Ketika Memberikan Konferensi Pers.....	67
Gb 3.10 Seminar Kecil Mengenai Tsukiji.....	69
Gb. 3.11 Hoshi Hiroko ketika meninjau asbes Tsukiji.....	71
Gb. 3.12 Tukar pendapat mengenai keadaan Tsukiji.....	71



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Persentase Perbedaan Tingkat Ketenagakerjaan Pria dan Wanita.....	29
Grafik 2.2 Wanita dalam Dewan Perwakilan Lokal 1981-2003.....	37
Grafik 3.1 Keikutsertaan dalam Seikatsu Kurabu.....	46
Grafik 3.2 Pekerjaan <i>Full-time</i> Responden.....	55
Grafik 3.3 Pendapat Suami Terhadap Keterlibatan dalam <i>Seikatsusha Network</i>	57
Grafik 3.4 Masalah yang Paling Ingin Diselesaikan.....	59

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Jenis Pemerintah Daerah Jepang.....	34
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pembagian Tokyo Seikatsusha Network

Lampiran II : Kronologi Sejarah Tokyo Seikatsusha Network

Lampiran III : Angket

Lampiran IV : Transkrip Wawancara

Lampiran V : Foto-Foto pada Saat Wawancara





BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Selama ini wanita umumnya dikonstruksikan dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat (rumah tangga) yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ranah publik (sektor kerja, politik, dan lain lain). Bahkan dalam hal politik, hambatan wanita untuk menekuninya dua kali lebih berat daripada laki-laki karena mau tidak mau wanita harus melaksanakan berbagai kewajiban rumah tangga. Dunia politik pun seakan disebut-sebut sebagai dunianya lelaki.

Keadaan ini juga berlaku di Jepang yang merupakan salah satu negara industri termaju di dunia. Dibandingkan dengan negara lainnya, representasi perempuan di lembaga legislatif Jepang dinilai cukup rendah. Menurut data yang dikeluarkan *IPU (Inter-Parliamentary Union)* per September 2006 mengenai urutan negara berdasarkan jumlah perempuan di parlemen, Jepang menempati posisi 96 dunia dengan angka keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 9.4%. Angka ini sangat tertinggal jauh dengan negara lain seperti Rwanda (48,8% untuk *lower house* dan 34.6% untuk *upper house*), Swedia (47.3%), Finlandia (42%), Kosta Rika (38.6%), dan Denmark (37.9%). Memang dibandingkan dengan data terakhir yang diakses tahun 2005, posisi Jepang naik dari 102 dunia ke 96 dunia. Tapi tetap saja, angkanya masih di bawah 10%.

Menilik dari *Human Development Report* tahun 2006 yang dikeluarkan oleh UNDP (United Nation Development Programme), Jepang hanya meraih ranking 79 dari 115 negara dalam GGI atau *Gender Gap Index (Gender Equality in Japan 2007 : 7)*. GGI mengukur sejauh mana kesenjangan antara pria dan wanita dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Semakin tinggi ranking suatu negara dalam GGI mengisyaratkan semakin kecilnya kesenjangan antara pria dan wanita yang berarti semakin setaranya kedudukan pria dan wanita dalam masyarakat. Kedudukan Jepang yang jauh tertinggal dari negara lainnya seperti Swedia, Jerman, Amerika, juga Indonesia (Indonesia menduduki peringkat 68) mengindikasikan bahwa untuk saat ini, kedudukan pria dan wanita Jepang masih jauh dari setara.

Jika dibandingkan dengan negara maju yang lain, politik nasional di Jepang dapat dikatakan merupakan benteng pertahanan terkuat dari dominasi pria (Iwao, 1993 : 214). Baik pria maupun wanita cenderung berpikir bahwa politik nasional adalah dunianya pria. Dan hal tersebut membuat wanita cenderung segan untuk terjun dalam dunia politik nasional (Iwao, 1993 : 217).

Wanita Jepang bisa saja mengalami banyak rintangan untuk memasuki politik nasional, namun pada tingkat lokal/daerah, mereka merupakan kekuatan penting dalam memformasikan kebijakan. Mereka menduduki kursi dewan perwakilan setara daerah tingkat I (prefektur) dan daerah tingkat II (*municipal - kota besar/kecamatan*) dalam jumlah yang cukup signifikan. Sebagian dari mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang aktif bergabung dalam partai politik lokal.

Menarik untuk mencermati politik ibu-ibu rumah tangga dalam partai politik lokal. Salah satu partai politik lokal yang cukup terkenal dengan anggotanya yang kebanyakan ibu rumah tangga adalah *Tokyo Seikatsusha Network*. Politik ibu rumah tangga Jepang dalam kasus *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai partai politik lokal inilah yang akan dibahas dan dianalisa lebih jauh dalam tesis ini.

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya dibahas lebih dahulu mengenai definisi politik itu sendiri. Joyce Mitchell dalam bukunya yang berjudul *Political Analysis and Public Policy* mendefinisikannya sebagai berikut ini : "Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya (*politics is collective decisionmaking or the making of public policies for an entire society*) (Budiardjo, 2004 : 11).

Selanjutnya, melangkah pada definisi mengenai ibu rumah tangga.

Di Jepang, umumnya peranan wanita yang dianggap paling dominan adalah sebagai ibu rumah tangga. Yang dimaksud dengan ibu rumah tangga di sini adalah : "*a woman responsible for running her home, whether she performs the tasks herself or hires people to do them*" (wanita yang bertanggung jawab untuk mengurus rumahnya, entah ia mengerjakan sendiri ataupun mempekerjakan orang lain untuk melakukannya) (Lopata, 1971 : 3 dalam Imamura, 1987 : 12).

Tapi selanjutnya, pengertian ini diperjelas lagi oleh Imamura dengan kalimat "*but only a women who had been married at least once are included in the category housewife*" (hanya wanita yang sudah pernah menikah paling tidak sekali,

yang dimasukkan dalam kategori ibu rumah tangga) (Imamura, 1987 :12).

Ideologi dari garis keturunan patriarkhat sudah mengakar sangat kuat di negara ini. Ide bahwa wanita seharusnya berada di rumah dan tetap tergantung pada suami, telah mempengaruhi hampir seluruh kehidupan formal dan informal masyarakat Jepang. Mulai dari sistem gaji, sistem promosi, sistem pajak, dan sistem keamanan sosial, semuanya bergantung dengan rumah tangga di mana selalu pria yang menjadi kepalanya. Meminta persetujuan suami sebelum keluar rumah atau menandatangani nama suami pada pertemuan murid dan guru merupakan hal yang masih umum terjadi di Jepang (Sodei, Takako. Dalam J. Home Econ. Jpn. Vol. 48. No.1. 91-98 (1997); 92).

Secara umum, ibu rumah tangga di Jepang ditanggung secara finansial oleh suaminya. Pada saat yang sama, mereka sering menyesali keputusannya untuk berhenti bekerja karena pernikahan atau mengurus anak, dan mereka mencari kegiatan baru untuk aktualisasi diri (Watanabe, 1995 : 197 dalam www.allacademic.com). Politik lokal menyediakan ruang bagi mereka untuk memperoleh status individual mereka, yang berbeda dari peran mereka sebagai istri dan ibu. Mereka pun mendapat kepuasan dengan bergabung dalam aktivitas kolektif karena lebih menyenangkan dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan memungkinkan mereka untuk menerapkan ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah.

Pada tahun 1968, sekelompok ibu rumah tangga yang gelisah akan keamanan makanan di Tokyo (yang ditengarai banyak mengandung zat tambahan buatan), membentuk *Seikatsu Kurabu Seikyō* (*The Daily Life Club Cooperative Society*) untuk menjual makanan tanpa zat tambahan buatan kepada warga di lingkungan sekitar. Lama kelamaan, dengan bertambahnya anggota yang sekaligus menjadi konsumen tetap, *Seikatsu Kurabu Seikyō* tidak lagi hanya menjual makanan seperti susu, telur, beras, ikan beku, dan sayur-mayur, namun juga pakaian, buku, mainan, bahkan tiket perjalanan wisata (<http://www.seikatsuclub.coop/english/>).

Di samping peduli dengan isu pertanian, gerakan ini juga peduli dengan isu-isu lingkungan seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan penentangan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk

menyuarakan aspirasi para anggotanya mengenai isu-isu ini, para ibu rumah tangga ini pun mulai terjun dalam dunia politik sehingga mereka bisa menjadi salah satu pembuat kebijakan (legislatif) yang lebih peduli dengan isu lingkungan dan pertanian. Untuk itu, pada 1978 dibentuklah turunan dari *Seikatsu Kurabu Seikyō* yang mendukung anggotanya untuk berpartisipasi dalam politik, dan dalam perkembangannya menjadi partai politik lokal. Nama partai politik lokal ini adalah *Seikatsusha Network* (kadang disebut juga dengan *The Network Movement* atau disingkat *Netto*).

Yang dimaksud dengan partai politik lokal (ローカルパーティー - *rookaru paati*) yang dimaksud di sini adalah :

既成の中央政党に対抗し、地方の要望に基づく政策・主張を強く打ち出す政党。教育・福祉・ごみ問題などの身近な問題に具体策を提示できるのが強み。

Kisei no chuou seitou ni taikou shi, chihou no yobou ni motozuku seisaku - shuchou o tsuyoku uchidasu seitou. Kyouiku - fukushi - gomi mondai nado no mijika na mondai ni gutaisaku o teiji dekiru no ga tsuyomi.

Terjemahan :

Partai yang berkompetisi dengan partai besar yang sudah ada dan mengusahakan kebijakan yang berdasarkan dari harapan warga daerah. Gigih mempresentasikan kebijakan konkret mengenai permasalahan di daerah sekitar seperti masalah pendidikan, kesejahteraan, sampah, dan lain-lain. (<http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/236095/m0u/>)

Dalam perkembangannya, *Seikatsusha Network* sebagai partai politik lokal ini aktif mengurus urusan politik seperti mengirimkan anggotanya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan perwakilan rakyat (sebagian besar pada tingkat lokal), menyiapkan kampanye, mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik, mengadakan riset mengenai kebijakan-kebijakan yang sebaiknya diambil, dan sebagainya.

Seikatsusha Network memfokuskan diri untuk bergerak sebagai penghubung antara politik dan warga negara (*citizen*). Kebijakan yang dicanangkan *Seikatsusha Network* pun didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Dengan menggunakan politik sebagai alat, *Seikatsusha*

Network mencanangkan kebijakan yang sekiranya penting bagi warga negara dan membantu warga negara menemukan solusi dari masalah-masalah mereka (dikutip dari *newsletter* berjudul *Seikatsusha Network : Is a Political Network of Citizens*).

Beberapa *Seikatsusha Network* lokal umumnya berkumpul bersama dan berada di bawah payung organisasi *Seikatsusha Network* pada tingkat prefektur (LeBlanc, 1999 : 135). Sejauh ini, di Jepang sudah ada 8 *Seikatsusha Network* tingkat prefektur dan dua *Seikatsusha Network* tingkat kota (<http://www.local-party.net/>).

Dalam tingkat politik lokal, keterwakilan wanita di daerah metropolitan dan kota besar jauh lebih besar dibandingkan di prefektur maupun desa. Bisa dilihat dari data tahun 1999, dimana 19,7% dari dewan perwakilan *special wards* di pemerintahan Tokyo Metropolitan, dan 9,8% dari dewan perwakilan kota adalah wanita. Sementara itu, hanya 5,5% dari dewan perwakilan prefektur dan 4,2% dari dewan perwakilan di kota kecil dan desa yang merupakan politisi wanita (<http://www.unescap.org/huset/women/reports/japan.pdf>).

Karena itu tidak mengherankan bahwa salah satu induk *Seikatsusha Network* yang terbesar adalah *Tokyo Seikatsusha Network* yang membawahi 33 *Seikatsusha Network* lokal dan 1 *Seikatsusha Network* pusat. Keterlibatan ibu rumah tangga Jepang dalam *Tokyo Seikatsusha Network* inilah yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini.

Politik ibu rumah tangga Jepang ini cukup unik. Karena didasarkan atas insting mereka sebagai seorang ibu yang ingin melindungi keluarganya dari bahaya yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya makanan yang tidak sehat dan pencemaran lingkungan. Hal-hal inilah yang akan diteliti lebih jauh dan diharapkan dapat memberikan uraian yang jelas mengenai politik ibu rumah tangga Jepang dalam kasus *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai partai politik lokal.

2. Permasalahan

Wanita Jepang mengalami banyak rintangan untuk memasuki politik nasional, namun pada tingkat lokal/daerah, mereka merupakan kekuatan penting dalam memformasikan kebijakan. Salah satu sarana mereka untuk turut memformasikan kebijakan tersebut adalah dengan bergabung dalam salah satu

partai politik lokal bernama *Tokyo Seikatsusha Network*.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penelitian ini akan membahas dan menganalisa menggunakan teori feminisme liberal dan teori lokalisme mengenai bagaimana politik ibu rumah tangga Jepang dalam *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai partai politik lokal.

3. Tujuan Penelitian

1. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai politik ibu rumah tangga Jepang dalam *Tokyo Seikatsusha Network*.
2. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pengembangan studi kewilayahan, khususnya Kajian Wilayah Jepang.

4. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan gambaran terhadap salah satu fenomena pemberdayaan wanita dalam politik di Jepang yaitu partisipasi politik ibu rumah tangga Jepang dalam *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai partai politik lokal. Selain itu, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

5. Ruang Lingkup

5.1 Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian dibatasi pada ibu rumah tangga Jepang yang bergabung dalam *Tokyo Seikatsusha Network*.

5.2 Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Organisasi *Seikatsusha Network* yang diteliti dalam penelitian ini adalah organisasi *Seikatsusha Network* yang berkedudukan di Tokyo.

6. Kerangka Teori

6.1 Teori Feminisme Liberal

Feminisme liberal sering juga disebut sebagai feminisme moderat. Feminisme tipe ini berkonsentrasi pada lobi pemerintah demi reformasi pro perempuan dan berusaha mempengaruhi para pengambil kebijakan (Watkins,

2007 : 121). Para feminis liberal menginginkan akses terhadap kesempatan-kesempatan yang sama dengan pria. Kesetaraan dengan pria di sektor publik adalah inti dari feminisme liberal. Tidak mengagetkan bahwa paham ini lebih menekankan reformasi masyarakat daripada perubahan revolusioner karena para feminis liberal tidak menganggap perkara perbedaan jenis kelamin ini sebagai perang terhadap pria (Beasley, 1999 : 52).

Hal ini jelas berbeda dengan paham feminis sayap kiri yaitu feminisme radikal. Paham feminisme radikal merasa bahwa setiap pria bertanggungjawab dan mengambil keuntungan dari supremasi pria dan eksploitasi wanita. Pokok permasalahan dari semua permasalahan adalah patriarki, yaitu seluruh sistem kekuasaan laki-laki atas perempuan. Penguasa, tatanan militer, industri, politik, agama, serikat-serikat buruh, dan kelompok kiri yang didominasi laki-laki semuanya merupakan bagian dari patriarki. Perempuan adalah satu kelas, dan laki-laki adalah kelas yang lain (Watkins, 2007 : 120)

Feminis liberal berfokus pada perubahan yang konkrit dan pragmatis pada tingkat kelembagaan dan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan lebih banyak perempuan secara menyeluruh ke dalam struktur kekuasaan dan untuk memberi perempuan akses pada posisi-posisi yang secara tradisional didominasi pria. Sembari mengusahakan kesetaraan (dapat dilihat pada langkah-langkah seperti berjuang untuk jumlah perempuan dan laki-laki yang sama dalam posisi kekuasaan), kelompok-kelompok feminis liberal tetap mendukung undang-undang perlindungan seperti manfaat tempat kerja khusus untuk ibu (<http://www.britannica.com/women/article-216011>).

Feminisme Liberal berdasarkan pada keyakinan yaitu :

1. Semua manusia mempunyai ciri esensial tertentu (kapasitas sebagai agen moral dan nalar dan aktualisasi diri).
2. Pelaksanaan kapasitas ini dapat dijamin melalui pengakuan legal atas hak-hak universal.
3. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan adalah diciptakan secara sosial, dan
4. Perubahan sosial untuk kesetaraan dapat dicapai dengan mengajak publik yang rasional dan dengan menggunakan negara (Ritzer, 2003: 421)

Universitas Indonesia

Teori feminisme liberal ini selanjutnya akan dikaitkan dengan partisipasi politik ibu rumah tangga Jepang dalam *Tokyo Seikatsusha Network* yang moderat dan konsisten dalam mengusahakan perubahan undang-undang ke arah yang lebih baik, terutama yang berkaitan dengan insting mereka sebagai ibu, yaitu seperti tempat hidup yang damai, makanan yang sehat dan lingkungan yang lestari. Dalam mengusahakan hal ini, mereka berusaha untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan sehingga pada akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan.

6.2 Teori Lokalisme

Lokalisme (*localism*) bisa didefinisikan sebagai pandangan yang melihat bahwa kebijakan lebih baik dijalankan pada tingkatan yang terdekat dengan orang-orang yang terkena dampaknya (Hutchcroft, 2001 dalam Parkinson, 2007 : 23). Dengan kata lain, lokalisme adalah sebuah filosofi politik yang mengutamakan politik lokal. Kamus *The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition* juga menyebutkan bahwa lokalisme adalah *devotion to local interests and customs* (pengabdian kepada kebiasaan dan kepentingan lokal).

Dalam situs wordiq.com, Lokalisme umumnya menggambarkan tindakan sosial atau kecenderungan yang menekankan atau menghargai fenomena yang terjadi pada tingkat lokal dan pada skala kecil. Lokalisme sering dikontraskan dengan globalisme, walaupun keduanya lebih baik dilihat sebagai sesuatu yang saling melengkapi, bukan bertentangan.

Lokalisme sering kali disamakan dengan lokalisasi. Namun tentu saja kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda. Fokus utama lokalisme adalah pemerintahan, sedangkan lokalisasi adalah istilah yang jauh lebih luas cakupannya dan umumnya mengacu pada penyesuaian fokus ekonomi dari global ke lokal. Jika lebih dirinci lagi, lokalisme berfokus pada struktur politik, delegasi tugas dalam pemerintahan, aplikasi tambahan untuk memajukan demokrasi sedangkan lokalisasi berfokus pada pemantapan ekonomi (makanan, energi, manufaktur, dan sebagainya) di tingkat daerah/lokal (<http://www.transitionnetwork.org>).

David Boyle, seorang kolumnis lokalisme di majalah *Town and Country Planning* merangkaikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam lokalisme, yaitu :

Universitas Indonesia

- a. Bagaimana untuk memberikan kekuatan dan inisiatif kepada garda depan staf pelayanan umum.
- b. Bagaimana untuk memberikan tanggung jawab lebih pada pengguna jasa, untuk membantu mewujudkan perubahan di masyarakat
- c. Bagaimana membuat pelayanan umum lebih berskala kemanusiaan.
- d. Bagaimana untuk melokalisasi kekuatan ekonomi, sebagaimana layaknya kekuatan politik (<http://www.neweconomics.org/publications/localism>)

Alan Milburn, seorang anggota dari partai buruh di Inggris, pernah menyatakan keinginannya yang berkaitan dengan lokalisme dalam sebuah pidatonya yang berjudul *The Need For a New Settlement*: "Lokalisme dapat membuat pelayanan masyarakat lebih akuntabel, mengalihkan lebih banyak kekuasaan pada komunitas lokal, dan, dalam prosesnya, memajukan hubungan yang modern antara negara, warga negara, dan pelayanan (www.sochealth.co.uk/Labour/localismilburn.htm)

Teori lokalisme inilah yang selanjutnya akan penulis gunakan untuk mengkaji partisipasi politik ibu rumah tangga Jepang dalam *Tokyo Seikatsusha Network* yang berfokus pada pemberdayaan politik di tingkat lokal.

7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian teks karena menggunakan teks sebagai objek penelitian. Untuk memberikan tambahan informasi, penelitian ini juga dilengkapi dengan kuisisioner ataupun wawancara. Semua materi ini kemudian dianalisis untuk dapat mewujudkan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran kepada mahasiswa, peneliti, bahkan khalayak luas mengenai politik ibu rumah tangga Jepang dalam *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai partai politik lokal.

Untuk mengolah datanya, digunakan metode analisis interpretatif yaitu menafsirkan dengan melihat data-data. Data-data ini dilihat kemudian ditafsirkan sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

8. Kajian Literatur

Penelitian mengenai wanita Jepang sudah pernah dilakukan sebelumnya di kajian wilayah Jepang UI, salah satunya pada thesis yang ditulis Ike Iswary Lawanda yang berjudul *Wanita Jepang Jaman Meiji*, Program Pasca Sarjana Program Studi Kajian Wilayah Jepang tahun 1995.

Thesis ini berkesimpulan bahwa pembagian kerja berdasarkan gender masih kuat terasa dalam masyarakat Jepang yang patriarkhat. Akses wanita terhadap pekerjaan dengan posisi strategis masih sulit dijangkau. Walaupun bekerja, kebanyakan wanita hanya akan menjadi pekerja paruh waktu, mengerjakan tugas-tugas sederhana, dengan upah yang lebih rendah dibandingkan upah pria.

Penelitian lain mengenai wanita, terutama dalam kaitannya dengan partisipasi politik, penulis temui dalam sebuah jurnal internasional berjudul *Women in Politics in Japan* yang ditulis oleh Ranjana Sheel dalam *Economic and Political Weekly*, Vol. 38, No. 39 (Sep. 27 - Oct. 3, 2003), halaman 4097-4101 (stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4414071>).

Jurnal ini sendiri meneliti tentang perjuangan wanita Jepang demi mencapai kesetaraan dengan pria dalam bidang politik. Setelah pada tanggal 23 Juni 1999 hukum dasar tentang masyarakat dengan kesetaraan gender diberlakukan, jumlah wanita yang mencalonkan ataupun dicalonkan dalam pemilihan umum pun meningkat dengan perlahan. Hal ini mengindikasikan perkembangan partisipasi politik wanita Jepang.

Terakhir, penelitian mengenai *consumer group* di Jepang, sudah pernah ditulis dalam jurnal internasional berjudul *When Interests Are Not Preferences: The Cautionary Tale of Japanese Consumers* yang ditulis oleh Steven K. Vogel dalam *Comparative Politics*, Vol. 31, No. 2 (Jan, 1999), halaman 187-207 (stable URL: <http://www.jstor.org/stable/422144>).

Banyak grup konsumen di Jepang yang mengusahakan advokasi dalam bidang politik untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi dan pemasaran seperti bahan baku berharga murah, penyediaan makanan yang sehat, penambahan pilihan barang, dan sistem ekonomi yang lebih efisien. Namun, banyak analis politik yang memandang partisipasi politik ini sebagai partisipasi politik demi kepentingan kelompok tersebut saja. Grup konsumen di Jepang pun

masih harus berusaha keras untuk memperlihatkan pada politikus dan masyarakat bahwa apa yang mereka perjuangkan semata-mata untuk kepentingan semua orang.

9. Sistematika Penelitian

Dalam pemaparannya penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab dengan urutan sebagai berikut ini.

Bab I memaparkan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, kajian literatur, dan sistematika penulisan.

Bab II memaparkan politik ibu rumah tangga Jepang yang meliputi pengantar mengenai wanita dalam parlemen dan partai politik Jepang, terjunnya ibu rumah tangga Jepang ke dalam ranah politik, dan ibu rumah tangga Jepang dalam politik lokal.

Bab III membahas dan menganalisa politik ibu rumah tangga Jepang dalam *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai partai politik lokal. Dimulai dengan penjelasan mengenai Induk *Seikatsusha Network* yaitu *Seikatsu Kurabu*, *Seikatsusha Network*, dan kemudian lebih spesifik lagi menganalisa mengenai politik ibu rumah tangga Jepang dalam *Seikatsusha Network* yang berkedudukan di Tokyo yaitu *Tokyo Seikatsusha Network*. Terakhir, bab ini akan ditutup dengan studi kasus mengenai salah satu rencana kebijakan yang ditentang oleh *Tokyo Seikatsusha Network*.

Bab IV memuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.

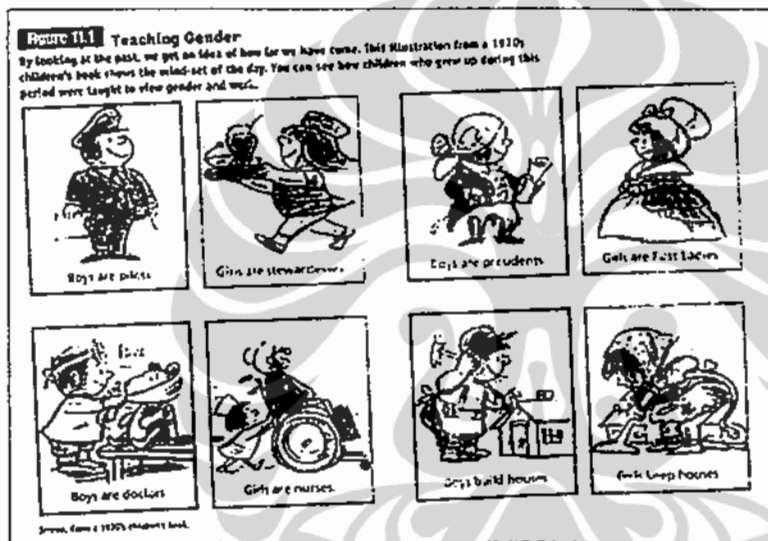


BAB II

POLITIK IBU RUMAH TANGGA JEPANG

2.1 Wanita dalam Politik di Dunia Internasional

Nilai konvensional mengenai hubungan gender dalam masyarakat sering kali menempatkan dunia pria berada dalam tempat kerja dan wanita berada di rumah. Kalaupun bekerja, wanita hanya akan menjadi inferior dari posisi pria yang superior. Selanjutnya, mari kita simak gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Ide Mengenai Pembagian Kerja Berdasarkan Gender
Sumber : Sociology : A Down to Earth Approach, 2008.

Gambar di atas adalah gambar yang diambil dari buku anak-anak tahun 1970-an yang beredar luas di masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana *mind-set* yang dibangun pada anak-anak yang membaca buku ini ; Ketika laki-laki menjadi pilot, perempuan menjadi pramugari. Ketika laki-laki menjadi presiden, perempuan menjadi ibu negara. Ketika laki-laki menjadi dokter, perempuan menjadi perawat. Ketika laki-laki membangun rumah, wanita mengurus rumah itu (membersihkan dan lain lain).

Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia spiritual pun laki-laki sering dianggap lebih superior dibanding wanita. Dalam berbagai buku agama dan karya seni seperti lukisan (contoh yang terkenal adalah lukisan berjudul *Creation* yang dilukis oleh Michelangelo), sering kali Tuhan digambarkan sebagai

pria, bukan wanita. Banyak pula kisah dalam berbagai agama yang mencantumkan bahwa pria diciptakan lebih dahulu oleh Tuhan, sementara wanita diciptakan kemudian dari tulang rusuk pria. Para penganut Yahudi ortodoks bahkan setiap harinya berterima kasih kepada Tuhan karena mereka tidak dilahirkan sebagai wanita (www.torah.org/learning/women/class31.html).

Semua itu adalah fakta-fakta yang sering kita temukan ketika mengkaji kedudukan wanita dan pria dari sisi spiritual. Lalu bagaimana jika ditinjau dari sisi kesetaraan pria dan wanita dalam bidang politik? Sudahkah hal ini terpenuhi?

Mantan perdana menteri India, Jawaharlal Nehru pernah berkata, "*You can tell the condition of the nation by looking at the status of its women*" (Kita bisa melihat kondisi suatu bangsa dengan melihat status kaum wanitanya). Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan bagaimana keadaan politik wanita di dua negara di dunia yang dikenal dengan perjuangan kaum wanitanya untuk meraih posisi yang setara dengan pria dalam bidang politik, yaitu Swedia dan Amerika Serikat.

Perjuangan keterwakilan wanita dalam parlemen di Swedia telah berlangsung cukup lama. Pada tahun 1884 telah muncul gerakan untuk menuntut kesetaraan pria dan wanita di politik (<http://www.db-decision.de/CoRe/Sweden.htm>). Pelopor pejuang hak politik kaum wanita Swedia ternyata justru seorang pria bernama Fredrik Borg. Borg adalah anggota parlemen pertama yang memperkenalkan undang-undang mengenai hak suara wanita, yaitu dalam undang-undang No. 49 tahun 1884 (<http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/biografier/borg.xml>).

Usulan Fredrik tersebut ditentang keras pada sidang pertama, namun akhirnya disetujui pada sidang kedua. Hak pilih akhirnya diberikan kepada perempuan-perempuan yang berpenghasilan dan membayar pajak tinggi (sejumlah lima persen dari jumlah rakyat Swedia). Antara tahun 1914-1917, diskusi mengenai perempuan di parlemen kembali dibuka. Pada tanggal 24 Mei 1919, akhirnya parlemen Swedia memutuskan untuk memberikan hak pilih bagi perempuan dan memberi kursi di parlemen (Hansson, 2004 : 17).

Pada tahun 1970, kuota perempuan dalam parlemen Swedia adalah 10%. Namun pada perkembangannya, pada Pemilu 1988, 131 orang dari 349 anggota parlemen Swedia adalah perempuan (38%). Data terakhir, berdasarkan

Inter-Parliamentary Union pada tahun 2010, angka tersebut naik menjadi 45%, peringkat kedua di dunia setelah Rwanda. Hampir 50% menteri di Swedia adalah wanita. Bahkan, posisi Menteri Pertahanan pun pernah dijabat wanita, Leni Björklund, yang bertugas dari tahun 2002 hingga 2006.

Sementara itu, Di Amerika Serikat, yang kehidupan demokrasinya sering dianggap paling maju, kiprah karir wanita sebagai pemimpin yang kompeten dalam dunia politik juga belum terlalu lama. Di Amerika Serikat, baru 144 tahun setelah merdeka, yaitu pada tahun 1920, hak pilih wanita diakui dalam Amandemen XIX.

Menurut website <http://www.livescience.com> pada bulan Juni 2010, sejauh ini hanya ada beberapa gubernur wanita di Amerika Serikat, yaitu Jennifer Granholm, Linda Lingle, Beverly Perdue, Jan Brewer, M. Jodi Rell dan Christine Gregoire. Lebih lanjut lagi, menurut CAWP (*Center for American Women and Politics*) 27 negara bagian di negara ini tidak pernah memiliki gubernur wanita dan belum pernah ada wanita yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

Di Majelis rendah, dari jumlah total 435 kursi, hanya 73 kursi yang diduduki oleh dewan perwakilan wanita. Sementara itu, di Senat, dari jumlah total 98 kursi, hanya 15 yang diduduki wanita. Hal tersebut membuat Amerika Serikat memiliki persentase jumlah wanita di parlemen yang lebih rendah dibandingkan 72 negara lain di dunia.

Tingginya angka pencalonan kembali pada pejabat tinggi pemerintahan di Amerika Serikat, dianggap turut berperan serta dalam kurangnya jumlah wanita dalam posisi-posisi tersebut. Karena terbukti, dalam pemilihan tanpa pencalonan kembali, ketika kedua kandidat adalah kandidat baru, jumlah wanita yang memenangkan pemilihan cukup setara dengan pria.

Terakhir, membicarakan kandidat wanita dalam dunia politik Amerika, tentu tidaklah lengkap tanpa menyinggung Hillary Clinton dan Sarah Palin. Hillary Clinton, adalah kandidat presiden wanita yang paling banyak mendapat dukungan sepanjang sejarah Amerika Serikat. Walaupun pada akhirnya dikalahkan oleh Barack Obama pada bulan November 2008, Hillary Clinton tidak ragu untuk kembali mencalonkan diri di pemilihan presiden selanjutnya, yaitu tahun 2012.

Senada dengan Hillary, Sarah Palin, mantan Gubernur Alaska yang merupakan kandidat wanita pertama yang dicalonkan Partai Republikan sebagai calon wakil presiden, mendampingi John McCain pada pemilihan presiden 2008, juga tidak ragu untuk mencalonkan dirinya pada pemilu presiden mendatang, tahun 2012. Menilik dari dua wanita tersebut, terlihat sudah ada perubahan besar dalam kedudukan wanita di dunia politik Amerika Serikat. Dimana wanita-wanita tersebut memiliki kepercayaan diri untuk mencalonkan dirinya dalam meraih jabatan tertinggi di negara adikuasa ini. Walaupun demikian, tetap saja pencapaian saat ini belum bisa menjamin sepenuhnya bagaimana keadaan wanita dalam politik Amerika di masa mendatang.

2.2 Wanita dalam Parlemen Jepang

Tabel 2.1 Persentase Wanita dalam Parlemen di Negara-Negara Anggota G8

Peringkat (di dunia)	Negara	Majelis rendah/ Majelis tunggal				Majelis tinggi / Senat			
		Bulan pemilihan	Jumlah kursi	Wanita	%	Tgl pemilihan	Jumlah Kursi	Wanita	%
18	Jerman	9 2009	622	204	32.8%	-	69	15	21.7%
51	Kanada	10 2008	308	68	22.1%	-	93	32	34.4%
52	Inggris	5 2010	650	143	22%	-	733	147	20.1%
56	Italia	4 2008	630	134	21.3%	4 2008	322	59	18.3%
64	Prancis	6 2007	577	109	18.9%	9 2008	343	75	21.9%
73	Amerika Serikat	11 2008	435	73	16.8%	11 2008	98	15	15.3%
83	Rusia	12 2007	450	63	14%	-	169	8	4.7%
94	Jepang	8 2009	480	54	11.3%	7 2010	242	44	18.2%

Sumber : www.ipu.org (data per 30 September 2010)

Sejak *Basic Law for Gender-Equal Society* (undang-undang yang memuat prinsip-prinsip dasar berkenaan dengan pembentukan masyarakat berkesetaraan gender) ditetapkan pada bulan Juni tahun 1999, sudah banyak perubahan yang terjadi di Jepang, terutama menyangkut kesetaraan gender. Salah satunya adalah meningkatnya keterwakilan wanita Jepang dalam bidang politik. Namun tetap saja, sampai saat ini, persentase jumlah wanita dalam parlemen Jepang masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota G8 (singkatan dari *Group of Eight*, koalisi 8 negara maju di Dunia) lainnya, yaitu Jerman, Kanada, Inggris, Italia, Prancis, Amerika Serikat, dan Rusia.

Menurut data dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)* per 30 September 2010, dari 186 negara, jumlah wanita dalam parlemen Jepang hanya menduduki urutan 94 dunia dengan angka keterwakilan 11,3% di Majelis Rendah dan 18,2% di Majelis Tinggi. Bandingkan dengan Jerman yang menduduki peringkat 18 dengan angka keterwakilan di Majelis Rendah 32,8% dan di Majelis Tinggi 21,7%. Selanjutnya, dapat disimak tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Keterwakilan Wanita Jepang dalam Politik dan Pemerintahan

TAHUN	MAJELIS RENDAH (%)	MAJELIS TINGGI (%)	MENTERI (%)	ANGGOTA DEWAN PREFEKTUR (%)	GUBERNUR (%)
1999	5,0	17,1	4,8	5,5	0,0
2009 (Mei)	9,2	18,2	11,8	8,2	6,4

Sumber : *Index for the Follow-up of the Goal of 30% by 2020*

Data di atas memaparkan keterwakilan wanita Jepang dalam politik dan pemerintahan, kurun waktu 10 tahun terakhir. Ada beberapa hal penting yang perlu kita garisbawahi di sini. Pertama, terlihat adanya peningkatan pada keterwakilan wanita di semua bidang kepemimpinan politik yang disebutkan dalam tabel di atas. Dan kedua, Jepang mengalami lonjakan yang sangat signifikan dalam persentase jumlah gubernur wanita, dari tidak ada sama sekali menjadi 6,4% dari jumlah gubernur secara keseluruhan. Menilik dari informasi ini, apakah kiranya yang terjadi sehingga hal tersebut dimungkinkan?

Jepang adalah negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Kaisar sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Demokrasi dijalankan dengan mendistribusikan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pemerintahan. *Diet*, sebagai pengampu kekuasaan legislatif didefinisikan oleh konstitusi sebagai “organ tertinggi kekuasaan pemerintah”.

Diet terdiri dari dua kamar (sistem bikameral), yaitu Majelis Rendah (*House of Representatives* atau dalam Bahasa Jepang, *Shūgiin*) dan Majelis Tinggi (*House of Councillors*, atau dalam Bahasa Jepang, *Sangiin*). Majelis Rendah terdiri dari 480 anggota (www.shugiin.go.jp), yang memiliki masa kerja 4 tahun. Sedangkan Majelis Tinggi terdiri dari 252 anggota (www.sangiin.go.jp), yang memiliki masa kerja 6 tahun. Warga negara yang berusia di atas 25 tahun telah boleh menjadi kandidat untuk Majelis Rendah, sedangkan untuk Majelis Tinggi, minimal berusia 30 tahun (*State of Women in Urban Local Government Japan*, halaman 3).

Untuk pemilihan anggota Majelis Rendah, digunakan kombinasi dari sistem distrik tunggal (*single-seat constituency* atau *shōsenkyō-ku senkyō* dan sistem proporsional (*proportional representation system* atau *hires daihyō senkyō*). Dengan kombinasi kedua sistem ini, dari 480 anggota, 300 dipilih dari 300 buah distrik pemilihan kecil, dan 180 yang tersisa dipilih dari perwakilan proporsional dimana Jepang dibagi menjadi 11 blok pemilihan (jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-masing blok ini bervariasi antara 6 sampai 30 kursi, tergantung dari luasnya wilayah blok).

Sedangkan pada pemilihan anggota Majelis Tinggi, digunakan sistem konstituen lokal (*senkyō-ku senkyō*) berbasis propinsi untuk memilih 152 orang dari 252 orang anggotanya. Batas-batas konstituen ini adalah sama dengan batas-batas propinsi. Jumlah wakil tetap dalam setiap propinsi, ditetapkan dalam UU Pemilihan, yang pendistribusiannya disesuaikan dengan perimbangan jumlah penduduk (dari 2 kursi sampai 8 kursi). Sisa 100 kursi dari 252 anggota Majelis Tinggi, dipilih secara nasional berdasarkan sistem proporsional. (Surajaya, 2006 : 53).

Dalam memprakarsai usulan Undang-Undang, anggota Majelis Rendah dan anggota Majelis tinggi memiliki hak yang sama. Hal ini juga berlaku dalam kasus dimana usulan Undang-Undang tersebut dapat mempengaruhi anggaran. Ketika seorang anggota memprakarsai sebuah rancangan Undang-Undang, ia harus didukung oleh minimal 20 orang anggota Majelis Rendah dan minimal 10 orang Majelis Tinggi. Jika usulan Undang-Undang tersebut nantinya bisa mempengaruhi anggaran, minimal 50 orang anggota Majelis Rendah dan Minimal 20 orang anggota Majelis Tinggi harus mendukung usulan Undang-Undang tersebut (http://www.shugiin.go.jp/itdb_english.nsf/html/statics/guide/legislat.htm).

Usulan undang-undang yang disetujui oleh Majelis Rendah namun ditolak oleh Majelis Tinggi tetap bisa menjadi Undang-Undang jika disetujui untuk kedua kalinya oleh Majelis Rendah, dengan catatan dua-pertiga anggota dewan Majelis Rendah hadir pada saat tersebut. Ketentuan ini juga berlaku bila dalam 60 hari setelah usulan Undang-Undang disetujui oleh Majelis Rendah, Majelis Tinggi gagal untuk mengambil keputusan akhir (http://www.shugiin.go.jp/itdb_english.nsf/html/statics/guide/disagree.htm).

Dalam partisipasi politik Jepang, dikenal adanya “tiga pilar utama” yaitu “*Jiban*” (makna harfiah: tanah) yang berarti memproteksi basis dukungan, *Kanban* (makna harfiah: papan nama) artinya popularitas, dan *Kaban* (makna harfiah: tas) yang artinya dana kampanye yang besar. Melihat hal ini, tidaklah mengherankan jika banyak wanita yang duduk di kursi dewan perwakilan adalah *hereditary candidates* (kandidat keturunan) dari ayah, kakek, ataupun suami yang merupakan politikus berpengaruh (Mariko Mitsui dalam <http://www.dawncenter.or.jp>).

Dewasa ini, sudah banyak perubahan yang terjadi di Jepang. Perlahan tapi pasti, politik menjadi lebih terbuka terhadap kandidat wanita. Contohnya bisa dilihat pada data tahun 2010, dimana jumlah wanita di Majelis Tinggi sudah mencapai 18,2%. Bandingkan dengan data tahun 2004 dimana jumlah wanita di Majelis Tinggi hanya 13,6% (Gender Equality Japan 2007 hal. 18).

Tabel 2.3 Keterwakilan Wanita di Majelis Tinggi Jepang Tahun 2010

GRUP POLITIK DI MAJELIS TINGGI	JUMLAH TOTAL ANGGOTA DEWAN	JUMLAH ANGGOTA DEWAN WANITA
The Democratic Party dan The Shin-Ryokufukai	107	20
Liberal Democratic Party	83	14
New Komeito	19	3
Your Party	11	0
Japanese Communist Party	6	2
The Sunrise Party of Japan dan New Renaissance Party	5	1
Social Democratic Party	4	1
The People's New Party	3	1
Independen	4	2
Kursi Lowong	0	0
Total	242	44

Data tanggal 27 Oktober 2010.

Sumber : <http://www.sangiin.go.jp/eng/member/strength/index.htm>

Sedangkan, dapat disimak pada tabel berikutnya, pada Majelis Rendah, data terakhir pada tanggal 27 Oktober 2010 juga menunjukkan adanya penambahan. Jika pada tahun 2005, jumlah anggota wanita adalah 8.8%, kini jumlah itu bertambah menjadi 10.8%.

Total wanita yang berhasil duduk di Majelis Rendah adalah sebanyak 52 orang (jumlah terbesar, 39 orang dari *DPJ*). Ini merupakan jumlah wanita terbanyak di Majelis Rendah sepanjang sejarah Jepang (<http://www.tokyofoundation.org>). Memang, peran mereka dalam politik nasional masih kurang dibandingkan rekan-rekannya di negara Barat, namun tetap saja, hal ini merupakan angin segar bagi perkembangan keterwakilan wanita dalam politik Jepang.

Tabel 2.4 Keterwakilan Wanita di Majelis Rendah Jepang Tahun 2010

PARTAI / GRUP POLITIK	Jumlah Total Anggota Dewan	Jumlah Anggota Dewan Wanita
Democratic Party of Japan dan Club of Independents	307	39
Liberal Democratic Party	117	8
New Komeito	21	3
Japanese Communist Party	9	1
Social Democratic Party	6	1
Your Party	5	0
People's New Party-New Party Nippon	4	0
The Sunrise Party of Japan	3	0
Hiranuma Group	2	0
Independen	5	0
<i>INCUMBENT</i>	479	52
Kursi Lowong		1
Total		480

Sumber : <http://www.shugiin.go.jp/> (data tanggal 27 Oktober 2010)

2.3 Wanita dalam Partai-Partai Politik Jepang

Untuk meningkatkan partisipasi politik wanita, organisasi-organisasi wanita mulai melobi semua partai untuk menambah jumlah kandidat wanita. Bisa dilihat pada tabel berikut ini, data mengenai jumlah kandidat wanita dalam pemilihan umum tahun 2000

**Tabel 2.5 Kandidat Wanita Berdasarkan Partai Politik
(Pemilihan Umum tahun 2000)**

	Kandidat Wanita			Kandidat Wanita Terpilih		
	Jmlh wanita	Total Kandidat	Persentase	Jumlah wanita	Total kandidat	Persentase
<i>Liberal Democratic</i>	11	337	3.3	8	233	3.4
<i>Democratic</i>	26	262	9.9	6	127	4.7
<i>Komeito</i>	16	74	21.6	3	30	10.0
<i>Communist</i>	84	332	25.3	4	20	20.0
<i>New Conservative</i>	1	19	5.3	1	7	14.2
<i>Liberal</i>	7	75	9.3	1	22	4.5
<i>SDP</i>	22	76	28.9	10	19	52.6
<i>Reformer's</i>	0	4	0.0	0	0	0.0
<i>Mushozoku (calon independent)</i>	1	11	9.1	1	5	20.0
<i>Jiyuu Rengo (Liberal League)</i>	26	125	20.8	0	1	0.0
<i>Others</i>	3	9	33.3	0	0	0.0
<i>Non-party</i>	5	72	6.9	1	15	6.6
Total	202	1396	14.5	35	479	7.3

(Sumber data :Mitsui Mariko, <http://www.dawncenter.or.jp/> berdasarkan laporan berita Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, Yomiuri Shimbun 13-26 Juni 2000)

Dari data di atas, bisa dilihat persentase wanita dari berbagai partai di Jepang. Sebagai contoh pada *Liberal Democratic Party (LDP)*, dari total 337 orang kandidat, hanya 3.3% (11 orang) yang merupakan kandidat wanita. Dan kemudian, dari total 233 kandidat terpilih, hanya 3.4% (8 orang) yang merupakan kandidat wanita terpilih.

Banyak sedikitnya jumlah wanita yang menjadi kandidat dalam suatu partai, tentu tergantung dari kebijakan-kebijakan yang diusung partai tersebut dan cara partai tersebut dalam meningkatkan jumlah kandidat wanita. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan posisi kandidat wanita dalam beberapa partai berikut ini :

Partai pertama yang akan dibahas adalah *The Liberal Democratic Party (LDP)*. *LDP* adalah partai konservatif yang walaupun pamornya pernah meredup sejenak pada tahun 1990an, telah mendominasi kancah perpolitikan Jepang sejak awal tahun dibentuknya, yaitu pada tahun 1955. Partai ini mengalami kegagalan untuk meraih suara terbanyak pada tahun 2007, dan kehilangan mayoritasnya di majelis tinggi untuk yang pertama kalinya dalam sejarah, di mana *LDP* hanya meraih peringkat kedua dengan perolehan kursi sebanyak 83 (Peringkat pertama, yaitu *DPJ*, memperoleh 109 kursi).

Walaupun termasuk dalam partai besar, partai ini memiliki perwakilan wanita paling rendah di dewan perwakilan, bila dibandingkan dengan semua partai politik besar lain. Hal ini diduga karena *LDP* memiliki budaya politik yang tidak ramah terhadap wanita, dimana wanita dalam *LDP* dibuat segan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap seksisme yang ada dalam tubuh partai dan *diet* (Dalton, 2008).

Gagasan untuk meningkatkan jumlah kandidat wanita dianggap sebagai diskriminasi terhadap kandidat pria. Walaupun demikian, bahkan *LDP* pun akhirnya secara khusus memilih kandidat wanita ketika mereka menyadari, bahwa dalam kasus tertentu, kandidat wanita cenderung mendapat dukungan yang lebih kuat.

Seperti contohnya, pemilihan umum pada tahun 2000 untuk memilih Gubernur Prefektur Osaka, setelah gubernur sebelumnya, Isamu Yamada, dipaksa untuk mengundurkan diri oleh organisasi wanita. Isamu terbukti telah melakukan pelecehan seksual pada salah satu pekerja kampanyenya, seorang gadis berusia 21 tahun. Atas tindakan kriminal ini, Isamu pun dipenjara selama 18 bulan dan wajib membayar sejumlah besar uang (terbesar sepanjang sejarah kasus pelecehan seksual di Jepang, yaitu 11.235.000 Yen atau 107.000 Dolar Amerika -www.onlinewomeninpolitics.com-)

Fusae Ohta pun dicalonkan *LDP*, dan kemudian terpilih sebagai gubernur wanita pertama di Jepang pada bulan Februari tahun 2000, untuk daerah pilih Osaka. Dana kampanye Ohta didukung oleh *WIN WIN* (versi Jepang dari grup Amerika, *EMILY's List*), yaitu sebuah organisasi politik yang anggota-anggotanya menyeleksi kandidat wanita dari daftar rekomendasi organisasi, dan mendukung kandidat yang terpilih tersebut dengan mengkontribusikan 10.000 yen atau lebih. Fusae Ohta adalah kandidat pertama yang direkomendasikan oleh *WIN WIN* (<http://www009.upp.so-net.ne.jp/mariko-m/Advances-DAWN.htm>).

Kesuksesan Ohta dalam pemilihan lokal, diikuti oleh Yoshiko Shiotani, yang terpilih sebagai Gubernur Prefektur Kumamoto pada bulan April tahun 2000. Di samping dua gubernur wanita ini, terpilih juga 3 walikota wanita, 2 *town heads* wanita, dan 1 kepala desa wanita pada bulan April tahun yang sama (*White Paper on Gender Equality 2000*).

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai wanita dalam *The Social Democratic Party (SDP)*. *SDP* dibentuk pada tahun 1945, dan dulunya dikenal sebagai *Japanese Socialist Party (JSP)*. Merupakan partai oposisi terbesar di Jepang sampai tahun 1990. Setelah kekalahannya dalam pemilu tahun 1996, *SDP* kehilangan banyak anggotanya yang mulai berpindah ke *Democratic Party of Japan* pada tahun 1998. Setelah itu, pamor *SDP* terus menurun dalam kancah perpolitikan Jepang. Banyak yang menganggap bahwa hal ini disebabkan karena dukungannya yang berkelanjutan terhadap Korea Utara.

Semenjak pemilihan umum tahun 2000, 50% dari perwakilan *SDP* yang duduk di Majelis Rendah adalah wanita. Lebih jauh lagi, posisi ketua partai dan juga posisi penting lain dalam tubuh partai *SDP* juga dijalankan oleh wanita. Giatnya *SDP* dalam meningkatkan partisipasi politik wanita Jepang memang tidak bisa dilepaskan dari kuatnya kepemimpinan ketua partai *SDP* saat itu, Doi Takako, yang memimpin partai ini sampai tahun 2003.



Gb 2.2 Doi Takako

Sumber : www.commonswikimedia.org (diunduh tanggal 3 April 2010)

Doi pertama kali terpilih sebagai anggota Majelis Rendah pada tahun 1969 mewakili Distrik Hyogo. Pada pemilu tahun 1989, ia membuat gebrakan dengan memenangkan kursi di Majelis Tinggi secara signifikan. 22 orang kandidat perempuan berhasil menduduki kursi Majelis Tinggi. Hal ini sangat mengguncang Partai Liberal Demokrat yang telah mendominasi politik Jepang sejak 1955. Berita kemenangan ini pun dilansir berbagai media, dan disebut-sebut sebagai "*Madonna Boom*" yang merujuk pada wanita-wanita yang terjun ke dunia politik karena terinspirasi oleh Doi Takako.

Doi tidak hanya peduli pada nasib negara, namun juga aktif memperjuangkan hak kaum wanita. Contohnya, usahanya untuk merevisi hukum patrilineal di Jepang agar anak yang terlahir dari ibu orang Jepang dan ayah orang asing juga bisa memperoleh kewarganegaraan Jepang secara otomatis, seperti halnya anak yang terlahir dari ayah orang Jepang dan ibu orang asing.

Ia juga mendesak *Diet* untuk menandatangani *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Perjanjian ini diharapkan dapat menghapuskan segala bentuk diskriminasi wanita dan sekaligus mematahkan hukum yang mengagungkan dominasi pria.

Pada tahun 1993, setelah *LDP* kehilangan mayoritasnya di Majelis Rendah dan *SDPJ* (*Social Democratic Party of Japan* – sebutan *SDP* kala itu) bergabung dalam koalisi dengan tujuh partai lainnya, termasuk di dalamnya, *JNP* (*Japan New Party*). Pada saat itu, ketua *JNP*, Morihiro Hosokawa, akhirnya terpilih sebagai Perdana Menteri, sementara Doi menjadi wanita pertama yang menjadi Juru Bicara Majelis Rendah dari tahun 1993 hingga tahun 1996

(<http://www.britannica.com/women/article-9030808>). Bisa dibilang bahwa pencapaian Doi ini adalah sesuatu yang sangat fenomenal dan akan selalu tercatat dalam sejarah perpolitikan Jepang.

Menanggapi kesuksesannya, Doi mengutip salah satu puisi karya Yosana Akiko yang dulunya pernah diterbitkan dalam edisi pertama (tahun 1911) dari majalah feminis pertama di Jepang, *Blue Stocking*. Puisi tersebut berbunyi "Telah datang hari di mana gunung bergerak. Namun orang-orang tidak percaya apa yang kukatakan. Gunung itu hanya tidur sejenak. Dahulu, semua gunung bergerak dalam kilau api. Tapi orang-orang tidak harus percaya. Yang harus mereka percaya hanyalah ini. Bahwa semua wanita yang dulunya tidur telah terbangun. Dan mereka sedang bergerak."

Selanjutnya, melangkah ke pembahasan wanita dalam partai komunis, *The Japanese Communist Party (JCP)*. JCP dibentuk pada tahun 1922, merupakan salah satu partai komunis *non-ruling* (bukan partai yang berkuasa) terbesar di dunia. JCP memiliki 400.000 anggota, dan surat kabar sendiri (berjudul *Akahata* – bendera merah) yang dibaca kurang lebih 1,6 juta pembaca (dengan koresponden di 9 kota di dunia yaitu Beijing, Hanoi, New Delhi, Kairo, London, Paris, Berlin, Washington D.C, dan Meksiko).

JCP berkeyakinan teguh kepada ide bahwa Jepang, sebagaimana negara Asia lain, harus berhenti menekankan diplomasi yang berpusat pada Amerika Serikat dan negara-negara anggota G8 karena seharusnya diplomasi dipusatkan dengan sesama negara-negara Asia. Hal ini nantinya diharapkan dapat membangun "kebijakan luar negeri yang independen berdasarkan kepentingan rakyat Jepang" dan bukannya "mengikuti kebijakan kekuatan asing lain secara tidak kritis".

The Japanese Communist Party telah memiliki sejarah panjang dalam mendukung kandidat wanita, walaupun partai ini tidak mendukung pengimplementasian sistem kuota. Namun demikian, politisi wanita di partai ini memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kebijakan dan kepentingan partai dibandingkan mengatasi masalah wanita. Contohnya, politisi wanita *Communist Party* sering menolak untuk berpartisipasi pada koalisi anggota dewan wanita yang digagas oleh pemerintahan lokal.

Membahas wanita dalam politik Jepang kontemporer tentu tidak akan lepas dari membahas keterwakilan wanita dalam *DPJ* sebagai partai yang saat ini tengah berkuasa. *The Democratic Party of Japan (DPJ)* adalah partai yang terbentuk dari merger 4 partai kecil yang anti-*LDP*, pada bulan Januari tahun 1998. Setelah pemilihan tahun 2009, *DPJ* menjadi partai yang berkuasa dengan menumbangkan *LDP*, dan meraih suara terbanyak di Majelis Rendah serta Majelis Tinggi. Cukup kontras dengan *LDP*, yang sangat tergantung pada birokrasi dalam pembuatan kebijakan, *DPJ* adalah partai yang didominasi oleh profesional muda seperti pengacara, dokter, bankir, dan jurnalis yang mampu menarik kesimpulan dari banyak variasi pengalaman dalam memformulasikan proposal kebijakan. Partai ini menekankan pada percepatan reformasi yang *across-the-board* (berlaku untuk semua orang) dan penciptaan lingkungan sosial yang lebih adil serta terbuka.

Contoh keterwakilan wanita dalam *DPJ* bisa dilihat pada kabinet Hatoyama yang dibentuk pada September 2009. Pada periode ini, pemilih Jepang memiliki harapan yang lebih besar kepada wanita dibandingkan sebelumnya. Wanita diharapkan dapat membawa perubahan terhadap politik Jepang, terutama dengan advokasi kesetaraan gender (<http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=48629>). *DPJ* telah menganggarkan dana khusus untuk kandidat wanita. *DPJ* juga berjanji untuk merekrut lebih banyak lagi kandidat wanita untuk dewan lokal. Inisiatif ini sangat didukung oleh anggota wanita dari *DPJ*.



Gb 2.3 Keiko Chiba



Gb. 2.4 Mizuho Fukushima

Sumber : <http://www.japantimes.co.jp/cabinet/> (diunduh tanggal 28 Mei 2010)

Pada kabinet Hatoyama, dari total 13 menteri, terdapat dua menteri wanita yaitu Keiko Chiba (sebagai *justice minister* atau menteri peradilan) dan Mizuho Fukushima (sebagai *state minister in charge of consumer affairs and declining*

birthrate atau menteri negara yang bertugas mengurus masalah konsumen dan penurunan angka kelahiran) (sumber : http://www.japantimes.co.jp/cabinet/cabinet.html?formed=20090916_01&date=20100210). Keiko Chiba berasal dari partai *DPJ* sedangkan Mizuho Fukushima dari partai *SDP*.

2.4 Terjunnya Ibu Rumah Tangga Jepang ke dalam Ranah Politik

"If you can cook well, you will have a successful married life" That's the lesson one Japanese housewife is keen to impart at her private cooking school in Tokyo.

Terjemahan :

"Jika kau bisa memasak dengan baik, kau akan memiliki kehidupan rumah tangga yang sukses". Itulah pelajaran yang ingin sekali disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga Jepang dalam sekolah memasak swastanya yang berlokasi di Tokyo" (dikutip dari *How to be a good housewife in Japan*, CNNGo.com)

Di Jepang, umumnya peranan wanita yang dianggap paling dominan adalah sebagai ibu rumah tangga. Yang dimaksud dengan ibu rumah tangga di sini adalah : *"a woman reponsible for running her home, whether she performs the tasks herself or hires people to do them"* (wanita yang bertanggung jawab untuk mengurus rumahnya, entah ia mengerjakan sendiri ataupun mempekerjakan orang lain untuk melakukannya) (Lopata, 1971 :3 dalam Imamura, 1987 : 12).

Tapi selanjutnya, pengertian ini diperjelas lagi oleh Imamura dengan kalimat *"but only a women who had been married at least once are included in the category housewife"* (hanya wanita yang sudah pernah menikah paling tidak sekali, yang dimasukkan dalam kategori ibu rumah tangga) (Imamura, 1987 :12).

Pada akhir perang dunia II, wanita Jepang mulai mendapatkan peningkatan kesetaran dengan pria dalam bidang pendidikan, partisipasi politik, dan pekerjaan. Meskipun demikian, pola yang terbentuk adalah, begitu wanita menikah, kecuali yang bekerja di pertanian atau bisnis keluarga, sebagian besar dari mereka tidak menunjukkan penyesalan untuk melepaskan pekerjaan mereka demi menjadi ibu rumah tangga.

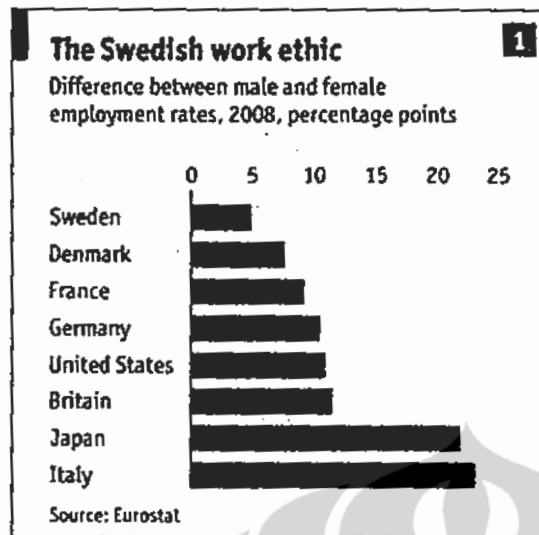
Pola yang paling populer adalah; membesarkan dua atau tiga orang anak, lalu ketika anak termuda telah masuk usia sekolah, ibu-ibu rumah tangga kembali memasuki dunia kerja dalam bentuk kerja paruh waktu untuk membantu pemasukan keluarga. Fakta mengenai betapa diterimanya pola ini menunjukkan betapa mengikatnya pembagian pekerjaan berdasarkan gender di Jepang (Fujimura-Fanselow, 1995 : 365).

Dalam *newsletter* berjudul *Japanese Women* (diterbitkan oleh *The Fusae Ichikawa Memorial Association*) edisi 96 tanggal 1 September 2006, dipaparkan hasil survei *The National Institute of Population and Social Security* mengenai keluarga. Hasil survei ini menunjukkan ibu rumah tangga rata-rata menghabiskan enam jam sehari untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Lebih dari 80% pekerjaan rumah tangga ditanggung oleh istri, bahkan istri-istri yang bekerja *full-time* tetap menanggung 68.7% pekerjaan rumah tangga.

Suami yang sama sekali tidak membagi pekerjaan rumah tangga dengan istrinya adalah sebesar 20.6%. Sedangkan yang sama sekali tidak berbagi tugas mengurus anak adalah sebesar 10%. 21.6% dari suami yang istrinya berusia 20 tahunan dan 25% dari suami yang istrinya berusia 30 tahunan, tiba di rumah lebih dari jam 10 malam.

Hasil survey tersebut menggambarkan bagaimana keadaan ibu rumah tangga Jepang dalam rumah tangga dimana suami tidak terlalu banyak membantu dalam urusan rumah tangga. Dalam hal ini, Ibu rumah tangga Jepang dapat dianggap sebagai bagian dari sistem yang diciptakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi pasca perang dunia II.

Ketika ekonomi yang kuat menuntut lebih banyak pekerja, Jepang mengambil strategi yang sama sekali berbeda dengan kebijakan yang diadopsi negara-negara Skandinavia. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2.1 Persentase Perbedaan Tingkat Ketenagakerjaan Pria dan Wanita
sumber : <http://www.womenscolleges.org/> (diunduh tgl 9 September 2010)

Bisa dilihat pada grafik di atas bahwa pada tahun 2008, persentase perbedaan tingkat ketenagakerjaan antara pria dan wanita di negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark adalah di bawah 10%, sedangkan di Jepang, angkanya masih menunjukkan di atas 20%. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Negara-negara Skandinavia menyikapi kurangnya tenaga kerja (sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi) dengan menyemangati wanita untuk terjun ke dunia kerja. Sedangkan di Jepang, sistem yang diciptakan adalah "memaksa" para pria untuk mengerjakan pekerjaan sebanyak dua kali lipat dengan cara membayar mereka dengan gaji yang besar, setara dengan gaji 2 orang. Sementara itu, untuk "memaksa" wanita menjadi ibu rumah tangga, pemerintah menyediakan banyak fasilitas seperti pengurangan pajak, *dependent allowances* (tunjangan sebagai orang yang ditanggung oleh suami) dan sebagainya (<http://www.yomiuri.co.jp/intview/0622dy20.htm>).

Pajak, uang pensiun, dan sistem kesejahteraan, semuanya dibuat dengan asumsi bahwa pria pergi bekerja dan wanita mengurus rumah tangga. Berkaitan dengan hal ini, banyak kritikus yang kemudian menyatakan bahwa menurunnya angka kelahiran adalah bentuk *silent protest* oleh wanita Jepang yang menghadapi terlalu banyak tuntutan dan dukungan sosial yang kurang dalam membesarkan anak dan mengurus rumah tangga (<http://www.yomiuri.co.jp/intview/0622dy21.htm>).

Bagaimana wanita Jepang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai ibu rumah tangga pada periode pasca perang dunia II, juga bisa dilihat dari kemunculan Asosiasi Ibu Rumah Tangga (*shufuren*) pada tahun 1948, sebagai organisasi yang bergerak untuk mempromosikan gaya hidup yang stabil dari sudut pandang konsumen. Organisasi ini didirikan oleh Oku Mumeo, seorang *suffragist* (orang yang berjuang untuk memperluas cakupan orang-orang yang diberi hak pilih dalam politik) pra-perang dunia II.

Simbol *Shufuren*, yaitu sendok nasi, tidak hanya menempatkan posisi anggotanya sebagai ibu rumah tangga yang berkulat di dapur, namun juga menandai identitas nasional karena mengasosiasikan sendok nasi dengan makanan pokok bangsa Jepang; nasi putih. Sendok nasi merepresentasikan keahlian yang diperlukan dalam aktivitas komunal dan membangkitkan impian akan makanan yang berlimpah ruah (Mackie, 2003 : 123).

Dalam buku biografinya, *Fires Burning Brightly*, Mumeo menjelaskan betapa kurangnya reaksi wanita terhadap perjuangannya dalam mewujudkan pemberian hak pilih untuk wanita. Sejak saat itu, Ia menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh wanita untuk saat ini (kehancuran pasca perang dunia II) bukanlah ada atau tidaknya hak pilih, melainkan peningkatan kualitas hidup. Karena itulah Mumeo mendirikan *shufuren* (<http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=>). Slogan Mumeo yang terkenal saat itu adalah "ada hubungan langsung antara politik dan dapur". Slogan tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap urusan wanita biasa; keluarga, pendidikan anak, dan pekerjaan rumah tangga (<http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fb19990720a1.html>).

Pada tahun 1980-an, semakin banyak ibu rumah tangga yang membuka mata dan bergabung dalam beragam aktivitas di luar rumah. Salah satu petanda dari evolusi ini adalah kelahiran kolom yang berjudul "From *okusan* to *sotosan*" dalam majalah wanita berjudul *Wife*. Istilah "okusan", yang secara harfiah berarti orang yang tinggal di dalam, adalah istilah penghormatan yang dulunya ditujukan terhadap istri-istri kalangan menengah ke atas yang bisa menikmati kemewahan dengan tinggal di rumah. Pada periode pasca PD II, istilah ini menjadi bisa digunakan untuk merujuk semua ibu rumah tangga, sebagai alternatif istilah "shufu".

Sotosan, yang berarti "orang yang berada di luar" adalah *plesetan* dari kata *okusun*, dan diciptakan untuk menggambarkan ibu rumah tangga yang tak lagi hanya berada di rumah. Pada kolom ini ibu rumah tangga menceritakan berbagai pengalaman yang mereka alami saat beraktivitas di luar rumah (Fujimura-Fanselow, 1995 : 366). Pada tahun 1980an, memang terjadi perubahan orientasi besar-besaran pada ibu rumah tangga Jepang, dari hanya beraktivitas di rumah, beralih ke aktivitas di luar rumah seperti bekerja (terutama pada ibu rumah tangga berumur 40an, semakin banyak yang kembali memasuki dunia kerja, baik *full-time* ataupun paruh waktu) dan bergabung dengan gerakan-gerakan berbasis komunitas lokal.

Terjunnya ibu rumah tangga Jepang dalam kegiatan di luar rumah ini bisa dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Jepang yang cukup tinggi, yang menyebabkan banyak keluarga Jepang yang sudah mampu membeli *3C* yaitu *Car*, *Cooler*, *Colour TV* (mobil, pendingin ruangan, dan televisi berwarna) pada tahun 1980an. Selanjutnya, semakin sejahtera keadaan ekonomi, semakin canggih pula peralatan elektronik yang dimiliki. Mesin cuci, mesin penyedot debu, alat memasak yang canggih, banyak diburu warga Jepang dikala itu. Semuanya ini adalah alat-alat yang memudahkan pekerjaan ibu rumah tangga, dan pada akhirnya membuat mereka memiliki waktu luang untuk mengerjakan hal lain. Pada saat inilah, ibu rumah tangga Jepang bisa terjun sebagai tenaga kerja paruh waktu ataupun aktivis dalam komunitas.

Menurut Yoshio Sugimoto dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Japanese Society*, ada 4 tipe wanita Jepang yang sudah menikah berdasarkan relasi antara *capitalist order* (kebutuhan akan modal/uang) dan *patriarchal order* (kekuatan pria mengendalikan wanita di keluarga dan komunitas) :

Tabel 2.6 Empat Tipe Wanita Jepang yang Sudah Menikah

<i>Patriarchal order</i>	<i>Capitalist order</i>	
	Kuat	Lemah
Kuat	A. Pekerja paruh waktu	C. Ibu Rumah tangga
Lemah	B. Wanita Karier	D. Aktivis dalam Komunitas

Pada tipe A, kontrol pria terhadap wanita kuat, namun di sisi lain, ada kebutuhan akan adanya uang tambahan untuk membantu menyokong rumah tangga, karena itu wanita menikah tipe A memilih untuk menjadi pekerja paruh waktu.

Pada tipe B, Kontrol pria terhadap wanita lemah (dalam artian; tidak terlalu dominan dalam mengendalikan), dan adanya kebutuhan yang kuat akan modal/uang, sehingga wanita menikah tipe B memilih menjadi wanita karier.

Pada tipe C, Kontrol pria terhadap wanita kuat, sedang kebutuhan akan modal/uang lemah (bisa jadi dikarenakan penghasilan suami yang cukup besar, sehingga sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga), karena itu wanita menikah tipe C memilih menjadi ibu rumah tangga.

Pada tipe D, Kontrol pria terhadap wanita lemah (dalam artian, tidak terlalu dominan dalam mengendalikan), sedangkan kebutuhan akan modal/uang lemah (bisa jadi dikarenakan penghasilan suami yang cukup besar, sehingga sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga), hal ini membuat wanita tipe D memilih untuk menjadi aktivis dalam komunitas.

Selanjutnya, wanita tipe D inilah yang akan dibahas lebih dalam.

Sebagian besar ibu rumah tangga yang menjadi aktivis dalam komunitas adalah wanita berpendidikan tinggi (lulusan akademi atau universitas) termasuk dalam kelas ekonomi menengah, tidak bekerja, dan berusia paruh baya (Yazawa : 1992 dalam Gelb : 1998). Pada umumnya ekonomi mereka disokong oleh suami yang memiliki penghasilan tinggi, namun di saat bersamaan mereka sering kali menyesal berhenti bekerja yang dikarenakan pernikahan ataupun melahirkan anak, dan mereka mencari aktivitas untuk mengembalikan penghormatan mereka terhadap diri sendiri (Iwao, 1993 : 243).

Gerakan sosial memberi ruang pada mereka dimana mereka dapat memperoleh status individual yang berbeda dari peranan mereka sehari-hari sebagai istri ataupun ibu. Kepuasan yang mereka dapatkan dari aktivitas kolektif merupakan imbalan dari kerja mereka yang tanpa bayaran. Ibu-ibu rumah tangga ini merasa pengalaman berkampanye sebagai sesuatu yang menyenangkan karena “menyerupai lingkaran sosial dalam tahun-tahun kuliah mereka, dan lebih menyenangkan dibandingkan mengerjakan pekerjaan rumah tangga” (Eto, Mikiko

dalam www.allacademic.com).

Partisipasi ibu rumah tangga Jepang dalam gerakan-gerakan di komunitas ini mencoba membuat politik menjadi sesuatu yang lebih responsif terhadap kepentingan warga sipil. Karena ibu rumah tangga umumnya bertanggung-jawab terhadap belanja bulanan, menyiapkan makanan, dan menjaga kesehatan keluarga, politik mereka pun menjadi berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Welch dan Hibbing (1992) yang mengemukakan bahwa wanita dan pria menunjukkan sikap dan cara yang berbeda dalam mengaplikasikan persepsi mereka sebagai dasar pengambilan kebijakan (Pharr:1998). Banyak ahli lain merumuskan bahwa wanita cenderung terfokus pada permasalahan yang "lembut", "menimbulkan rasa iba", berbau "pengasuhan" dan "perlindungan", sementara pria terfokus pada hal-hal yang lebih "keras" seperti anggaran pertahanan negara (Carnaghan & Bahry :1990 dalam Pharr: 1998). Pada hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai tradisional melibatkan rumah dan komunitas, wanita juga dinilai sedikit lebih suportif dibanding pria (Page & Shapiro, 1992 dalam Pharr, Susan J : 1998).

Yoko Sato dalam tulisannya yang berjudul "*From the Home to the Political Arena*" menyebutkan tiga isu yang menjadi tren dalam kebijakan yang dicanangkan politisi wanita Jepang, yaitu :

1. Yang berkaitan dengan lingkungan, seperti kampanye deterjen ramah lingkungan, daur ulang sampah, penyediaan air bersih, dan lain lain.
2. Yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dan manula seperti pengembangan taman bermain anak, perawatan manula, dan lain lain.
3. Yang berkaitan dengan budaya, seperti pengajuan pembangunan perpustakaan, pengajuan pembangunan pusat kajian wanita, dan sebagainya (Fujimura-Fanselow, 1995 : 367).

Garis besar pemikiran ibu-ibu rumah tangga Jepang yang bergabung dalam komunitas dan politik lokal ini juga bisa kita tinjau dari slogan yang mereka usung di Kongres Ibu pertama di Jepang (1955), yang berbunyi "*It is the earnest desire of all mothers that the life they have created be nurtured and protected.*" (Yamamoto, 2004 : 168 dalam <http://femjapan.pbworks.com/Housewife-Movement>) yang berarti, "Merupakan keinginan sungguh-sungguh dari semua ibu bahwa hidup yang

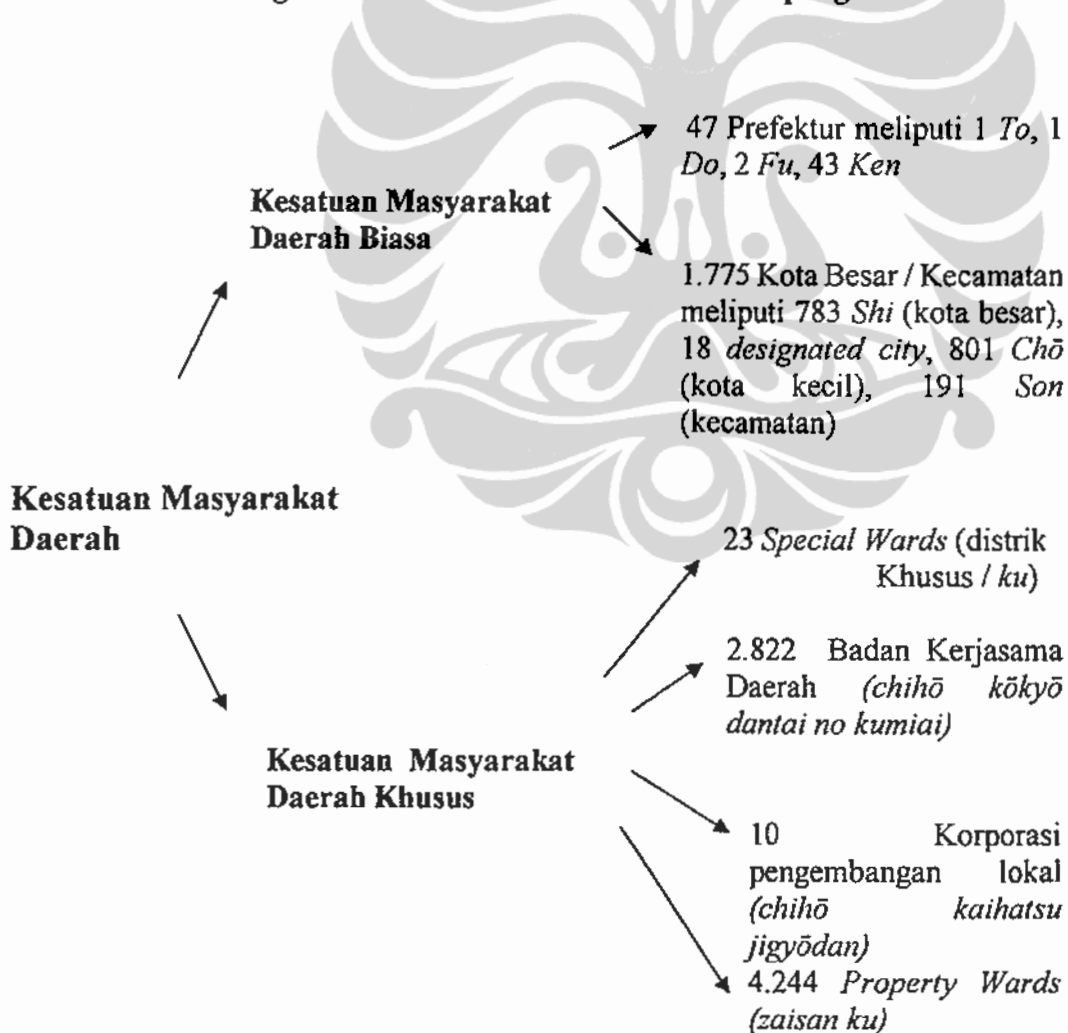
telah mereka ciptakan terawat dan terlindungi”.

Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa gerakan ibu rumah tangga Jepang ini pada intinya adalah berdasarkan naluri alamiah mereka sebagai seorang ibu yang ingin melindungi keluarganya. Suatu aspek yang sesungguhnya sangat kontras bila dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara barat yang menganggap bahwa konsep keibuan tidak sesuai dengan emansipasi wanita (Koven and Michel, 1993: 3 dalam Eto, Mikiko www.allacademic.com).

2.5 Ibu Rumah Tangga Jepang dalam Politik Lokal

Hukum otonomi lokal membagi Jepang ke dalam bagian-bagian seperti berikut ini :

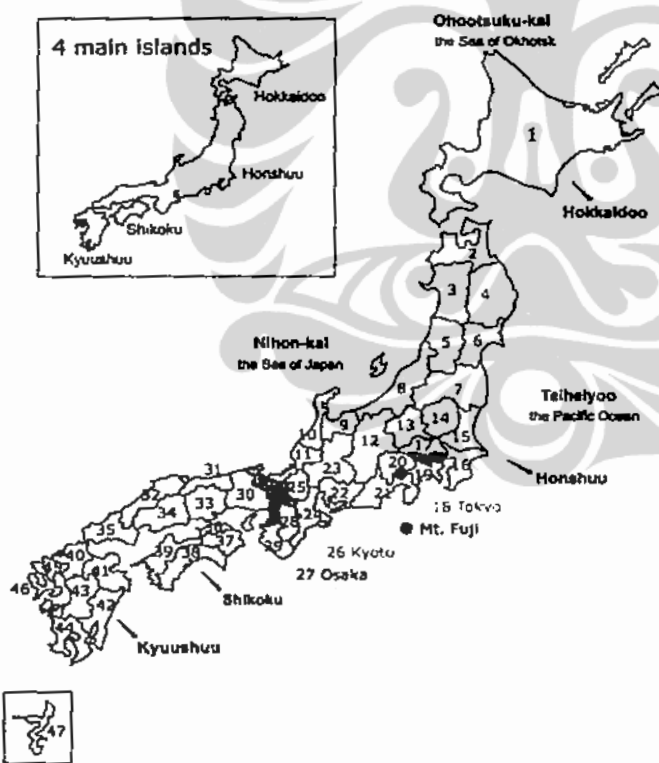
Diagram 2.1 Jenis Pemerintah Daerah Jepang



Sumber : Nobutaka, 1997 :3 dan <http://web-japan.org> (data tanggal 1 Juni 2009)

Ada dua prinsip dalam otonomi daerah di Jepang, Pertama, menyelenggarakan pemerintahan lokal, yang pada tingkatan tertentu, mandiri dari pemerintah pusat. Kedua, menekankan ide “*citizen's self government*” atau pemerintahan yang dijalankan oleh warga negara sendiri, di mana penduduk setempat diharapkan turut berpartisipasi untuk membangun daerah. Setelah perang dunia II, ide “*citizen's self government*” ini pun semakin berkembang luas.

Sebagaimana diterangkan dalam *Local Autonomy Law*, prefektur dipimpin oleh gubernur, sedangkan *shi*, *chō*, dan *son* (kota kabupaten, kota kecamatan dan desa) masing-masing dipimpin oleh *mayor* (setingkat walikota). Gubernur dan walikota dipilih secara langsung oleh warga setempat. Hal ini berbanding terbalik dengan pemilihan perdana menteri yang tidak dipilih secara langsung oleh warga negara melainkan berdasarkan pemungutan suara di *Diet*.



Gb. 2.4 Prefektur di Jepang

Sumber : www.tokyo-smart.com (diunduh tanggal 11 April 2010)

Dewasa ini, kedudukan otonomi daerah di Jepang sangat kuat, karena keberadaannya secara langsung ditentukan oleh undang-undang. Meskipun demikian, secara politik pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap

keputusan-keputusan politik pemerintah daerah.

Berdasarkan UU otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang penuh (*general competence power*). Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang penting, tanpa mempertimbangkan undang-undang, apabila dirasakan penting untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Wewenang otonomi daerah seperti ini diambil dari sistem otonomi daerah di Eropa daratan yang diterapkan sebelum Perang Dunia II (Kubota : 2001 dalam Surajaya : 2006).

Jumlah anggota dewan perwakilan daerah bervariasi tergantung dari jumlah populasinya. Untuk tingkat prefektur, jumlah kursi paling banyak adalah di dewan perwakilan Tokyo Metropolitan (127 kursi) dan yang paling sedikit adalah di dewan perwakilan prefektur Shimane (38 kursi). Sedangkan untuk tingkat daerah tingkat II (*Shi-Chō-Son*), jumlah kursi paling banyak adalah di Kota Yokohama (92 kursi) dan paling sedikit di Desa Toshima (6 kursi).

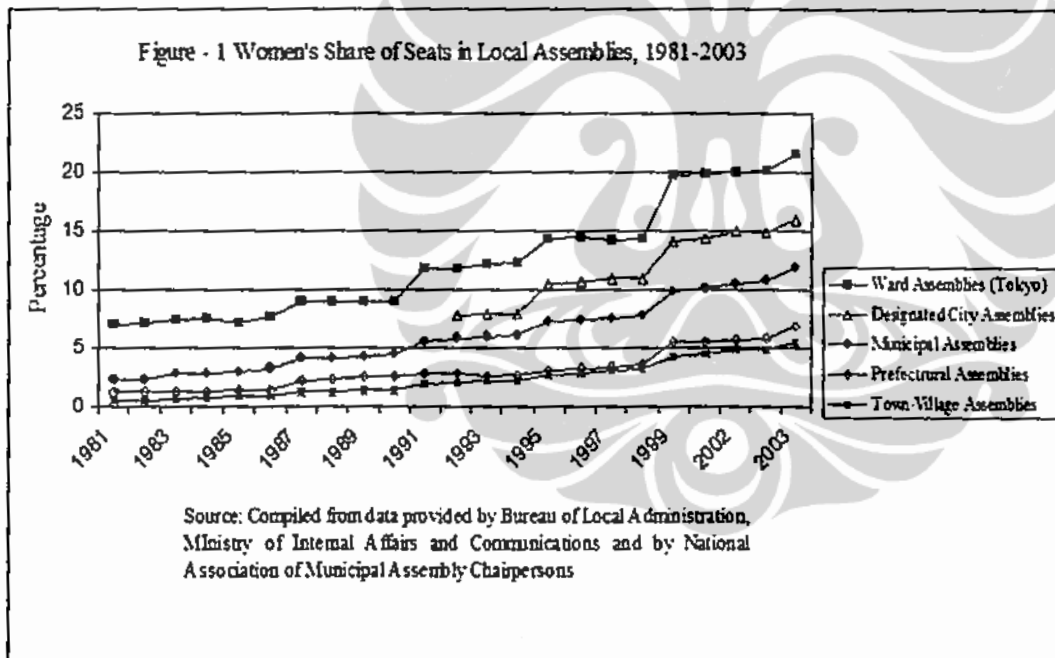
Anggota dewan perwakilan daerah memiliki masa jabatan selama 4 tahun. Dewan perwakilan daerah sendiri terdiri dari ketua, wakil ketua, komite, dan komite khusus. Kewenangan anggota dewan perwakilan daerah adalah membuat undang-undang, menyetujui anggaran, meninjau kembali laporan-laporan, dan mengemukakan mosi tidak percaya terhadap pejabat eksekutif. (*Ministry of Internal Affairs and Communications Japan dalam Local Autonomy in Japan : Current Situation and Future Shape 2009*).

Tidak ada undang-undang khusus yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi wanita di pemerintahan daerah di Jepang, walaupun pasal kelima dari *the Basic Law for a Gender-Equal Society* menekankan pentingnya partisipasi wanita dalam proses pembuatan keputusan.

Dalam tingkat politik lokal, keterwakilan wanita di daerah metropolitan dan kota besar jauh lebih besar dibandingkan di prefektur maupun desa. Bisa dilihat dari data tahun 1999, dimana 19,7% dari dewan perwakilan *special wards* di pemerintahan Tokyo Metropolitan, dan 9,8% dari dewan perwakilan kota adalah wanita. Sementara itu, hanya 5,5% dari dewan perwakilan prefektur dan 4,2% dari dewan perwakilan di kota kecil dan desa yang merupakan politisi wanita (<http://www.unescap.org/huset/women/reports/japan.pdf>).

Pada bulan Maret tahun 2000, *the National Personnel Authority* mengadakan seminar yang menyemangati mahasiswi untuk melamar pada posisi pejabat pemerintah di tingkat nasional. *The National Personnel Authority* juga menghimbau menteri wanita untuk merekrut dan mempromosikan lebih banyak lagi wanita. Usaha serupa untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam bidang politik juga diusahakan oleh beberapa pemerintahan lokal. Namun demikian sebagian besar pemerintahan lokal tidak mengambil aksi untuk merekrut pegawai negeri sipil wanita. Hal ini mungkin dikarenakan oleh kepuasan mereka, mengingat rasio *female civil servants* yang direkrut di tingkat lokal sudah lebih banyak dari yang direkrut di tingkat nasional.

Grafik 2.2 Wanita dalam Dewan Perwakilan Lokal 1981-2003



Sumber : <http://www.japanfocus.org/-Yasuo-TAKAO/2647> (diunduh tgl 4 Oktober 2010)

Bisa dilihat pada grafik di atas, betapa meningkatnya jumlah wanita dalam dewan perwakilan tingkat lokal di Jepang dari tahun 1981-2003. Peningkatan ini tidak hanya terjadi di tingkat *ward*, melainkan juga di *designated city*, kota madya, prefektur, kota kecil, dan desa. Hal ini menunjukkan kemajuan pesat yang diraih dewan perwakilan wanita.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tokuko Ogai pada tahun 2003, mayoritas kandidat wanita di pemilihan lokal umumnya berasal dari tiga grup besar yaitu :

1. Partisipan dari program pelatihan politik yang bernama *Back-up Schools*. *Back-up school* didirikan di Osaka oleh dua orang wanita yang berpartisipasi dalam *Fourth World Conference on Women* yang diadakan di Beijing pada tahun 1995. Banyak lulusan program pelatihan politik ini yang sukses dalam pemilihan di tingkat lokal. Kesuksesan mereka ini banyak diliput oleh media massa. Semenjak itu, hampir 20 prototipe program ini didirikan di seantero Jepang. Baik *DPJ* maupun *SDP* juga menyediakan program pelatihan politik sejenis ini, yang berfokus kepada anggota wanita yang ingin mencalonkan diri pada pemilihan selanjutnya.
2. Partisipan dari program pemerintah lokal untuk meningkatkan keterlibatan wanita dalam politik, yang disebut dengan *SWA (Simulation Women's Assembly)*. *SWA* atau disebut juga *josei kaigi*, didesain untuk mempromosikan partisipasi dalam pembuatan keputusan di tingkat pemerintahan lokal dan mengirim lebih banyak wanita ke dewan perwakilan. Pada tahun 1996, hanya 10 pemerintah lokal yang memiliki *josei kaigi*. Jumlah ini meningkat menjadi 48 di tahun 1999 dan 116 di tahun 2002 (http://www.old.japanfocus.org/_Yasuo_TAKAO-Women_in_Japanese_Local_Politics__From_Voters_to_Activists_to_Politicians).
3. Anggota grup politik *Seikatsusha Network* (berasal dari *consumer group, Seikatsu Kurabu*), yang kebanyakan anggotanya adalah istri dan ibu yang peduli dengan masalah yang menyangkut kualitas kehidupan sehari-hari (Ogai, 2004 : 58-59).

Adanya *consumer representatives* (perwakilan konsumen) memang merupakan suatu bentuk yang unik dari pemerintahan lokal Jepang. Pada akhir tahun 1970an, beberapa *NGO* dengan sukses dilobi untuk mengikutsertakan wakil dari grup konsumen untuk diikuti-sertakan dalam pemerintahan lokal di metropolitan. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan tempat bagi suara dan sudut pandang dari masyarakat awam, seperti yang diutarakan oleh Perdana Menteri Jepang kala itu, Hosokawa Morihiro, pada pidato kepada Diet tanggal 23 Agustus 1993 berikut ini (dikutip dari Maclachlan, 1997 : 113) :

"Our country should seriously consider the fact that by prioritizing economic development, it has recorded sufficient attention to such essential goals as the improvement of livelihood of our individual citizens, the wealth of human spirit and social justice... In responds to demands for a more affluent lifestyle environment, I think it is necessary to thoroughly rethink our programs and policies concerning consumers"

Terjemahan :

"Negara kita harus mempertimbangkan dengan serius mengenai fakta bahwa dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi, telah tercatat perhatian yang cukup besar terhadap tujuan-tujuan penting seperti peningkatan kualitas hidup warga negara, semangat kemakmuran dan keadilan sosial.. Sebagai tanggapan dari permintaan akan lingkungan hidup yang lebih makmur, saya pikir penting untuk memikirkan kembali program dan kebijakan kita dengan mempertimbangkan konsumen."

Tahun 1993 bisa disebut sebagai tahun bersejarah gerakan pro-konsumen di Jepang. Dilantiknya Perdana Menteri Hozokawa dengan kebijakannya yang pro-konsumen mengawali langkah yang menjanjikan bagi kesejahteraan konsumen, setelah selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya kebijakan dianggap lebih memprioritaskan produsen. Di tahun ini juga diperingati 20 tahun berlakunya *Consumer Protection Basic Law (Shouhisha Hougo Kihonhou)*, sebuah konstitusi mengenai perlindungan konsumen di Jepang dan katalis di balik sistem kebijakan perlindungan konsumen yang komprehensif (Maclachlan, 1997 : 113).

Karena mayoritas anggota *consumer cooperatives* adalah ibu rumah tangga, mayoritas perwakilannya ke politik pun adalah ibu rumah tangga. Ibu-ibu inilah yang membawa isu-isu lingkungan, isu konsumen, pendidikan, dan kesejahteraan

sosial ke dewan perwakilan lokal. Gerakan ini mengalami dua hambatan. Pertama, mereka umumnya tidak memiliki pengalaman dalam bidang politik, dan kedua, perwakilan mereka hanya diperbolehkan bertugas maksimal selama tiga masa jabatan (peraturan dari grup mereka sendiri, dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada yang lain) yang menyebabkan orang yang berkompeten tidak bisa menjabat lebih lama dari tiga masa jabatan.

Namun, selain hambatan-hambatan tersebut, ada juga beberapa poin plus yang dimiliki Ibu rumah tangga dalam politik lokal ini. Dengan membawa proses pembuatan kebijakan lebih dekat ke masyarakat dan dengan membuat kebijakan berdasarkan apa yang benar-benar diperlukan dan diprioritaskan oleh masyarakat daerah, ditambah dengan kenyataan bahwa orang-orang yang menjadi kandidat adalah orang yang berada dalam lingkungan pemilih, orang-orang yang dekat dengan pemilih, semuanya ini tentu membuat semangat warga untuk mendukung mereka menjadi lebih tinggi.

Kondisi Jepang dewasa ini dimana tumbuhnya ketidakpercayaan publik terhadap partai politik yang tengah berkuasa akibat stagnasi ekonomi yang berkepanjangan, ditambah dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi Jepang seperti menurunnya angka kelahiran, bertambahnya jumlah pengangguran, dan tingginya populasi manula, membuat masyarakat beralih ke kandidat lain yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan ini. Pada saat inilah, kesempatan wanita Jepang untuk berpolitik semakin terbuka lebar. Sekarang tinggal bagaimana cara mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.



BAB III
ANALISIS POLITIK IBU RUMAH TANGGA JEPANG :
KASUS TOKYO SEIKATSUSHA NETWORK
SEBAGAI PARTAI POLITIK LOKAL

Pada bab berikut ini akan dibahas mengenai Induk *Seikatsusha Network* yaitu *Seikatsu Kurabu*, *Seikatsusha Network*, dan kemudian lebih spesifik lagi menganalisa mengenai politik ibu rumah tangga Jepang dalam *Seikatsusha Network* yang berkedudukan di Tokyo yaitu *Tokyo Seikatsusha Network*.

Penjelasan mengenai poin-poin tersebut akan diperkaya dengan hasil angket yang disebarakan kepada 20 anggota *Tokyo Seikatsusha Network* pada tanggal 1-11 Oktober 2010 dan juga hasil wawancara kepada Nakamura Eiko, yang menduduki jabatan sebagai kepala kantor pusat *Tokyo Seikatsusha Network*, pada tanggal 15 Juli 2010. Dengan demikian, diharapkan bahwa penjelasan yang dipaparkan menjadi lebih berbobot dan dapat memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai *Tokyo Seikatsusha Network*.

Terakhir, bab ini akan ditutup dengan studi kasus mengenai salah satu rencana kebijakan yang ditentang oleh *Tokyo Seikatsusha Network*. Dengan melihat studi kasus ini, maka akan terlihat jelas bagaimana peran *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai aktor dalam politik lokal di Tokyo.

3.1 Induk *Seikatsusha Network* : *Seikatsu Kurabu*

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jepang yang meningkat setelah perang dunia II, produksi dan konsumsi massal pun menjadi tak terelakkan. Di sisi lain, kebijakan mengenai pencemaran lingkungan kurang mendapat prioritas oleh pemerintah dan industri Jepang di kala itu. Akibatnya, banyak terjadi pencemaran lingkungan besar-besaran di Jepang pada kurun waktu tahun 1950an sampai 1970an (http://human-security.jp/blog/2007/11/the_four_big_pollution_disease).

Salah satu contoh yang terkenal adalah tragedi minamata. Tragedi ini terjadi di daerah Minamata, prefektur Kumamoto pada tahun 1956. Tahun 1968 pemerintah Jepang menyatakan penyakit minamata terjadi karena pencemaran pabrik Chisso Co. Ltd, dimana masyarakat setempat banyak mengkonsumsi ikan dan kerang dari Teluk Minamata yang tercemar Methyl-Hg atau disebut metil merkuri. Lingkungan tercemar hebat. Ribuan orang menjadi korban. Peristiwa

seperti ini menumbuhkan ketertarikan masyarakat untuk berkontribusi terhadap lingkungan, contohnya dengan turut serta dalam program daur ulang, menggalakkan makanan organik, anti makanan berpengawet, dan sebagainya (Karan, 2008: 32).

Banyak ibu rumah tangga Jepang yang mulai menggiatkan sabun alami (terbuat dari *cooking oil*) untuk mengurangi pemakaian deterjen sintetis. Mereka juga mendaur ulang karton bekas susu untuk mengurangi sampah. Aktivitas seperti ini adalah aktivitas padat karya yang cukup melelahkan, namun penting sebagai langkah awal perjuangan jangka panjang demi pelestarian lingkungan.

Pada pertengahan tahun 1960, isu mengenai susu yang mengandung zat tambahan buatan menjadi perbincangan hangat. Sekelompok ibu-ibu yang gelisah dengan keamanan makanan, bersama-sama dengan aktivis pria mendirikan *Seikatsu Kurabu* pada tahun 1965, yang awalnya hanyalah grup konsumen yang memiliki pusat pengantaran susu di Setagaya.

Tujuan utama *Seikatsu Kurabu* saat itu adalah mengkoordinasikan pembelian susu yang sehat (steril dan tanpa bahan pengawet) secara kolektif, langsung ke produsen, dan kemudian menyalurkannya kepada ibu-ibu rumah tangga yang telah bergabung menjadi anggota. Dengan sistem ini, ibu-ibu rumah tangga bisa mendapatkan susu yang kualitasnya terjamin, namun dengan harga yang pantas. Dua ratus ibu rumah tangga pun bergabung.

Pada tahun 1968, nama *Seikatsu Kurabu* diubah menjadi *Seikatsu Kurabu Seikyō* atau *The Seikatsu Club Cooperative Society* (dan pada tahun 1990, diubah lagi menjadi *Seikatsu Club Consumer Co-operative Union*), walaupun demikian, di masyarakat Jepang tetap lebih dikenal dengan nama pertamanya, yaitu *Seikatsu Kurabu* (www.seikatsuclub.coop).

Pendiri *Seikatsu Kurabu*, Iwane Kunio menjelaskan pilihannya untuk membidik ibu rumah tangga sebagai anggota organisasi *Seikatsu Kurabu*, "Tempat kerja dan rumah adalah dua tempat yang berbeda. Hampir tidak ada pekerja atau karyawan yang bisa pulang-pergi ke tempat kerja kurang dari satu jam. Orang yang bekerja bukanlah bagian dari komunitas. Orang yang tertinggal adalah anak-anak dan ibu rumah tangga." (LeBlanc, 1999 : 128).

Anggota *Seikatsu Kurabu* menolak untuk menjadi konsumen pasif, yang begitu saja membeli produk-produk di pasaran tanpa memperhatikan kualitas dan keamanan produk tersebut. Mereka juga menolak *GM Foods* (*GM* merupakan singkatan dari *Genetically Modified*. *GM Foods* berarti makanan-makanan yang telah dimodifikasi secara genetik, yang seringkali berbahaya untuk dikonsumsi).

Kini, *Seikatsu Kurabu* menyediakan tiga ribu jenis produk untuk anggotanya, diantaranya beras, susu, telur, ikan beku, sayur, dan lain-lain. Tanpa melupakan kepeduliannya akan lingkungan, *Seikatsu Kurabu* mencoba mengembangkan produk-produk yang enak dan bergizi. Selain itu, produk-produk ini juga diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi secara efisien karena *Seikatsu Kurabu* menggunakan *pre-order collective purchase system*.

Dengan sistem ini, *Seikatsu Kurabu* memesan barang-barang yang akan dibeli secara kolektif, langsung ke produsen yang sudah terpercaya karena terjamin kualitasnya. Segera setelah diproduksi, produsen langsung mengirim produknya ke *Seikatsu Kurabu Center*, sehingga anggota *Seikatsu Kurabu* bisa mendapatkan produk yang masih segar. Sebagai contohnya, bisa dilihat dari karakteristik dua jenis produk yang termasuk paling populer, yaitu susu dan telur ayam.

Seikatsu Kurabu memproduksi susu di pabrik sendiri yang menggunakan teknologi sterilisasi pasteurisasi (72 derajat celcius selama 15 detik). Penyempurnaan nilai nutrisi dan rasa dilakukan dengan menambahkan kalsium dan protein melalui sterilisasi dengan suhu sangat tinggi (120-150 derajat celcius). Susu pasteurisasi hanya bisa dihasilkan dari susu alami bermutu tinggi. Karena itu, proses pemerahan susu pun dilakukan dengan standarisasi yang sangat ketat. Es krim dan yoghurt juga diproduksi dari susu segar yang sama.

Seikatsu Kurabu juga sangat serius untuk mendapatkan telur ayam berkualitas tinggi. Semua telur dihasilkan dari ayam lokal (tidak seperti kebanyakan telur ayam yang banyak beredar di pasaran Jepang, yang dihasilkan dari ayam impor) yang ditenakkan di sebuah peternakan ayam terpilih di prefektur Gifu.

Dalam pengembangbiakannya ayam-ayam ini sama sekali tidak disuntik antibiotika. Pemeriksaan kesehatan pun rutin diadakan. Setelah ayam-ayam tersebut bertelur, telur-telur ini segera didistribusikan sehingga dalam kurun waktu dua hari, sudah sampai di tangan konsumen. Telur-telur ini tidak dicuci sebelum didistribusikan karena lapisan kutikula di kulit telur menjaga telur-telur ini tetap segar.

Dalam usahanya untuk mewujudkan kehidupan sehari-hari yang lebih baik, *Seikatsu Kurabu* memiliki prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan keamanan produk-produk yang diperuntukkan untuk konsumen.
- b. Menggalakkan swasembada pangan
- c. Mengurangi substansi berbahaya (dalam makanan)
- d. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan
- e. Mengurangi sampah dan mempromosikan program *reuse* (menggunakan kembali)
- f. Mengurangi penggunaan energi
- g. Mengurangi resiko
- h. Transparansi informasi
- i. Pengendalian dan pengauditan yang independen
- j. Partisipasi masal

Selain itu, *Seikatsu Kurabu* juga memiliki peraturan-peraturan mengenai hal apa yang dilarang, dan hal apa yang digalakkan dalam lingkungan *Seikatsu Kurabu*. Contoh hal yang dilarang adalah penyemprotan pestisida masal menggunakan pesawat udara, produksi *GMO (Genetically Modified Organisms)*, penggunaan pestisida tanpa alasan yang jelas. Sedangkan contoh hal yang digalakkan adalah transparansi data pemeliharaan tanah dan tanaman kurun waktu tiga tahun terakhir, produksi tanaman musiman, rotasi tanaman, tidak menggunakan herbisida (senyawa pemberantas gulma, tanaman pengganggu), dan lain-lain.

Seikatsu Kurabu bekerja sama dengan perusahaan untuk mengembangkan kemasan yang ramah lingkungan sehingga sampah bisa dikurangi, kemasan bisa dipakai kembali, atau didaur ulang (*3R, Reduce Reuse dan Recycle*). Program ini membuat *Seikatsu Kurabu* berkontribusi besar terhadap reduksi emisi CO₂ dengan menggunakan *returnable bottle* (botol yang dapat dikembalikan setelah digunakan) untuk 44 jenis produk makanan seperti minuman ringan, kecap manis, dan selai. Selain itu digalakkan juga penggunaan *returnable container* (peti kemas yang dapat dikembalikan setelah digunakan).

Pada tahun 2003, sebanyak 8000 ton botol dan peti kemas dikembalikan, yang berarti pengurangan 2200 ton (seukuran volume stadion bisbol Tokyo Dome) CO₂. Pengurangan sampah yang dilakukan oleh masing-masing anggota, jika dirata-ratakan menjadi 8,5 kilogram per-orang (http://www.seikatsuclub.coop/english/3r_appeal.html).



Gb. 3.1 Mengurangi Sampah Sebanyak 8,5 kilogram Per-orang. Seukuran dengan Bola Berdiameter 2 M

Sumber : <http://www.seikatsuclub.coop/english/> (diunduh tgl 12 Mei 2010)

Semakin lama, *Seikatsu Kurabu Seikyō* menjadi semakin berkembang. Pada tahun 1998, *Seikatsu Kurabu* sudah terdapat di 15 prefektur dengan jumlah anggota 250.000 orang (*Tokyo seikatsusha nettowaku*, 1998: 2 dalam Eto, 2004 : 20). Dan data terakhir, tahun 2010, jumlah anggota sudah semakin bertambah menjadi 307.000 anggota, yang tersebar di 19 prefektur (<http://www.seikatsuclub.coop/english/>).

Walaupun gerakan konsumen beranggotakan ibu rumah tangga seperti Housewives Association (*Shufuren*) telah berdiri sebelumnya, namun *Seikatsu Kurabu* berbeda dengan gerakan konsumen manapun karena kepedulian

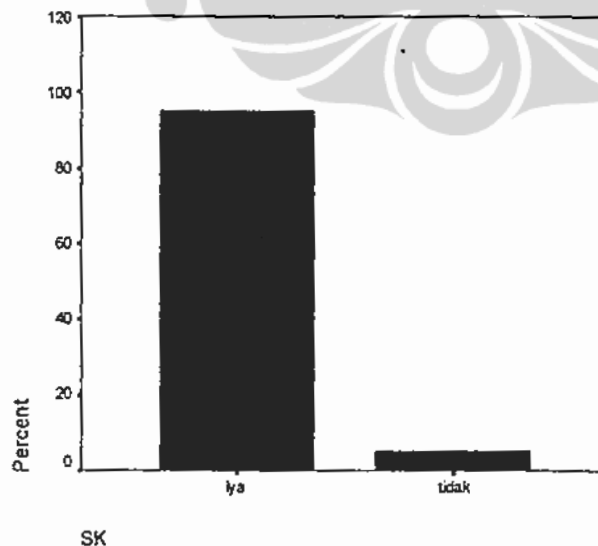
anggotanya yang begitu besar terhadap reformasi sosial dan keterlibatan dalam politik (Sato, 1994: 109 dalam Eto, 2004 : 20). Keterlibatan anggotanya terhadap politik inilah yang kemudian dijumpai dengan lahirnya *Seikatsusha Network*.

3.2 *Seikatsusha Network*

3.2.1 Gambaran Umum *Seikatsusha Network*

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, *Seikatsusha Nettowaku* atau *Netto* lahir dari gerakan yang lebih besar, yaitu *Seikatsu Club Consumer Cooperatives*. Karena *consumer cooperatives* tidak diperkenankan untuk menjalankan partai politik, dibentuklah *Netto*, yang bergerak sebagai partai politik lokal. Walaupun demikian, secara bersamaan, aktivis *Netto* sebagian besar adalah juga aktivis dan anggota dari *Seikatsu Kurabu*. Anggota tim sukses, pemilih, dan partisipan untuk kegiatan politik *Netto* pun sebagian besar merupakan anggota *Seikatsu Kurabu* (LeBlanc, 1999 : 127).

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 20 anggota Tokyo *Seikatsusha Network*, didapatkan hasil bahwa sebesar 95% responden juga bergabung dalam *Seikatsu Kurabu*. Hanya 5% yang menyatakan tidak mengikuti *Seikatsu Kurabu*.



Grafik 3.1 Keikutsertaan dalam *Seikatsu Kurabu*

Dari segi sumber informasi mengenai *Tokyo Seikatsusha Network* pun, mayoritas responden (55%) mengetahui perihal *Tokyo Netto* dari *Seikatsu Kurabu*. 40% lainnya mengetahui dari teman, dan hanya 5% yang mengetahui dari *newsletter*. Hal-hal tersebut menunjukkan afiliasi yang begitu kuat antara *Seikatsusha Network* dan *Seikatsu Kurabu*.

Netto sering disebut sebagai "sayap" dari *Seikatsu Kurabu* yang menangani urusan politik seperti mengirimkan anggotanya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan perwakilan rakyat (sebagian besar pada tingkat lokal), menyiapkan kampanye, mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik, mengadakan riset mengenai kebijakan-kebijakan yang sebaiknya diambil, dan sebagainya (dikutip dari *newsletter* berjudul *Seikatsusha Network : Is a Political Network of Citizens*).

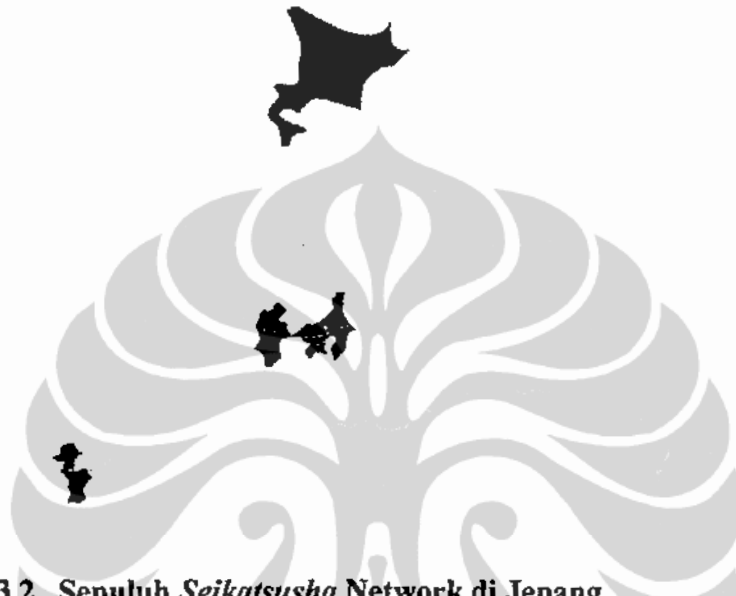
Seikatsusha sendiri berasal dari kata *seikatsu* dan *sha*. *Seikatsu* artinya kehidupan, atau dalam konteks ini, kehidupan sehari-hari. Sedangkan *sha* artinya orang. Jika dirangkaikan, kata *Seikatsusha* berarti orang dalam kehidupan sehari-hari. Namun bila dikaji lebih dalam, istilah *seikatsusha* yang digunakan dalam *Seikatsu Kurabu* dan *Netto* adalah istilah yang *gender-specific* atau mengacu pada gender, karena mereka memfokuskannya untuk merujuk pada ibu rumah tangga. Moto yang cukup populer dari *Seikatsusha Network* adalah "*Ikikata wo Kaeyo!!*" (Mari ubah cara hidup kita!!).

Seikatsusha Network memfokuskan diri untuk bergerak sebagai penghubung antara politik dan warga negara (*citizen*). Kebijakan yang dicanangkan *Seikatsusha Network* pun didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Dengan menggunakan politik sebagai alat, *Seikatsusha Network* mencanangkan kebijakan yang sekiranya penting bagi warga negara dan membantu warga negara menemukan solusi dari masalah-masalah mereka (dikutip dari *newsletter* berjudul *Seikatsusha Network : Is a Political Network of Citizens*).

Pada awal mula pembentukannya, *Seikatsusha Network* lebih berfokus pada isu-isu seputar "kualitas hidup" seperti isu konsumen dan isu lingkungan, namun pada perkembangannya, agenda mereka meluas menjadi juga mengenai isu pendidikan, kesejahteraan kaum manula, tata kota, dan lain lain (Gelb, 1998).

3.2.2 Pembagian *Seikatsusha Network* di Jepang

Menurut website <http://www.local-party.net/>, kini, di Jepang, telah terdapat 10 *Seikatsusha Network*, yang terdiri dari 8 *Seikatsusha Network* tingkat prefektur dan 2 *Seikatsusha Network* tingkat kota (Kota Tsukuba dan Yokohama). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gb. 3.2 Sepuluh *Seikatsusha Network* di Jepang
Sumber <http://www.local-party.net/> (diunduh tanggal 11 Mei 2010)

1. 市民ネットワーク北海道 (*Shimin Nettowaaku Hokkaido*)
2. つくば市民ネットワーク (*Tsukuba Shimin Nettowaaku*)
3. 市民ネットワーク千葉県 (*Shimin Nettowaaku Chiba Ken*)
4. 埼玉県市民ネットワーク (*Saitamaken Shimin Netto*)
5. 東京・生活者ネットワーク (*Tokyo Seikastsusha Netto*)
6. 神奈川ネットワーク運動 (*Kanagawa Nettowaaku Undou*)
7. ネットワーク横浜 (*Nettowaaku Yokohama*)
8. 信州・生活者ネットワーク (*Shinshu* Seikatsusha Nettowaaku*)
9. ふくおかネットワーク (*Fukuoka Nettowaaku*)
10. くまもと生活者ネットワーク (*Kumamoto Seikatsusha Nettowaaku*)

Ket : *Shinshu* adalah sebutan lain dari *Shinano no Kuni*, provinsi di Jepang kuno yang kini telah menjadi prefektur Nagano.

3.2.3 Tiga Prinsip dasar *Seikatsusha Network*

Dalam menjalankan kegiatannya, *Seikatsusha Network* memiliki 3 prinsip dasar, yaitu :

1. *Rooteeshon* (ローテーション) / Rotasi : perwakilan *Seikatsusha Network* tidak bisa bertugas selama lebih dari 3 term (12 tahun) untuk menghindari adanya anggapan pemberian hak istimewa dan juga untuk memberi kesempatan pada anggota yang lain.
2. *Giin houshuu wa shimin no seiji katsudou shikin ni* (議員報酬は市民の政治活動資金に) / Penghasilan dewan perwakilan digunakan untuk mendanai kegiatan politik : *Seikatsusha Network* akan mengelola sejumlah honor yang didapat oleh perwakilan mereka sebagai hasil keterlibatan dalam aktivitas politik untuk digunakan dalam kegiatan *Seikatsusha Network* dan memperlihatkan transparansi pengelolaan dana ini kepada para anggota.
3. *Senkyo wa kanpa to borantia de* (選挙はカンパとボランティアで) / Pemilihan didukung oleh kontributor dan sukarelawan : Anggota serta sukarelawan *Seikatsusha Network* akan membantu mengurus kampanye perwakilannya dalam pemilihan. Dana kampanye didapatkan dari donasi yang diberikan anggota dan sponsor.

Tiga peraturan inilah yang dijunjung tinggi oleh anggota *Seikatsusha Network* dalam menjalankan aktivitas politik mereka.

3.2.4 Kegiatan-Kegiatan *Seikatsusha Network*

Selanjutnya, untuk merealisasikan program-program kerjanya dengan baik, ada beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh *Seikatsusha Network*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut ini :

1. Konferensi

Seikatsusha Network mengerti bahwa banyak warga negara yang memiliki kesulitan dalam mengemukakan masalah di kota mereka sendiri dan mengajukan solusi kepada administrasi lokal dan perwakilan legislatif. Demi memfasilitasi warga negara yang peduli ini, alih-alih mengumpulkan petisi dan mengajukan permohonan, perwakilan *Seikatsusha Network* mengkoordinasi konferensi antara

warga negara dan perwakilan legislatif untuk mendiskusikan dan mengatasi permasalahan yang ada.

Dengan cara ini, *Seikatsusha Network* telah berkontribusi dalam mengatasi masalah polusi udara yang tercemar polutan kimiawi dan membuat amandemen undang-undang mengenai polusi di Tokyo.

2. Mini Forum

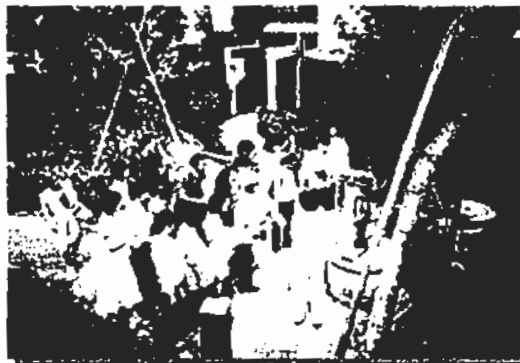


Gb. 3.3 Mini Forum *Seikatsusha Network*

Sumber : www.seikatsusha.net (diunduh tanggal 2 September 2010)

Jika ada masalah yang perlu didiskusikan di wilayah tertentu, *Seikatsusha Network* akan mengorganisir mini forum yang terbuka yang terbuka bagi semua warga negara. Anggota dewan perwakilan rakyat yang berasal dari *Seikatsusha Network* bersama dengan warga negara akan berusaha untuk mengatasi masalah yang dikemukakan di dalam forum.

3. Riset dan Investigasi



Gb 3.4 Mengecek Rumah Ramah Lingkungan di Setagaya

Sumber : www.seikatsusha.net (diunduh tanggal 2 September 2010)

Mengecek polusi air sungai, memeriksa hambatan yang dihadapi orang cacat di jalan-jalan kota, menyebarkan kuisioner, dan menyelenggarakan beragam investigasi untuk mengetahui apa yang diperlukan warga kota, merupakan contoh-contoh kegiatan riset dan investigasi yang dilakukan *Seikatsusha Network*. Beberapa contoh investigasi terakhir meliputi permasalahan permasalahan seperti:

- a. "Membesarkan Anak", "Merawat Manula", dan "Wanita dan Pensiun" (Investigasi tahun 1998)
- b. "Hak Anak" (Investigasi tahun 1999)
- c. "Wanita dan Karir" (Investigasi tahun 2000)
- d. "Pengeluaran untuk Membesarkan Anak", "Kehidupan Anak Sepulang Sekolah", dan "Alergi" (Investigasi tahun 2001-2002).

Melalui kegiatan riset dan investigasi, *Seikatsusha Network* membuat dan mengajukan kebijakan utama mereka terutama mengenai lingkungan, kesejahteraan sosial, kebijakan tanpa diskriminasi gender, kebijakan untuk anak sesuai dengan "*Convention on the Rights of the Child*" (Konvensi Hak Anak), dan sebagainya.

Berdasarkan hasil angket, sebanyak 45% responden menjawab bahwa kegiatan favorit mereka di *Netto* adalah *Chousa Katsudou* (riset dan investigasi), 10% menjawab *mini forum*, dan sisanya (45%) memilih kolom jawaban "dan lain-lain" dengan penjelasan tidak ada aktivitas favorit, belum tau yang mana yang akan menjadi aktivitas favorit, suka semua, dan sebagainya. Banyaknya responden yang dengan spesifik memilih *Chousa Katsudou* mengindikasikan bahwa anggota *Netto* cukup antusias dalam kegiatan yang langsung terjun ke lapangan sehingga masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar dapat mereka atasi dengan sebaik-baiknya.

3.3 Tokyo Seikatsusha Network

3.3.1 Tokyo Seikatsusha Network Sebagai Salah Satu Induk Seikatsusha Network yang Terbesar

Pada bulan Maret 2009, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang memaparkan hasil survey mengenai jumlah anggota dewan perwakilan wanita di tingkat lokal di Jepang. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut ini :

Tabel 3.1 Jumlah Wanita dalam Dewan Perwakilan Daerah (10 Besar)

Nama Prefektur	Dewan Perwakilan Prefektur	Dewan Perwakilan Kota/ Ward	Dewan Perwakilan kecamatan/ desa	Total	Rasio	Peringkat
Tokyo	22	384	14	420	22.6	1
Kanagawa	11	135	43	189	19.9	2
Saitama	5	207	72	284	18.2	3
Osaka	7	173	23	203	17.8	4
Kyoto	6	69	20	95	15.1	5
Chiba	7	165	24	196	13.9	6
Aichi	6	137	46	189	12.8	7
Hyogo	11	106	24	141	12.7	8
Shiga	8	48	13	69	12.6	9
Nagano	11	68	76	155	12.5	10
Total jumlah dewan perwakilan wanita	225	2.761	1.045	4.031	10.5	x
Total jumlah anggota dewan (meliputi kursi lowong)	2.784	22.130	13.501	38.415	x	x
Rasio (%)	8.1	12.5	7.7	10.5	x	x

Sumber : Newsletter Japanese Women No.102, September 1, 2009 Hal. 2

Dalam survei ini terlihat bahwa Tokyo menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah anggota dewan perwakilan wanita di tingkat lokal dengan rasio 22.6%. Dengan kata lain, keterwakilan wanita dalam politik lokal di Tokyo paling tinggi di antara prefektur lain di Jepang.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa salah satu induk *Seikatsusha Network* yang terbesar dengan perkembangan terpesat adalah *Tokyo Seikatsusha Network* yang membawahi 33 *Seikatsusha Network* lokal (yang terdiri dari 11 *special wards* dan 21 kota) dan 1 *Seikatsusha Network* pusat (*Tokyo Metropolitan Assembly of Seikatsusha Network*).

Anggota *Seikatsu Kurabu* di Nerima (*ward*) yang ingin terlibat dalam politik, akan bergabung dengan *Netto* cabang Nerima, demikian juga dengan

anggota *Seikatsu Kurabu* di Setagaya yang ingin terlibat dalam politik, akan bergabung dengan *Netto* cabang Setagaya. Selanjutnya, beberapa *Seikatsusha Network* lokal ini (berbasis ward) berkumpul bersama dan berada di bawah payung organisasi *Seikatsusha Network* setingkat prefektur Contohnya, *Netto* cabang Setagaya dan Nerima yang tergabung di bawah bendera *Tokyo Netto* (LeBlanc, 1999 : 135).

3.3.2 Pembagian Tokyo Seikatsusha Network

Berdasarkan *newsletter Seikatsusha Network* yang berjudul “2007年統一地方選挙/基本政策” (2007nen Touitsu Chihou Senkyo / Kihon Seisaku), adapun pembagian 33 *Seikatsusha Network* lokal dan 1 *Seikatsusha Network* pusat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut ini :



Gb. 3.5 Peta Tokyo Seikatsusha Network Berdasarkan Pembagian Ku/ distrik khusus (Warna Biru) dan Shi/Kota (Warna Pink)
Sumber : www.seikatsusha.net (diunduh tanggal 14 Mei 2010)

33 *Tokyo Seikatsusha Network* lokal ini meliputi 12 *Tokyo Seikatsusha Network* tingkat *ku* / distrik khusus dan 21 *Tokyo Seikatsusha Network* tingkat *shi* / kota. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagian lampiran.

3.3.3 Sejarah Singkat Tokyo Seikatsusha Network

Selanjutnya, untuk mengenal lebih jauh mengenai *Tokyo Seikatsusha Network*, maka berikut ini akan dipaparkan sejarah singkat *Tokyo Seikatsusha Network* dimulai dari kelahiran *Group Seikatsusha*.

Pada tahun 1977, Usaha pertama dilancarkan untuk meraih kursi di dewan perwakilan Tokyo Metropolitan dari daerah pemilihan Nerima City, Tokyo. Slogan kampanye kala itu adalah “生き方を変えよう” (*ikikata wo kaeyou* – mari ubah cara hidup kita). Pada tahun yang sama, “グループ生活者” (*The Group Seikatsusha*), pendahulu *Seikatsusha Network*, didirikan di Nerima City.

Pada tahun 1979, untuk pertama kalinya, perwakilan *The Group Seikatsusha* meraih kursi di dewan perwakilan kota Nerima. Selanjutnya, 6 tahun kemudian, pada tahun 1985, perwakilan *The Group Seikatsusha* meraih kursi di dewan perwakilan Tokyo Metropolitan untuk pertama kalinya. Slogan kampanye kala itu adalah “政治を生活の道具に” (*seiji o seikatsu no dougu ni* – gunakan politik sebagai alat dalam kehidupan).

Pada tahun 1988, *The Group Seikatsusha* berubah nama menjadi *Seikatsusha Network*. Dan setelah itu, semakin aktif dalam usaha mempengaruhi kebijakan demi kepentingan masyarakat. Seperti melakukan gerakan “Inisiatif Makanan Aman” dan mengajukan petisi yang telah ditanda-tangani oleh 550.000 orang ke pemerintah Tokyo Metropolitan, membuat rancangan peraturan daur ulang untuk Tokyo, memeriksa halangan bagi orang cacat untuk melakukan aktivitasnya di Tokyo, dan sebagainya.

Perkembangan partai politik lokal ini selama 10 tahun terakhir, tahun 2000 sampai 2010, bisa dibilang cukup stabil. Rata-rata setiap masa pemilihan, sukses mengirimkan total sekitar 50an kursi untuk dewan perwakilan di berbagai distrik khusus dan kota. Sedangkan untuk tingkat Tokyo Metropolitan, rata-rata meraih sekitar 2-3 kursi pada setiap masa pemilihan. Untuk lebih lanjutnya mengenai kronologi sejarah *Tokyo Seikatsusha Network* dapat dilihat bagian lampiran.

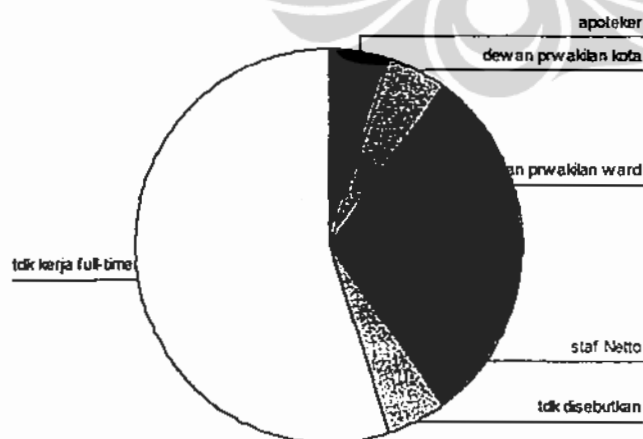
3.3.4 Karakteristik Responden (Ibu Rumah Tangga Jepang yang Bergabung dalam *Tokyo Seikatsusha Network*)

Aspek yang paling signifikan dari *Seikatsusha Network* adalah fakta bahwa semua calon legislatifnya adalah wanita, dan kebanyakan dari mereka adalah “ibu rumah tangga biasa” sebelum menjadi calon legislatif dibawah bendera *Seikatsusha Network*. Pendukung kampanye mereka pun, mayoritas adalah wanita.

Untuk sedikit memberikan gambaran mengenai karakteristik ibu rumah tangga yang bergabung dalam *Tokyo Seikatsusha Network* ini, berikut akan kembali dipaparkan sekelumit dari hasil angket yang disebarakan kepada 20 anggota *Tokyo Seikatsusha Network*. Usia rata-rata ibu-ibu ini pun adalah usia paruh baya yaitu 55.9 tahun. Usia responden yang paling muda adalah 38 tahun, sedangkan yang paling tua adalah 73 tahun.

Delapan puluh lima persen responden mengaku memiliki anak. Hanya 15% yang menjawab tidak/belum punya anak. Mayoritas (45%) memiliki 2 orang anak, dengan rentang usia anak terkecil dari umur 3 tahun hingga 35 tahun. Jika dirata-ratakan, usia anak terkecil mereka adalah 21,47 tahun. Usia dimana umumnya seseorang sudah dianggap dewasa, sedang duduk di bangku kuliah tingkat akhir, ataupun ada yang sudah bekerja. Hal ini memberikan gambaran bahwa ibu-ibu rumah tangga yang bergabung dalam *Seikatsusha Network* ini umumnya tidak lagi terlalu menghabiskan waktu untuk mengurus anak, karena anaknya sudah beranjak dewasa.

Ditanya mengenai pekerjaan suami, 35% menjawab bahwa suami mereka bekerja sebagai pekerja kantoran. Sisanya menjawab wiraswastawan (25%), pensiunan (20%), *freelancer* (5%), sedang mencari kerja (5%), sudah cerai (5%), dan suami sudah meninggal (5%). Mengenai pekerjaan mereka sendiri, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.2 Pekerjaan Full-time Responden

Bisa dilihat bahwa lebih dari separuhnya (55%) tidak bekerja *full-time* dan 25% bekerja sebagai dewan perwakilan kota ataupun *ward*. Mengenai kerja *part-time*, 65% menjawab tidak kerja *part-time*, sedangkan sisanya memberikan jawaban bervariasi seperti desain grafis, bekerja di travel, bekerja di *NPO* (*non profit organization*), dan sebagainya.

Banyaknya jumlah responden yang tidak bekerja *full-time* maupun *part-time*, seakan turut membenarkan pendapat Sumiko Yazawa yang dikutip dalam Gelb, 1998, yaitu "Banyak wanita yang bergabung dalam *Seikatsusha Network* menerima pembagian kerja berdasarkan gender dalam rumah tangga. Dimana pria bekerja (di luar rumah), sedangkan wanita mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Partisipasi politik mereka juga bisa dilihat sebagai kompensasi dan pengganti dari kurangnya kemandirian dalam bidang ekonomi dan profesi".

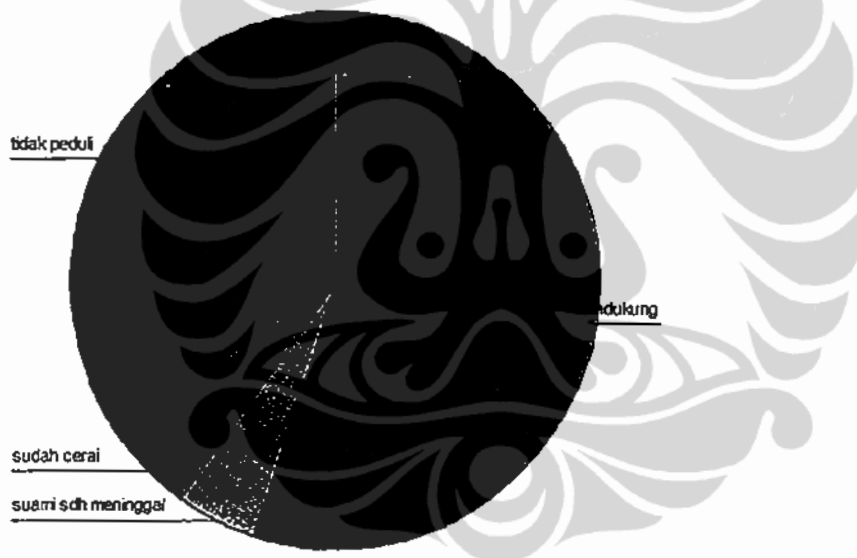
Menarik mengetahui alasan responden untuk bergabung dalam partai politik lokal ini. Hanya 50% yang menjawab karena memang ingin berpartisipasi dalam politik. Sedangkan sisanya, 20% karena ingin berkontribusi pada masyarakat, 15% karena ingin mengubah cara hidup menjadi lebih baik, 10% karena merasa memiliki waktu luang, dan 5% karena melihat aktivitas di *Seikatsusha Network* lebih menarik daripada mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Walaupun hanya separuhnya yang memang ingin berpartisipasi dalam politik, namun jika mengingat bahwa kebanyakan responden adalah ibu rumah tangga biasa, tentu saja jumlah ini cukup signifikan karena dapat mengubah *stereotype* yang ada dalam masyarakat, bahwa wanita enggan untuk terjun dalam ranah politik.

Banyaknya responden yang bergabung karena ingin berkontribusi terhadap masyarakat juga merupakan poin yang penting. Bagaimana ibu-ibu rumah tangga ini ingin berguna bagi masyarakat. Dengan bergabung dalam *Tokyo Seikatsusha Network*, mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat di bangku kuliah. Selain memberi manfaat pada orang lain, hal ini juga menjadi sarana aktualisasi diri sehingga bisa mengembalikan *self-respect* (penghargaan diri) mereka.

Partisipasi politik ibu rumah tangga dalam politik lokal ini sering pula dikaitkan dengan kurangnya kandidat pria untuk pemilihan lokal, terutama di daerah perumahan di Tokyo. Pria-pria berpendidikan di daerah ini lebih memilih mencari kerja di perusahaan Jepang yang besar di Tokyo, dengan jaminan pekerjaan seumur hidup dan banyak keuntungan tambahan lain, dibandingkan menjadi dewan perwakilan daerah, yang umumnya bergaji rendah dengan karir politik yang *insecure* (tidak aman, karena belum tentu berlangsung terus) (Gelb, 1998).

Selanjutnya, status mereka sebagai ibu rumah tangga pun menimbulkan pertanyaan lain. Bagaimana pendapat suami mereka terhadap keikutsertaan mereka dalam partai politik lokal ini? Menanggapi pertanyaan ini, para responden pun menjawab sebagai berikut :



Grafik 3.3 Pendapat Suami Terhadap Keterlibatan dalam *Seikatsusha Network*

Ternyata sebagian besar (55%) suami responden mendukung keterlibatan mereka dalam *Seikatsusha Network*. Memang terdapat angka yang cukup signifikan (35%) yang menyatakan tidak peduli. Namun sama sekali tidak ada yang memilih opsi 反対されています (*hantai sarete imasu* - ditentang). Satu-satunya responden yang menyatakan adanya sedikit masalah mengenai hal ini hanyalah Tanabe Yukiko (62 tahun). Ibu tiga anak ini menyatakan 支援していると思いま

すが、家事が滞ると時々怒ります (*shien shite iru to omoimasu ga, kaji ga todokooruto tokidoki okorimasu* - didukung, namun begitu pekerjaan rumah tangga keteteran, kadang-kadang suami marah).

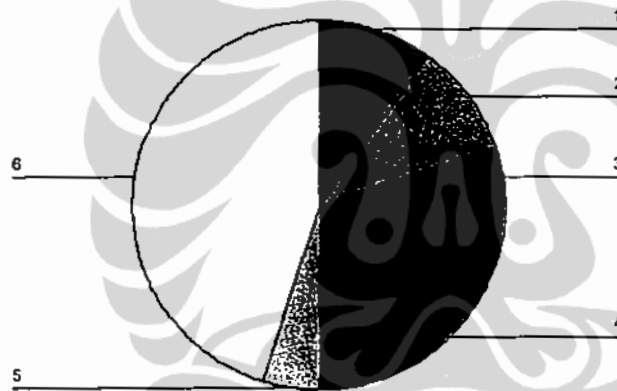
Masalah manajemen waktu memang merupakan hal yang krusial bagi ibu-ibu rumah tangga ini. 30% responden bahkan menyatakan bahwa hal yang cukup menjadi masalah dalam keterlibatannya di *Seikatsusha Network* adalah *たくさん時間が使います* (*takusan jikan ga tsukaimasu* - banyak menghabiskan waktu). Mungkin ini juga yang mempengaruhi engganannya sebagian besar responden (60%) untuk dicalonkan menjadi dewan perwakilan.

Dalam menjalankan visi dan misinya, *Seikatsusha Network* berusaha mengkombinasikan isu-isu global dengan aktivisme tingkat lokal, atau diistilahkan dengan *gurokaru* - glocal!. *Seikatsusha Network* juga selalu mengkategorisasikan diri mereka sebagai *rookaru paati / local party*. Istilah *Local Party* sendiri merupakan istilah yang populer untuk gerakan warga negara (tingkat lokal) yang mengambil celah dari tumbangnya "sistem 1955" yang didominasi *LDP*. Dengan menggunakan kata-kata berbahasa Inggris yaitu "party" dan "locality", gerakan ini bermaksud mengindikasikan bahwa mereka berbeda dari partai-partai yang telah ada dan mereka lebih berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan mandiri yang bertanggung-jawab, lebih dari partai lain yang kerap kali mementingkan kepentingan sendiri (LeBlanc, 1999 : 136).

Mengenai hal ini, Kyoko Mataka, seorang dewan perwakilan yang tergabung dalam *Seikatsusha Network* mengungkapkan keyakinannya bahwa *local party* bisa mengubah politik Jepang. Partai nasional memiliki keterbatasan. Karena terkadang sulit untuk mengaplikasikan peraturan yang sama kepada komunitas-komunitas yang memiliki keadaan demografis, ekonomi, dan geografis yang berbeda. Banyak isu politik yang tak terpisahkan dari pertimbangan regional, seperti masalah sampah, suplai air, dan tata kota. Satu kebijakan yang sama tidak bisa memenuhi kebutuhan semua daerah. Pada saat inilah *local party* dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan di daerah setempat (<http://www.yomiuri.co.jp/intview/0622dy20.htm>).

Lebih lanjut mengenai perbedaan *Seikatsusha Network* dengan partai politik yang telah ada terletak pada permasalahan yang mereka fokuskan. *Seikatsusha Network* berfokus untuk mengatasi permasalahan di *real life*, yaitu di kehidupan nyata atau dalam konteks ini, kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika mereka fokus terhadap orang cacat, mereka segera mengusahakan cara-cara agar fasilitas di kota lebih bersahabat terhadap orang cacat. "Peduli" adalah inti dari cara pandang yang berbeda yang dimiliki *Seikatsusha Network*, sebuah sifat yang (pada masyarakat Jepang) "dibebankan" ke ibu rumah tangga (LeBlanc, 1999 : 144).

Pada angket, diajukan pertanyaan mengenai masalah-masalah yang paling menarik atau paling ingin mereka selesaikan, dan 20 responden menjawab sebagai berikut :



Grafik 3.4 Masalah yang Paling Ingin Diselesaikan

Keterangan :

- 1 : pendidikan (10%)
- 2 : kesetaraan gender (10%)
- 3 : masalah lansia (5%)
- 4 : kota nyaman ditinggali (25%)
- 5 : makanan aman dikonsumsi (5%)
- 6 : dan lain-lain (45%) -keterangan yang ditambahkan responden untuk opsi ini cukup bervariasi. Ada yang menjawab masalah lingkungan, generasi muda, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, anak-anak, sampah, hingga kedamaian dunia-

Jawaban yang diberikan oleh para responden sebagian besar menunjukkan permasalahan yang "lembut", "menimbulkan rasa iba", berbau "pengasuhan" dan "perlindungan". Selaras dengan pernyataan Carnaghan & Bahry (1990) dalam Pharr (1998) mengenai fokus politisi wanita dalam mengambil kebijakan yang telah dibahas sebelumnya pada bab II. Sehubungan dengan hal ini, tidak salah kiranya jika Leblanc (1999) menyatakan bahwa melihat ibu rumah tangga sebagai anggota dari *Seikatsusha Network*, tidak lain seperti memperluas jabatan wanita dari "*family housewives*" ke "*neighborhood housewives*".

Untuk melengkapi data ini, pada tanggal 15 Juli 2010, penulis mendatangi kantor pusat Tokyo *Seikatsusha Network* untuk mewawancarai Nakamura Eiko, yang menduduki jabatan sebagai kepala kantor pusat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan Tokyo *Seikatsusha Network* seperti berikut ini.

Total jumlah anggota Tokyo *Seikatsusha Network* kurang lebih 1500 orang, sudah termasuk anggota yang menjadi perwakilan di dewan perwakilan kota sebanyak 54 orang. 52 orang menjadi perwakilan di tingkat *shi/ku*, dan 2 lainnya menjadi perwakilan di tingkat Tokyo Metropolitan.

Siapa pun bisa bergabung menjadi anggota Tokyo *Seikatsusha Network*, pria maupun wanita, asalkan sudah berumur diatas 18 tahun. Namun tetap saja pada kenyataannya, mayoritas yang bergabung adalah ibu rumah tangga. Jumlah pria yang bergabung pun sangat sedikit. Sebagai contoh, di Saitama *Netto* dan Chiba *Netto* hanya ada 1 orang anggota pria.

Mayoritas anggota Tokyo *Seikatsusha Network* adalah ibu rumah tangga berusia 50an tahun (Hal ini sejalan dengan hasil angket yang menunjukkan rata-rata responden berusia 55,9 tahun). Tercatat di kantor pusat bahwa usia anggota yang paling muda adalah 27 tahun (anggota Suginami *Netto*) dan yang paling tua adalah 80 tahun (anggota Nerima *Netto*).

Uang keanggotaan Tokyo *Seikatsusha Network* bervariasi di setiap *ward* atau *shi*, namun rata-rata sebesar 4800 yen setahun. Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional dan juga biaya konsumsi (kopi dan makanan ringan yang disuguhkan ketika rapat).

Anggaran Tokyo untuk tahun 2002 saja tercatat sebesar 11,77 triliun yen. Anggaran sebesar ini tentu saja tidak boleh disia-siakan, dalam artian harus dipergunakan dengan maksimal. Karena itulah, *Tokyo Seikatsusha Network* berusaha mencari tahu apa yang dibutuhkan warga kota, dan berlandaskan dengan pengetahuan tersebut, *Tokyo Seikatsusha Network* akan menyusun rancangan anggaran tahunan dan mengajukannya ke gubernur.

Untuk mengetahui aspirasi warga kota, alih-alih sering mengadakan rapat besar, *Tokyo Seikatsusha Network* lebih menggiatkan penyelenggaraan kegiatan *outdoor* seperti *chousa katsudou* (kegiatan riset dan investigasi). Ketika ditemukan masalah, hal ini akan dikoordinasikan dengan anggota dewan perwakilan kota, lalu diadakan rapat. Rapat ini bertujuan untuk membuat rancangan kebijakan yang akan diajukan oleh *giin* di dewan perwakilan. Singkatnya, *giin* inilah yang akan merealisasikannya (dalam bahasa Jepang, "*giin ga hatsugen suru*").

Tokyo Seikatsusha Network menggunakan *newsletter* sebagai sarana informasi. Judul *newsletter* ini adalah 生活者通信—*Seikatsusha Tsuushin*, yang diterbitkan sebulan sekali. Jika dibeli eceran, harga *newsletter* ini adalah 100 yen, namun jika ingin berlangganan, maka anggota wajib membayar 1000 yen setahun (12 edisi).

Masing-masing *Tokyo Seikatsusha Network* tingkat lokal juga mencetak *newsletter* sendiri, namun diterbitkan lebih jarang (empat kali dalam setahun), contohnya *seikatsusha setagaya* yang memuat info-info kampanye, permasalahan setempat (contohnya seperti yang dimuat pada *seikatsusha setagaya* no 106, 25 April 2010, mengenai *sexual harassment* - pelecehan seksual- yang terjadi di sekolah), tanya-jawab dengan anggota komite bagian anggaran, dan sebagainya.

3.4 Studi Kasus : Rencana Pemindahan Pasar Tsukiji

Sebagian besar buku dan hasil penelitian hanya memberikan gambaran mengenai *Tokyo Seikatsusha Network* pada tahun 1980an atau 1990an. Menyimak bagaimana *Tokyo Seikatsusha Network* menyikapi kebijakan terkini berikut ini, tentunya akan memberi informasi yang lebih *up-to-date* mengenai *Tokyo Seikatsusha Network* dan kiprahnya dalam politik lokal di Tokyo Metropolitan.

Dalam sub-bab ini, isu yang dibahas adalah rencana pemindahan pasar Tsukiji yang merupakan salah satu isu terpanas saat ini di Dewan Perwakilan Tokyo Metropolitan. Isu ini bahkan disebut-sebut sebagai yang paling memicu keretakan antara partai yang berkuasa dan partai oposisi dalam tubuh dewan perwakilan Tokyo Metropolitan (<http://www.japantoday.com/category/politics/view/voting-under-way-in-tokyo-assembly-election>).

Namun sebelum melangkah pada kasus tersebut, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu mengenai komposisi perwakilan partai-partai di Dewan Perwakilan Tokyo Metropolitan sebagaimana hasil pemilihan umum tanggal 12 Juli 2009.

Tabel 3.2 Komposisi Perwakilan Partai-Partai di Dewan Perwakilan Tokyo Metropolitan (12 Juli 2009)

Partai	Kandidat	Suara	%	Kursi
Democratic Party of Japan (民主党, <i>Minshutō</i>)	58	2,298,494	40.79	54
Liberal Democratic Party of Japan (自由民主党, <i>Jiyū Minshutō</i>)	58	1,458,108	25.88	38
New Komeito Party (公明党, <i>Kōmeitō</i>)	23	743,427	13.19	23
Japanese Communist Party (日本共産党, <i>Nihon Kyōsan-tō</i>)	40	707,602	12.56	8
Tokyo Seikatsusha Network (東京・生活者ネットワーク)	5	110,407	1.96	2
Social Democratic Party (社民党 <i>Shamin-tō</i>)	2	20,084	0.36	0
Lain-lain	13	45,329	0.80	0

Independen	22	250,869	4.45	2
Total	221	5,705,441	100.00	127

Sumber : http://www.gikai.metro.tokyo.jp/membership/political_party.html

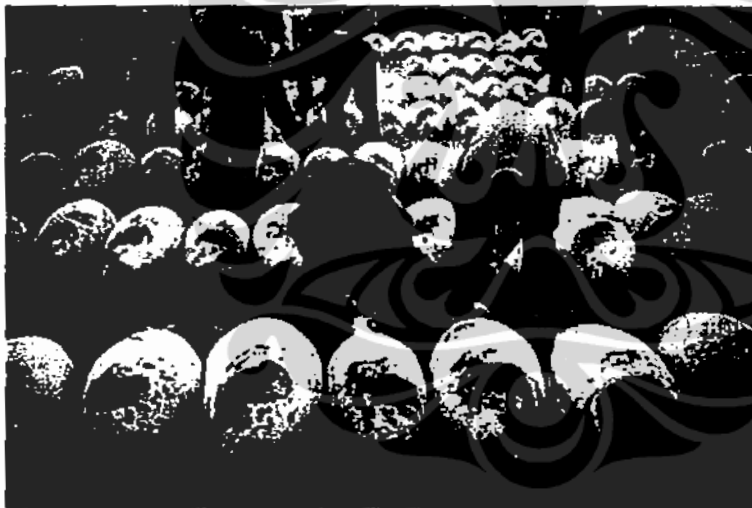
Walaupun kedudukan *Tokyo Seikatsusha Network* dalam parlemen tidak terlalu kuat (bahkan bisa dikategorikan sebagai *minor party* yaitu partai yang jauh lebih lemah dibandingkan partai yang berkuasa) namun bukan berarti eksistensi mereka bisa dikesampingkan begitu saja karena mereka tetap memiliki ketegasan dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang dicanangkan pemerintah. Untuk lebih jelasnya, dapat disimak pada studi kasus berikut ini.

Pemerintah Tokyo Metropolitan dibawah pimpinan Gubernur Shintaro Ishihara merencanakan untuk merelokasi pasar Tsukiji (yang berlokasi di pusat kota Tokyo, hanya 15 menit dari distrik pusat perbelanjaan terkemuka, Ginza) ke daerah Koto di distrik Toyosu (sebelah tenggara Tokyo), sebuah pulau buatan bekas pabrik *Tokyo Gas*, yang tanahnya sudah terbukti tercemar bahan-bahan kimia seperti benzena (dengan jumlah 43.000 kali lebih banyak dari yang diijinkan), senyawa sianida (800 kali lipat lebih banyak dari batasan yang dianggap aman), serta bahan kimia lain seperti arsenik, merkuri, dan krom (<http://www.nishoren.org/en/?p=236>).

Pasar Tsukiji bukanlah sembarang pasar. Tsukiji sebagai pasar ikan paling besar dan terkenal di Jepang, bahkan di dunia, memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok hidangan laut di Jepang, yang merupakan hidangan kegemaran sebagian besar masyarakatnya (<http://www.tsukiji-market.or.jp>). Pasar Tsukiji memiliki 800 kios. Setiap harinya, 480 jenis produk laut (ikan, cumi-cumi, gurita, dan lain lain) seberat total 2.000 ton, diantarkan ke pasar Tsukiji dari berbagai daerah baik di Jepang maupun luar Jepang. Dalam 1 hari, uang sejumlah 1,8 milyar yen berpindah tangan di pasar ini. Tidak ada satupun pasar makanan lain di dunia yang melampaui angka penjualan tersebut (<http://web-japan.org/nipponia/nipponia47/en/travel/>).

Tsukiji bukan hanya merepresentasikan identitas budaya nasional Jepang yang sangat mencintai hidangan laut, namun juga berperan penting dalam industri perikanan global. Dari penyelam pencari landak laut di Maine (salah satu negara bagian Amerika Serikat), hingga peternak udang di Thailand. Dari nelayan Jepang yang mencari ikan di Samudera Hindia, sampai peternak tuna di laut Adriatik, semuanya terhubung dalam lalu lintas penjualan ikan di pasar Tsukiji (Bestor, 2004 : 2).

Kembali ke rencana relokasi Pasar Tsukiji, para ahli dan juga para pedagang di pasar Tsukiji tentu saja mempertanyakan keamanan tempat baru ini. Apalagi yang diperjualkan di pasar ini adalah makanan yaitu ikan dan sayuran. Belum lagi kenyataan bahwa salah satu kegiatan paling terkenal di pasar ini, yakni pelelangan tuna, sering dilakukan dalam keadaan ikan tuna dihamparkan di lantai pasar.



Gb. 3.6 Ikan Tuna Beku yang Dijual di Pasar Tsukiji

Sumber : <http://www.pahof.de/4855/64969.html> (diunduh tgl 28 November 2010)

Yukio Sakamaki, mantan wakil pimpinan *Japanese Association for Environmental Studies* juga semakin menegaskan hal ini dalam suatu wawancara dengan harian *Japan Times*, “Selama tanah di Toyosu beracun, sudah jelas bahwa tidak boleh ada makanan yang diperjual-belikan di atasnya” (<http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn2007824f1>).

Rencana pemindahan Tsukiji, yang telah beroperasi sejak tahun 1935 di atas lahan seluas 230.000 meter persegi di Chuo-ward, pertama kali diusulkan pada pertengahan tahun 70an. Kala itu, usulan ini sangat tidak disetujui oleh para pekerja

dan pedagang di pasar Tsukiji. Namun, usulan ini ternyata tidak berhenti di sini saja. Pada tahun 1997, pabrik *Tokyo Gas* lama di Toyosu muncul sebagai kandidat utama lokasi baru pasar Tsukiji. Di bawah kepemimpinan Ishihara, yang pertama kali dipilih sebagai gubernur pada tahun 1999, rencana ini mulai melesak lagi ke permukaan.

Menurut Gubernur Ishihara, lokasi pasar yang sekarang tidak higienis, terlalu tua dan juga terlalu kecil, tidak sebanding dengan distribusi ikan dan sayur yang ditanganinya yaitu sebanyak 3.300 ton sehari (seharga 2.1 milyar yen). Sejauh ini, Tokyo telah membeli sepertiga lahan bekas pabrik *Tokyo Gas* itu seharga 62.7 milyar yen. Total biaya relokasi yang dianggarkan adalah sebesar 128.7 milyar yen. Dan itu tidak termasuk membeli perlengkapan serta mempercantik kembali pulau buatan ini.



Gb. 3.7 Bekas Pabrik Gas di Toyosu

Sumber : <http://greenvoice.com/campaigns/> (diunduh tgl 2 Oktober 2010)

Bisa dilihat pada gambar di atas, air yang telah tercemar merembes keluar dari tanah, walaupun tidak sedang hujan. Hal tersebut menunjukkan betapa berbahayanya lokasi ini. Pemerintah Tokyo Metropolitan berdalih bahwa mereka siap untuk membersihkan lahan tersebut sampai dengan kedalaman 4,5 meter dan melapisi permukaannya dengan aspal.

Namun menurut seorang pemerhati lingkungan, Sakamaki, yang spesialisinya adalah geologi, tindakan yang akan dilakukan pemerintah tersebut sama sekali tidak berguna. Berdasarkan observasinya mengenai *liquefaction* yang ditimbulkan oleh gempa terakhir di Prefektur Niigata, dimana tanah basah menjadi cairan karena digetarkan oleh gempa, Sakamaki berspekulasi bahwa gempa besar di Tokyo dapat dengan mudah membawa racun yang terkandung di tanah Toyosu naik ke permukaan.



Gb. 3.8 Karikatur yang Mengkritik Rencana Pemindahan Pasar Tsukiji
 Sumber : <http://greenvoice.com/campaigns> (diunduh tgl 2 Oktober 2010)

Ada pihak yang menganggap bahwa motif tersembunyi Ishihara dari relokasi Tsukiji adalah untuk menyediakan lahan di bekas pasar Tsukiji sebagai lokasi diadakannya Olimpiade tahun 2016, walaupun banyak pengamat menilai bahwa kesempatan Tokyo untuk memenangkan tender pengadaan Olimpiade 2016 sangatlah kecil. Dan memang kemudian, pada 2 Oktober 2009, Tokyo harus mengakui kekalahannya kepada Rio de Janeiro, Brazil yang terpilih sebagai Host Olimpiade 2016.

Kekalahan ini tidak menghilangkan spekulasi lain mengenai motif tersembunyi Ishihara. Gubernur Tokyo ini dianggap mengejar keuntungan materi semata. Sebagai informasi, Pasar Tsukiji hanya terletak beberapa blok jauhnya dari

Ginza, distrik pusat perbelanjaan elit di Tokyo. Harga tanah di Ginza per-meter persegi adalah termasuk yang paling mahal di dunia (seharga 20,2 juta yen per meter persegi, berdasarkan situs berita bisnis dan keuangan www.bloomberg.com). Hal ini tentu cukup menggiurkan. Karena jika pasar Tsukiji dipindahkan, seluruh tanah bekas pasar Tsukiji bisa dijual ke developer dan menghasilkan 2 triliun yen (<http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20070824f1.html>).

Bagaimana pandangan *Tokyo Netto* mengenai kebijakan ini? Seperti dikutip dalam http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_news/0907/0907100789/1.php, segera setelah pemilu 2009 putaran terakhir, Yamaguchi Fumie, perwakilan dari *Tokyo Seikatsusha Network* telah memberikan pernyataan pada pers yang menunjukkan sikap dan posisi *Tokyo Seikatsusha Network* dalam menghadapi rencana ini; 生活者ネットワークは築地市場の豊洲移転を批判 (*seikatsusha nettowaku wa tsukiji ichiba no toyosu iten o hihan* – *Seikatsusha Network* mengkritik pindahnya pasar tsukiji ke Toyosu)



Gb. 3.9 Yamaguchi Fumie Ketika Memberikan Konferensi Pers

Sumber : <http://www.senkyo.janjan.jp/> (diunduh tgl 7 Oktober 2010)

Selanjutnya, tidak hanya mengkritik, seperti dipublikasikan dalam situs resminya, www.seikatsusha.net, *Tokyo Netto* sangat menentang rencana pemindahan pasar Tsukiji ke Toyosu, seperti dapat disimak pada kutipan berikut ini :

“Saat ini, selain memperhatikan manajemen kehygienisan dan keadaan lingkungan, Seikatsusha menyadari bahwa keterbatasan Tsukiji yang bertambah tua dan sempit membuat perpindahan ini tidak dapat dihentikan. Namun, melihat dari polusi serius yang terjadi pada tanah di Toyosu, tentunya rencana ini perlu dipikirkan lagi. Mungkin dengan alternatif lain seperti memindahkan ke Harumi

atau lokasi lain di Tokyo.” (dikutip dari artikel berjudul どうする?! 築地市場移転問題 -Bagaimana Menyikapinya?? Masalah pemindahan pasar Tsukiji. <http://www.seikatsusha.net/back/item/1145847210/1245939596.html>)

Permasalahan ini cukup menjadi perdebatan di dewan perwakilan Tokyo Metropolitan. *Yomiuri Shimbun* tertanggal 4 Juli 2009 menyebutkan bahwa terdapat dua blok yang saling bertentangan. *LDP* dan *New Komeito* bersikeras bahwa tidak ada tempat lain selain Toyosu yang sesuai untuk lokasi baru Tsukiji karena tidak ada yang seluas Toyosu. Namun mereka setuju bahwa pemindahan ini hanya boleh dilakukan jika tanah di Toyosu sudah terlebih dulu dipurifikasi. Di lain pihak, *DPJ* (*Democratic Party of Japan*), *JCP* (*Japanese Communist Party*), dan *Tokyo Seikatsuha Network* menentang keras rencana ini karena lahan di Toyosu dianggap tidak aman dan tidak akan berubah menjadi aman walaupun sudah dipurifikasi.

Koalisi antara *DPJ*, *JCP*, dan *Tokyo Seikatsuha Network* segera membentuk komite khusus sehubungan dengan perbaikan kembali ataupun pemindahan pasar Tsukiji. Komite ini banyak mengadakan pertemuan-pertemuan dan penelitian untuk mencari solusi terbaik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sekelumit jadwal pertemuan komite khusus tersebut berikut ini :

Tabel 3.3 Jadwal Pertemuan Komite Khusus Pasar Tsukiji

Tanggal	Hari	Jam	Tempat	Topik Bahasan
5 Oktober 2010	Selasa	15.30	Ruang komite khusus	Presentasi laporan investigasi lapangan komite khusus
3 Oktober 2010	Minggu	12.45	Ruang komite khusus	Diskusi mengenai apakah Tsukiji harus tetap di tempat yang sekarang (dengan perbaikan) atau dipindahkan ke Toyosu.
2 September 2010	Kamis	13.00	Ruang komite khusus	Mendengarkan kesaksian dari orang yang terlibat dalam rencana pemindahan tsukiji
24 Agustus 2010	Selasa	13.00	Ruang komite khusus	Sesi tanya jawab Topik : lahan Toyosu tercemar polutan berbahaya
3 Agustus 2010	Selasa	14.00	Ruang komite khusus	Penjelasan Topik : lahan Toyosu tercemar polutan berbahaya
28 Juli	Rabu	13.00	Ruang	Laporan Investigasi

2010			komite khusus	Topik : lahan Toyosu tercemar polutan berbahaya
16 Juli 2010	Jumat	13.00	Ruang komite khusus	Pembentukan sub-komite
9 Juni 2010	Rabu	12.15	Ruang komite khusus	Penutupan riset lanjutan
17 Mei 2010	Senin	13.00	Ruang komite khusus	Mendengarkan pernyataan orang yang terlibat mengenai keadaan pasar Tsukiji saat ini
21 April 2010	Rabu	13.00	Ruang komite khusus	Laporan lengkap mengenai perbaikan pasar Tsukiji

Sumber : <http://www.gikai.metro.tokyo.jp/> (diunduh tgl 20 Oktober 2010)

Selain aktif dalam komite khusus, *Tokyo Seikatsuha Network* juga merancang presentasi dan diskusi dengan para anggotanya sehingga solusi masalah bisa dipikirkan bersama-sama. Seperti contohnya, pada tanggal 24 Mei 2010, *Tokyo Seikatsuha Network* cabang Suginami-ku, mengadakan seminar kecil dengan mendatangkan seorang jurnalis, Tanaka Kouji, yang banyak mengetahui informasi mengenai masalah pasar Tsukiji (<http://ichihashi.seikatsusha.net/back/item/1179303197/1272770115.html>).



Gb 3.10 Seminar Kecil Mengenai Tsukiji

Sumber : <http://ichihashi.seikatsusha.net/> (diunduh tanggal 15 Oktober 2010)

Dengan cara ini, anggota-anggota *Tokyo Seikatsuha Network* yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga mendapatkan akses untuk mengetahui secara rinci apa yang sebenarnya menjadi masalah dalam rencana pemindahan pasar Tsukiji. Pengetahuan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian mereka,

sehingga *Tokyo Seikatsusha Network* bisa menjadi tim yang solid dalam menentang pemindahan pasar Tsukiji ke Toyosu.

Berita terakhir dari *Mainichi Shimbun*, tertanggal 22 Oktober 2010, Gubernur Ishihara menyatakan pada pers bahwa beliau akan segera menyetujui pengesahan anggaran untuk memindahkan pasar Tsukiji ke Toyosu (<http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20101022p2g00m0dm103000c.html>). Pernyataan ini mendulang protes keras dari berbagai kalangan, termasuk dari *Tokyo Seikatsusha Network*.

Dalam website resminya tertanggal 25 Oktober 2010, *Tokyo Seikatsusha Network* memprotes keras pernyataan gubernur yang dianggap tidak memperhatikan suara rakyat dan juga menyepelkan pendapat dewan perwakilan lain yang berpendapat bahwa masih perlu diadakan rapat lanjutan untuk memutuskan hal sebesar ini.

今回の記者会見のなかで、知事は、「いたずらの対立は良くない」「都民の利益を考える」と発言しましたが、土壌汚染された豊洲へ移転をすることが消費者にとって最善の利益とは考えられません。引き続き、議会において、十分な議論が必要であり、生活者ネットワーク・みらいは、石原知事の発言に強く抗議するものです。

Konkai no kisha kaiken no naka de, chiji wa "itazura no tairitsu wa yokunai" "shimin no riei o kangaeru" to hatsugen shimashita ga, dojoyou ozen sareta toyosu e iten suru koto ga shouhisha ni totte saizen no riei to wa kangaeraremasen. Hikitsuzuki, Gikai ni oite, jyubbun na giron ga hitsuyou de ari, seikatsusha nettowaaku mirai wa, ishihara chiji no hatsugen ni tsuyoku kougi suru mono desu.

Terjemahan :

Pada konferensi pers kali ini, Gubernur menyatakan "konflik yang tidak elegan itu tidak baik". Ia juga menyatakan "mempertimbangkan kepentingan warga" namun, memindahkan Tsukiji ke tanah Toyosu yang telah terkontaminasi tentulah bukan hal yang paling menguntungkan bagi konsumen. Selanjutnya, dalam *diet* diperlukan diskusi yang cukup mengenai hal ini (sebelum memutuskan sesuatu), karena itu *Seikatsusha Network Mirai** sangat menentang pernyataan gubernur Ishihara (<http://www.togikai-seikatsusha.net/modules/news/article.php?storyid>).

Ket : * = sebutan lain *Tokyo Seikatsusha Network*, sesuai dengan slogan kampanyenya tahun 2009, *shimin ga sodateru Tokyo • mirai* – Kami, penduduk Tokyo, akan membangun masa depan Tokyo.

Gubernur Ishihara juga sempat menyinggung pada harian *Brisbane Times* bahwa pasar Tsukiji sudah terkontaminasi oleh asbestos yang banyak digunakan sebagai balok2 penyangga pasar Tsukiji. Salah seorang pejabat pasar Tsukiji bahkan sampai mengatakan “*Choose your poison*” (pilih racunmu) untuk menggambarkan keadaan Tsukiji saat ini yang terkontaminasi asbestos dan rencana pemindahannya ke Toyosu yang tanahnya terkontaminasi benzena.

Untuk menanggapi hal ini, pada tanggal 13 Oktober 2010, sebagaimana dimuat dalam website resminya, <http://hoshi.seikatsusha.net>, Hoshi Hiroko, salah satu anggota Tokyo Seikatsusha Network yang kini menduduki jawabatan dewan perwakilan Tokyo metropolitan, mengunjungi pasar Tsukiji antara lain bersama dengan anggota komite khusus pasar Tsukiji lain yaitu Yanagase Hirofumi dan Okada Mariko dari DPJ, untuk meninjau keadaan asbestos di sana (dapat dilihat pada gambar 3.6 dan 3.7).



Gb. 3.11 Hoshi Hiroko ketika meninjau asbestos Tsukiji



Gb. 3.12 Tukar pendapat mengenai keadaan Tsukiji

Sumber : <http://hoshi.seikatsusha.net> (diunduh tanggal 23 Oktober 2010)

Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang bisa dicermati. Pertama, sudah terlihat kerjasama yang baik antara sesama anggota partai yang menentang pemindahan pasar Tsukiji ke Toyosu (*Tokyo Seikatsusha Network* dan *DPJ*). Dan kedua, dalam website ini, Hoshi Hiroko juga menuliskan bahwa hasil peninjauan ini (dan juga peninjauan-peninjauan serta rapat selanjutnya) nantinya akan menjadi senjata untuk melakukan 対策 (*taisaku* – rencana balasan) terhadap rencana pemindahan pasar Tsukiji ke Toyosu.

Menilik dari semua data-data di atas, cukup masuk akal kiranya jika politik ibu-ibu rumah tangga dalam *Tokyo Seikatsusha Network* ini ditinjau dari kacamata politik lokalisme, yang mendefinisikan bahwa kebijakan lebih baik dijalankan pada level yang terdekat dengan orang-orang yang terkena dampaknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan yang dicanangkan *Seikatsusha Network* banyak didasarkan pada "kualitas hidup" seperti isu lingkungan dan isu konsumen. Dalam kasus ini, *Seikatsusha Network* yang dalam situs resminya sampai menyebut 都民の台所である築地市場 (*tomin no daidokoro de aru tsukiji ichiba* – Pasar Tsukiji sebagai dapur warga Tokyo), tentu saja menganggap rencana pemindahan pasar Tsukiji ke tempat yang tanahnya terkontaminasi zat kimia berbahaya sebagai rencana yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Semua pertemuan, peninjauan bahkan protes yang dilancarkan *Seikatsusha Network* memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya bicara namun juga bertindak, sungguh-sungguh melakukan sesuatu demi apa yang mereka anggap benar dan sesuai dengan kepentingan warga.

Walaupun *Tokyo Seikatsusha Network* tidak dapat mengklaim bahwa mereka telah meraih sukses yang luar biasa, namun tetap saja, apa yang telah mereka raih tidak dapat dianggap remeh. Jika dibandingkan dengan dewan perwakilan lain yang mencalonkan diri secara independen, keberadaan dewan perwakilan dari *Tokyo Seikatsusha Network* menjadi penting. Karena ini adalah pertama kalinya warga biasa (yang bahkan mayoritasnya adalah ibu rumah tangga) membentuk partai mereka sendiri untuk menantang partai yang telah ada.

Berbeda dengan dewan perwakilan yang independen, dewan perwakilan dari *Tokyo Seikatsusha Network* selain di *back-up* oleh partai politik lokal (*Tokyo Seikatsusha Network*) juga didukung oleh anggota grup konsumen (*Seikatsu Kurabu*) yang telah terorganisir dengan baik dan menjanjikan kelangsungannya sebagai alternatif dari partai yang sudah ada.

Telah sedikit disinggung juga sebelumnya pada bab II, bahwa keunggulan ibu-ibu rumah tangga ini adalah mereka membawa politik lebih dekat dengan masyarakat. Dengan membawa proses pembuatan kebijakan lebih dekat ke masyarakat dan dengan membuat kebijakan berdasarkan apa yang benar-benar diperlukan dan diprioritaskan oleh masyarakat daerah, tentunya mampu

memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan demokrasi di Jepang. Dimana politik benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di sisi lain, politik ibu-ibu rumah tangga dalam *Tokyo Seikatsusha Network* ini juga cukup sesuai jika ditinjau dengan teori feminisme liberal yang berideologi egalitarianisme (berkenaan dengan doktrin persamaan hak warga negara di bidang politik, ekonomi, dan hukum), karena memperlihatkan bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama dengan mayoritas politisi pria yang lain, yaitu sama-sama bisa mempengaruhi kebijakan.

Kenyataan bahwa *Tokyo Seikatsusha Network* hanya mendapatkan dua kursi (dari 127 kursi) di dewan perwakilan Tokyo Metropolitan pada pemilihan tahun 2009 bisa saja dilihat sebagai sesuatu yang masih mengecewakan. Namun, ada hal penting yang harus kita garisbawahi di sini, bahwa keberadaan mereka di dewan perwakilan saja, sudah merupakan akses yang berharga bagi mereka untuk mengetahui informasi mengenai rancangan kebijakan terkini.

Selain itu, mereka menjadi memiliki kesempatan untuk bertanya, menyanggah, atau mendukung di rapat dewan perwakilan, yang tentunya semua pertanyaan, sanggahan, dan dukungan ini harus ditanggapi oleh gubernur dan pejabat birokrat lain.

Aktifnya *Tokyo Seikatsusha Network* dalam mencari data-data, menyelenggarakan survei, dan melakukan penelitian lapangan juga membuat mereka sebagai *partner* politik yang menarik. Karena dengan mempelajari data-data yang mereka kumpulkan, maka proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak pun akan lebih mudah diwujudkan.

Lepas dari bagaimana rencana pemindahan pasar Tsukiji ini akan berakhir nantinya (karena sampai saat ini pun masih dalam proses), apakah *Tokyo Seikatsusha Network* akan gagal atau berhasil dalam meraih apa yang dicita-citakannya, usaha-usaha anggota dan dewan perwakilannya dalam memperjuangkannya saja sudah merupakan bukti bagaimana mereka menjadi aktor dalam politik lokal di Tokyo Metropolitan.

Sebagai aktor politik, peran mereka sebagai ibu telah menjadi pusat dalam kerangka berpikir mereka. Sebuah kunci yang menentukan dalam pola perilaku dan cara pembuatan keputusan. Membangkitkan naluri keibuan ibu-ibu rumah tangga

ini terbukti merupakan cara yang efektif untuk memotivasi mereka dalam beraksi, mengusahakan apa yang mereka anggap terbaik untuk anaknya dan keluarganya. dan dalam cakupan yang lebih luas, terbaik untuk masyarakat.

Tokyo Seikatsusha Network tidak hanya meminta pemerintah untuk menemukan solusi dari permasalahan, namun mereka juga menawarkan alternatif lain, yang telah terbentuk dari pengalaman mereka sehari-hari. Tidak salah kiranya jika terjunnya ibu-ibu rumah tangga dalam politik lokal ini diharapkan bisa membentuk sistem politik Jepang menjadi sistem yang lebih baik di kemudian hari.



Bab IV Kesimpulan

Telah muncul fenomena menarik sehubungan dengan semakin banyaknya wanita Jepang yang terjun dalam dunia politik lokal di Jepang. Mereka kini menduduki kursi dewan perwakilan setara daerah tingkat I (prefektur) dan daerah tingkat II (*municipal* - kota besar/kecamatan) dalam jumlah yang cukup signifikan. Yang lebih menarik lagi, sebagian dari mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang aktif bergabung dalam partai politik lokal, yang didukung oleh grup konsumen. Salah satunya, partai politik lokal *Tokyo Seikatsusha Network*, yang merupakan sayap politik dari grup konsumen yang bernama *Seikatsu Kurabu*.

Kehadiran *Seikatsusha Network* telah membuat politik menjadi lebih dekat dengan warga negara, dalam hal ini, ibu rumah tangga. Fokus kebijakan *Seikatsusha Network* yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari warga negara, seperti contohnya isu konsumen, pencemaran lingkungan, makanan yang tidak sehat, telah menggelitik insting keibuan ibu rumah tangga Jepang untuk turut aktif demi memperjuangkan kebijakan yang terbaik bagi anak mereka, keluarga mereka, dan pada akhirnya, dalam ruang lingkup yang lebih luas, masyarakat tempat mereka tinggal.

Melangkah ke bahasan selanjutnya mengenai keterwakilan wanita di politik lokal, data yang didapatkan menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan wanita di daerah metropolitan dan kota besar jauh lebih besar dibandingkan di prefektur maupun desa. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa salah satu induk *Seikatsusha Network* yang terbesar adalah yang berpusat di Tokyo Metropolitan, yaitu *Tokyo Seikatsusha Network*.

Total jumlah anggota *Tokyo Seikatsusha Network* kurang lebih 1500 orang. Dan menurut wawancara dengan kepala kantor pusat *Tokyo Seikatsusha Network* mayoritas anggotanya adalah ibu rumah tangga berusia 50an tahun (Hal ini sejalan dengan hasil angket yang menunjukkan rata-rata responden berusia 55,9 tahun).

Politik ibu rumah tangga Jepang ini bukannya luput dari masalah. Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi adalah manajemen waktu. 30% responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa hal yang cukup menjadi masalah dalam

keterlibatannya di *Seikatsusha Network* adalah *たくさん時間が使います* (*takusan jikan ga tsukaimasu* – banyak menghabiskan waktu). Mungkin ini juga yang mempengaruhi engganannya sebagian besar responden (60%) untuk dicalonkan menjadi dewan perwakilan.

Walaupun belum menjadi partai besar, *Seikatsusha Network* yakin bahwa bentuk mereka sebagai *local party*, bisa mengubah politik Jepang. Partai nasional umumnya memiliki keterbatasan karena terkadang sulit untuk mengaplikasikan peraturan yang sama kepada komunitas-komunitas yang memiliki keadaan demografis, ekonomi, dan geografis yang berbeda.

Banyak isu politik yang tak terpisahkan dari pertimbangan regional, seperti masalah sampah, suplai air, dan tata kota. Satu kebijakan yang sama tidak bisa memenuhi kebutuhan semua daerah. Pada saat inilah *local party* dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan di daerah setempat. Hal ini sejalan dengan teori lokalisme, yang digunakan dalam tesis ini, yang melihat bahwa kebijakan lebih baik dijalankan pada tingkatan yang terdekat dengan orang-orang yang terkena dampaknya.

Contoh sepak terjang *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai aktor politik lokal di Jepang bisa dilihat pada studi kasus yang dianalisis dalam tesis ini, mengenai pro dan kontra rencana pemindahan pasar Tsukiji ke daerah Toyosu yang tanahnya telah tercemar polutan kimia. *Seikatsusha Network* yang dalam situs resminya sampai menyebut *都民の台所である築地市場* (*tomin no daidokoro de aru tsukiji ichiba* – Pasar Tsukiji sebagai dapur warga Tokyo), tentu saja menganggap rencana pemindahan pasar Tsukiji ke tempat yang tanahnya terkontaminasi zat kimia berbahaya sebagai rencana yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Karena itu, semua pertemuan, peninjauan bahkan protes pun dilancarkan. Hal ini menunjukkan bahwa *Tokyo Seikatsusha Network* tidak hanya bicara namun juga bertindak, sungguh-sungguh melakukan sesuatu demi apa yang mereka anggap benar dan sesuai dengan kepentingan warga.

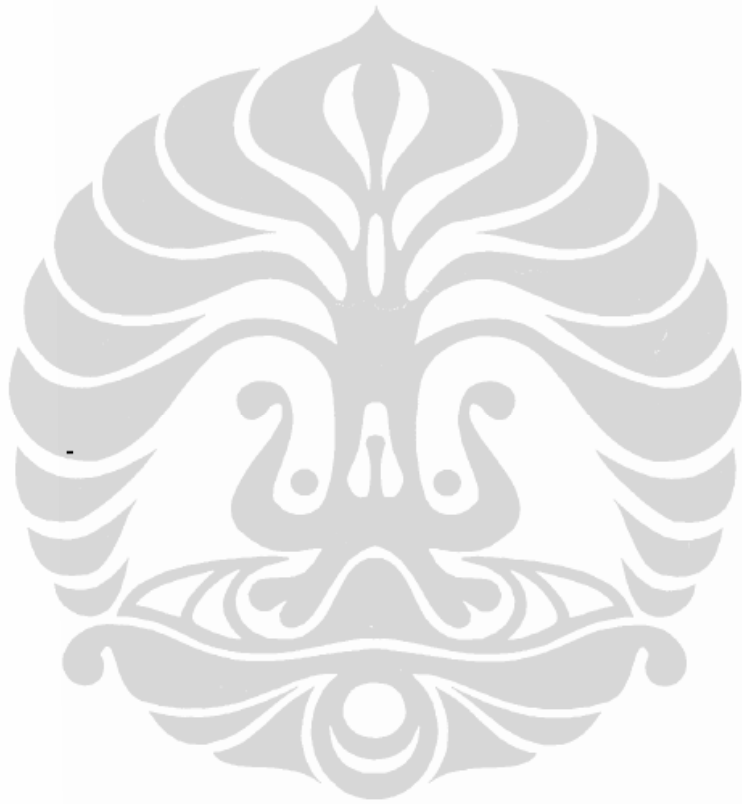
Kenyataan bahwa *Tokyo Seikatsusha Network* hanya mendapatkan dua kursi (dari 127 kursi) di dewan perwakilan Tokyo Metropolitan pada pemilihan tahun 2009 bisa saja dilihat sebagai sesuatu yang belum memuaskan. Namun, ada hal penting yang patut diperhatikan di sini, bahwa keberadaan mereka di dewan

perwakilan saja, sudah merupakan akses yang berharga bagi mereka untuk mengetahui informasi mengenai rancangan kebijakan terkini.

Selain itu, mereka menjadi memiliki kesempatan untuk bertanya, menyanggah, atau mendukung di rapat dewan perwakilan, yang tentunya semua pertanyaan, sanggahan, dan dukungan ini harus ditanggapi oleh gubernur dan pejabat birokrat lain. Dengan kata lain, bisa ikut mempengaruhi kebijakan, sesuai dengan teori feminisme liberal, yaitu paham yang menekankan agar kaum wanita berjuang untuk mendapatkan kesetaraan dengan pria di ruang publik.

Dengan penjelasan di atas, permasalahan penelitian ini yaitu membahas dan menganalisa mengenai bagaimana politik ibu rumah tangga Jepang dalam *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai partai politik lokal dengan menggunakan teori feminisme liberal dan lokalisme, terselesaikan.

Akhirnya, tidak salah kiranya jika politik ibu-ibu rumah tangga Jepang dalam *Tokyo Seikatsusha Network* sebagai partai politik lokal ini diharapkan bisa membentuk sistem politik Jepang menjadi sistem yang lebih baik di kemudian hari. Perlahan namun pasti, ibu-ibu rumah tangga ini telah berhasil menembus hambatan-hambatan yang sering dialami wanita untuk terjun dalam politik. Saat ini, politik lokal, di kemudian hari, mungkin saja merambah politik nasional. Tergantung bagaimana ibu-ibu rumah tangga Jepang ini bertahan dan berusaha untuk bisa diperhitungkan sebagai aktor politik yang handal. Mengingat bagaimana masyarakat Jepang sampai saat ini masih dikenal sebagai masyarakat patriarkat, tentunya banyak pihak yang menunggu-nunggu kelanjutan sepak terjang ibu-ibu rumah tangga Jepang ini dalam mengubah wajah dunia politik Jepang di masa mendatang.



DAFTAR REFERENSI

Pustaka Buku

- Beasley, Chris. 1999. *What is Feminism*. Australia: Sage Publications Ltd.
- Bestor, Theodore C. 2004. *Tsukiji : The Fish Market at The Center of The World*. USA : University of California Press.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Cherry, Kittredge. 1987. *Womansword: What Japanese Words Say About Women*. Japan: Kodansha International Ltd.
- Coleman, Samuel. 1991. *Family Planning in Japanese Society*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Curtis, Gerald L. 1988. *The Japanese Way of Politics*. USA: Columbia University Press.
- Edwards, Louise. 2000. *Women in Asia*. Malaysia : Allen & Unwin.
- Freedman, Amy L. 2000. *Political Participation and Ethnic Minorities : Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia, and the United States*. London : Routledge.
- Fujimura-Fanselow, Kumiko & Atsuka Kameda. 1995. *Japanese Women : New Feminist Perspectives on the Past, Present, and Future*. New York : The Feminist Press.
- Hasegawa, Koichi. 2004. *Constructing Civil Society in Japan*. Melbourne : Trans Pacific Press.
- Henshall, Kenneth G. 2002. *Dimensions of Japanese Society: Gender, Margins, and Mainstream*. New York : Palgrave Macmillan.
- Henslin, James M. 2008. *Sociology: A Down-to-earth-approach*. USA: Pearson and AB.
- Hrebenar, Ronald J. 1992. *The Japanese Party System*. USA: Westview Press.
- Imamura, Anne E. 1987. *Urban Japanese Housewives: At Home and in the Community*. USA : University of Hawaii Press.

- Iwao, Sumiko. 1993. *The Japanese Woman: Traditional Image and Change Reality*. New York: The Free Press.
- Karan, Pardyumna P. 2008. *Local Environmental Movements : A Comparative Study of the United States and Japan*. USA : The University Press of Kentucky.
- LeBlanc, Robin M. 1999. *Bicycle Citizens : The Political World of The Japanese Housewife*. USA : University of California Press.
- Lebra, Takie Sugiyama. 1984. *Japanese Women: Constraint and Fulfillment*. USA: University of Hawaii Press.
- Lebra, Takie Sugiyama. 1992. *Japanese Social Organization*. USA: University of Hawaii Press.
- Lovenduski, Joni & Pippa Noris. 1993. *Gender and Party Politics*. London : Sage Publications Ltd.
- Mackie, Vera. 2003. *Feminism in Modern Japan*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Maor, Moshe. 1997. *Political Parties and Party Systems : Comparative Approaches and the British Experience*. London : Routledge.
- Martinez, D.P. 2001. *The World Of Japanese Popular Culture: Gender, Shifting Boundaries, and Global Cultures*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- McCreery, John L. 2000. *Japanese Consumer Behavior: From Worker Bees to Wary Shoppers*. Great Britain: Curzon.
- Naruse, Nobutaka. 1997. *Nihon no Chihō Jichi*. Japan : Gyousei.
- Pharr, Susan J. 1981. *Political Women in Japan: The Search for a Place in Political Life*. USA : University of California Press.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rowbothom, Sheila. 1992. *Women in Movement*. USA: Routledge Chapman & Hall, Inc.
- Sano, Yōko. 2001. *Jyenda Manejimento : 21 Seikigata Danjo Kyōsō Kigyō ni Mukete*. Japan : Tōyō Keizai Shinbōsha.

Penerbit Buku Kompas.

Stokes, Wendy. 2005. *Women in Contemporary Politics*. UK : Polity Press.

Sugimoto, Yoshio. 2002. *An Introduction to Japanese Society*. London : Cambridge University Press.

Surajaya, I Ketut. 2006. *Otonomi Daerah Jepang : dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia*. Depok : FISIP UI PRESS.

Tenri Yamato Culture Congress. 2003. *Women and Religion*. Japan: Tenri Jihosha.

Watkins, Susan Alice, Marisa Rueda, dan Marta Rodriguez. 2007. *Feminisme untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book.

Jurnal

Dalton, Emma. 2008. "A Masculinised Party Culture : Obstacles Facing Women in Japan's Liberal Democratic Party". Centre For Asia Pasific Social Transformation Studies University of Wollongong.

Eto, Mikiko. "Women's Movements and Democracy in Japan: Intersection between Everyday Lives and Politics" Paper dipresentasikan pada *Annual meeting of the American Political Science Association*, Hilton Chicago and the Palmer House Hilton, Chicago, IL, Sep 02, 2004 - 2009-05-26
<http://www.allacademic.com/meta/p60770_index.html>

Gelb, Joyce. 1998. "Political Women in Japan : A Case Study of the Seikatsusha Network Movement". *Social Science Japan Journal* Vol. I No. 2, pp 263-279, 1998.

Gender Equality Bureau, Cabinet Office, Government of Japan. *Gender Equality in Japan 2007*.

Gender Equality Bureau, Cabinet Office, Government of Japan. *White Paper on Gender Equality 2009*.

Japan Report. *State of Women in Urban Local Government Japan*.

Maclachlan, Patricia L. 1997. *The Seikatsusha and The Fight For Consumer Rights : Consumer Movement Activism in Postwar Japanese Society*. *Japanstudien* Vol. 9 hal. 113-128.

Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) Japan. 2009. *Local Autonomy in Japan : Current Situation and Future Shape*.

- Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) Japan. 2009. *Local Autonomy in Japan : Current Situation and Future Shape*.
- Ogai, Tokuko. *Advance of Japanese Women in Politics : The General Local Election of 2003*. PS : Political Science and Politics, Vol. 37, No. 1 (Jan., 2004), pp. 58-59 (Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/4488765>).
- Pharr, Susan J. "Moralism" and the Gender Gap : Judgements of Political Ethics in Japan. *Political Psychology*, Vol. 19, No.1 (Mar, 1998), pp. 211-236 (Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/3792122>).
- Sheel, Ranjana. *Women in Politics in Japan*. *Economic and Political Weekly*, Vol. 38, No. 39 (Sep. 27 - Oct. 3, 2003), halaman 4097-4101.
- Sodei, Takako. *Women's Two Roles and Gender Equity*. *J. Home Econ. Jpn.* Vol. 48. No.1. hal. 91-98 (1997). Parkinson, John. *Localism and Deliberative Democracy.. The Good Society*, Volume 16, No.1, 2007.
- Vogel, Steven K. *When Interests Are Not Preferences: The Cautionary Tale of Japanese Consumers.. Comparative Politics*, Vol. 31, No. 2 (Jan, 1999), halaman 187-207 .
- Wulandari, Endah H. *Representasi Perempuan dalam Institusi Politik Jepang.. Manabu* Vol.2 No.2, May 2008.
- Hansson, Nina Mussolini. *Perempuan di Parlemen Swedia : Galak Namun Konsisten*. *Jurnal Perempuan* No. 34, 2004. Halaman 17-30.

Newsletter

2007年統一地方選挙/基本政策” (2007nen Touitsu Chihou Senkyo / Kihon Seisaku). Tokyo Seikatsusha Network. 2007.

Japanese Women no. 93-102 (1 Maret 2005 -1 September 2009). The Fusae Ichikawa Memorial Association.

Seikatsusha Network : Is A Political Network of Citizens. Tokyo Seikatsusha Network. 2009.

生活者通信 - *Seikatsusha Tsuushin* no.225 (1 Juni 2010). Tokyo Seikatsusha Network. 2010.

生活者せたがや - *Seikatsusha Setagaya* no. 106 (25 April 2010). Tokyo Seikatsusha Network. 2010.

Universitas Indonesia

Website

www.allacademic.com

<http://www.seikatsclub.coop/english/>

www.seikatsusha.net

<http://www.neweconomics.org/publications/localism>

www.thefreedictionary.com/localist

www.sochealth.co.uk/Labour/localismilburn.htm

<http://www.unescap.org/huset/women/reports/japan.pdf>

www.onlinewomeninpolitics.com

<http://web-japan.org>

<http://www009.upp.so-net.ne.jp/mariko-m/Advances-DAWN.htm>

<http://www.dawncenter.or.jp>

<http://femjapan.pbworks.com/Housewife-Movement>

<http://web-japan.org>

<http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2009/historic-victory-ticklish-transitio>

<http://www.shugiin.go.jp>

<http://www.sangiin.go.jp>

http://human-security.jp/blog/2007/11/the_four_big_pollution_disease.htm

<http://www.yomiuri.co.jp/intview/0622dy20.htm>

<http://www.yomiuri.co.jp/intview/0622dy21.htm>

<http://www.japanfocus.org/-Yasuo-TAKAO/2647>

<http://www.local-party.net/>,

<http://www.nishoren.org/en/?p=236>

<http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn2007824f1>

http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_news/0907/0907100789/1.php

<http://www.seikatsusha.net/back/item/1145847210/1245939596.html>

<http://www.togikai-minsyuto.jp/>

<http://www.gikai.metro.tokyo.jp/schedule/market.html>

<http://fichihashi.seikatsusha.net/back/item/1179303197/1272770115.html>

<http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20101022p2g00m0dm103000c.html>

<http://www.togikai-seikatsusha.net/modules/news/article.php?storyid>

<http://hoshi.seikatsusha.net>

Universitas Indonesia



LAMPIRAN

1. PEMBAGIAN TOKYO SEIKATSUSHA NETWORK
2. KRONOLOGI SEJARAH *TOKYO SEIKATSUSHA NETWORK*
3. ANGKET
4. TRANSKRIP WAWANCARA
5. FOTO-FOTO PADA SAAT WAWANCARA





LAMPIRAN 1 PEMBAGIAN TOKYO SEIKATSUSHA NETWORK

Berdasarkan *newsletter Seikatsusha Network* yang berjudul “2007年統一地方選挙/基本政策” (2007nen Touitsu Chihou Senkyo / Kihon Seisaku), adapun pembagian 33 *Seikatsusha Network* lokal dan 1 *Seikatsusha Network* pusat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

A. *Special Wards (Ku)* :

1. Adachi *Seikatsusha Network* (足立・生活者ネット)
2. Edogawa *Seikatsusha Network* (江戸川・生活者ネット)
3. Oota *Seikatsusha Network* (大田・生活者ネット)
4. Koutou *Seikatsusha Network* (江東・生活者ネット)
5. Shinagawa *Seikatsusha Network* (品川・生活者ネット)
6. Setagaya *Seikatsusha Network* (世田谷・生活者ネット)
7. Meguro *Seikatsusha Network* (目黒・生活者ネット)
8. Itabashi *Seikatsusha Network* (板橋・生活者ネット)
9. Suginami *Seikatsusha Network* (杉並・生活者ネット)
10. Nakano *Seikatsusha Network* (中野・生活者ネット)
11. Nerima *Seikatsusha Network* (練馬・生活者ネット)
12. Toshima *Seikatsusha Network* (豊島・生活者ネット)

B. *City (Shi)* :

13. Inagi *Seikatsusha Network* (稲城・生活者ネット)
14. Komae *Seikatsusha Network* (狛江・生活者ネット)
15. Tama *Seikatsusha Network* (多摩・生活者ネット)
16. Choufu *Seikatsusha Network* (調布・生活者ネット)
17. Hachiouji *Seikatsusha Network* (八王子・生活者ネット)



18. *Hino Seikatsusha Network* (日野・生活者ネット)
19. *Fuchu Seikatsusha Network* (府中・生活者ネット)
20. *Machida Seikatsusha Network* (町田・生活者ネット)
21. *Akishima Seikatsusha Network* (昭島・生活者ネット)
22. *Oume Seikatsusha Network* (青梅・生活者ネット)
23. *Kiyose Seikatsusha Network* (清瀬・生活者ネット)
24. *Kunitachi Seikatsusha Network* (国立・生活者ネット)
25. *Koganei Seikatsusha Network* (小金井・生活者ネット)
26. *Kokubunji Seikatsusha Network* (国分寺・生活者ネット)
27. *Kodaira Seikatsusha Network* (小平・生活者ネット)
28. *Tachikawa Seikatsusha Network* (立川・生活者ネット)
29. *Nishi-tokyo Seikatsusha Network* (西東京・生活者ネット)
30. *Higashi-murayama Seikatsusha Network*
(東村山・生活者ネット)
31. *Higashi-yamato Seikatsusha Network* (東大和・生活者ネット)
32. *Musashino Seikatsusha Network* (武蔵野・生活者ネット)
33. *Fussa Seikatsusha Network* (福生・生活者ネット)

C. *Seikatsusha Network* pusat :

34. *Tokyo Metropolitan Assembly of Seikatsusha Network*
(東京都議会・生活者ネット)



LAMPIRAN 2
KRONOLOGI SEJARAH TOKYO SEIKATSUSHA NETWORK

- 1977 * Usaha pertama untuk meraih kursi di dewan perwakilan Tokyo Metropolitan dari daerah pemilihan Nerima City, Tokyo. Slogan kampanye kala itu adalah “生き方を変えよう” (*ikikata wo kaeyou* – mari ubah cara hidup kita).
- * “グループ生活者” (*The Group Seikatsusha*), pendahulu *Seikatsusha Network*, didirikan di Nerima City.
- 1979 * Untuk pertama kalinya, perwakilan *The Group Seikatsusha* meraih kursi di dewan perwakilan kota Nerima.
- 1985 * Untuk pertama kalinya, perwakilan *The Group Seikatsusha* meraih kursi di dewan perwakilan Tokyo Metropolitan. Slogan kampanye kala itu adalah “政治を生活の道具に” (*seiji o seikatsu no dougu ni* – gunakan politik sebagai alat dalam kehidupan).
- 1988 * *The Group Seikatsusha* berubah nama menjadi *Seikatsusha Network*.
- 1989 * Melakukan gerakan “Inisiatif Makanan Aman” dan mengajukan petisi yang telah ditanda-tangani oleh 550.000 orang ke pemerintah Tokyo Metropolitan.
- 1991 * Membuat rancangan peraturan daur ulang untuk Tokyo.
- 1993 * Sukses meraih tiga kursi di dewan perwakilan Tokyo Metropolitan, dengan mengusung slogan “東京を変える” (*Tokyo o kaeru* – mengubah Tokyo).
- 1997 * Memeriksa halangan bagi orang cacat untuk melakukan aktivitasnya di Tokyo, di bawah slogan “バリアフリーの東京をつくる” (*bariafurii no tokyo o tsukuru* – membuat Tokyo sebagai kota yang bebas halangan bagi orang cacat).
- 1999 * Sukses dalam mengirim 57 perwakilan ke dewan perwakilan kota dan Tokyo Metropolitan, dibawah slogan “子育て・介護は社会の仕事” (*kosodate・gokai wa shakai no shigoto* – mensosialisasikan pengasuhan anak dan pengurusan manula).



- 2000 * Berjuang untuk undang-undang hak anak di Tokyo
- 2001 * Sukses mengirim 6 perwakilan ke dewan perwakilan Tokyo Metropolitan dengan slogan “東京を生活のまちに” (*Tokyo o seikatsu no machi ni* – membuat Tokyo sebagai kota yang mudah ditinggali)
- 2003 * Sukses mengirim 63 perwakilan ke dewan perwakilan kota (di berbagai kota di Tokyo) dengan slogan “地域力・市民力・安心・共生のまちをつくる” (*chiikiryoku・shiminryoku・anshin・kyoosei no machi o tsukuru* – bersama-sama membangun komunitas yang lebih aman).
- 2005 * Sukses mengirim 3 perwakilan ke dewan perwakilan Tokyo Metropolitan, dengan mengusung slogan “働く・育てる 市民力” (*hataraku・sodateru・shiminryoku* – kekuatan kita akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik).
- 2007 * Sukses mengirim 4 perwakilan ke dewan perwakilan Tokyo Metropolitan dan 51 perwakilan ke dewan perwakilan kota, dengan slogan “変えます！ 議会・つくります！仕事” (*kaemasu! Gikai・tsukurimasu! shigoto* – mengubah dewan perwakilan dan menciptakan lapangan pekerjaan).
- 2009 * Sukses mengirim dua perwakilan ke dewan perwakilan Tokyo Metropolitan dengan slogan “市民が育てる 東京・未来” (*shimin ga sodateru Tokyo・mirai* – Kami, penduduk Tokyo, akan membangun masa depan Tokyo).



LAMPIRAN 3
ANGKET



インドネシア大学・大学院プログラム・日本地域研究

私はインドネシア大学の大学院生で、日本地域研究を専攻しています。現在、東京生活者ネットワークに参加する日本人主婦について研究をしていて、アンケート調査へのご協力をお願いしたいと思います。このアンケートの結果は、営利目的ではなく研究のためで、お答えいただいた内容に関しては、すべて秘密厳守をお約束し、論文のみ使用いたします。

ご協力どうぞよろしく申し上げます。

カデ・エヴァ・クリスナ・アドニャニ



アンケート

1. 名前 :
2. Eメール :
3. 年齢 :
4. どの区・市に住んでいますか :
5. ご主人の職業 :

- 会社員
- 自営業
- 教師
- 退職者
- その他 ()

6. 子供がいますか : いいえ

はい

* 何人いますか :人

* 一番年下の子供は何歳ですか :歳

7. 常勤で働いていますか。

いいえ

はい

* 職業 :

* 一週間何時間働きますか :時間





1 1. 生活クラブにも参加しましたか。

- はい
- いいえ

1 2. 生活者ネットに参加することについて、ご主人はどう思いますか。

- 支援しています
- 気にしません
- 反対されています
- 主人はこのネットに参加することを知りません
- その他 ()

1 3. 今までに何年間生活者ネット
に参加しましたか? 年間

1 4. 何の問題に一番興味を持っていますか。

- 教育
- 男女平等
- 老人問題
- 暮らしやすい町
- 安全な食べ物
- その他 ()



15. もしチャンスがあれば、都・市・区議会議員になりたいですか。

はい

いいえ *理由。.....
.....

16. 生活者ネットが一番好きなアクティビティーはなんですか？

協議会

調査活動

ミニフォーラム

その他 ()

17. 生活者ネットについて一番いやなことはなんですか？

会費を払うこと

たくさん時間を使います

アクティビティーはつまらない

その他 ()

18. 生活者ネットに参加することは楽しいですか。

楽しくない ←————→ とても楽しい

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

貴重なお時間とご協力、誠にありがとうございました。



LAMPIRAN IV TRANSKRIP WAWANCARA

Untuk melengkapi data, pada tanggal 15 Juli 2010, penulis mendatangi kantor pusat Tokyo Seikatsusha Network untuk mewawancarai Nakamura Eiko, yang menduduki jabatan sebagai kepala kantor pusat tersebut. Berdasarkan wawancara tersebut, didapatkan hasil seperti berikut ini :

Penulis : *Eeto.. eigo de ii desu ka?*

Nakamura Eiko : *A! ok!*

Penulis : *How many Seikatsusha Network are there in Japan?*

Nakamura Eiko : *Eeto.. Hokkaido, Saitama.. Chiba, Kumamoto.. Tsukuba-shi, Yokohama, Nagano, Fukuoka, Tokyo to Kanagawa.. There are 10. Minna local party.*

Penulis : *And how many members are there in Tokyo Seikatsusha Network?*

Nakamura Eiko : *Around 1500 people. And the giin, representatives, are 54 people.*

Penulis : *Minna Tokyo togikai giin desu ka?*

Nakamura Eiko : *chigau, chigau... 52 people are for ku and shi representatives. Only two people for Tokyo togikai giin.*

Penulis : *Aa.. sou desu ka.. Who can join Tokyo Seikatsusha Network? Only woman? Josei dake desu ka?*

Nakamura Eiko : *Dansei mo imasu. But very few. For example, in Saitama Netto just one man member. And also in Chiba Netto, only one man member. Can be woman or man, but have to be above 18 years old.*

Penulis : *And among the members, eeto.. majority of them are housewives?*

Nakamura Eiko : *yes, mostly housewives.*

Penulis : *average age, heikin nenrei wa?*

Nakamura Eiko : *eeto.. nijusai.. sanju sai mo imasu.. but average age.. mostly gojusai..*

Penulis : *The youngest, ichiban toshi shita wa nansai desu ka?*

Nakamura Eiko : *A! Suginami netto no membaa.. nijunana sai..*

Penulis : *So desu ka.. And the oldest is...?*



Nakamura Eiko : *Nerima Netto no membaa.. she is 80 years old now. She joined seikatsusha from 1977, from the first time Seikatsusha Netto in Nerima established.*

Penulis : *do they have to pay membership fees?*

Nakamura Eiko : *yes... demo, tokoro ni yotte chigau..*

Penulis : *daitai ikura desu ka?*

Nakamura Eiko : *daitai 4800 yen, in one year. That money is also to buy coffee.. when meeting, members drink a lot of coffee..*

Penulis : *aa.. so desu ka.. eeto.. what is the activity that most often conducted?*

Nakamura Eiko : *chousa katsudou! If we find problem, we will tell giin to have a meeting. Kaigi de, isshoni seisaku o suru. Giin ga sono seisaku o hatsugen suru.*

Penulis : *and where do tokyo netto publish information? koukoku.. in television?*

Nakamura Eiko : *no, not in television. Sometimes we put it in newspaper. But often in newsletter. Like this newsletter. Seikatsusha tsuushin. And this, newsletter in setagaya.*

Penulis : *how much is it? Seikatsusha Tsuushin..*

Nakamura Eiko : *hyaku en..*

Penulis : *and Tokyo netto publish seikatsusha tsuushin every month?*

Nakamura Eiko : *hai, mai tsuki*

Penulis : *and in each smaller netto, like setagaya, they have their own newsletter?*

Nakamura Eiko : *yes, each of them have newsletter. But not publish every month. Like in setagaya, 4 times a year. Every three months. You are from Indonesia, right?*

Penulis : *yes..*

Nakamura Eiko : *I think there is also indonesian in hachioji..*

Penulis : *she joins seikatsusha network too?*

Nakamura Eiko : *no, she joins seikatsu kurabu.*

Penulis : *ah.. do you know her name?*

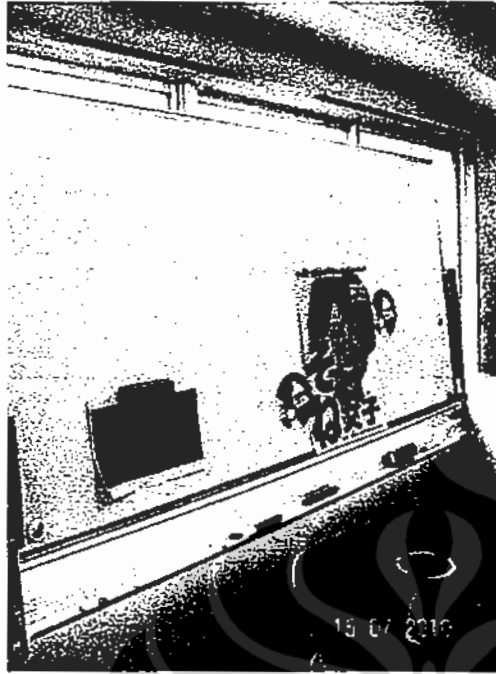
Nakamura Eiko : *no, I just heard it from my friend. Because its seikatsu kurabu, not seikatsusha network, I don't have data about her.*

Penulis : *ah. So desu ka. Eeto.. thank you very much for your time, for the interview, nakamura-san..*

Nakamura Eiko : *You are welcome.*







Keterangan : Poster salah satu kandidat Tokyo Seikatsusha Network yang ditempel di ruangan kantor



Keterangan : Nakamura Eiko (berkacamata) dan staf sehabis wawancara.

